



PEMERINTAH DAERAH
KOTA DUMAI



2025-2029

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

- ☎ 0811 7771 256
- 📍 Jl. Tuanku Tambusai, Bagan Besar - Dumai
- 🌐 dinkes.dumaikota.go.id



WALIKOTA DUMAI

WALI KOTA KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Dumai Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 7 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2025 Nomor 8 Seri D);
14. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 13 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA DUMAI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Wali Kota Dumai ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2025-2029.

6. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 3

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
 - e. BAB V : PENUTUP;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 18 September 2025

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
Pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025 NOMOR 33 SERI 0

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan setiap tahunnya (dari tahun 2025 sampai dengan 2029) di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Dumai.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029 berisikan rencana program dan kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat Kota Dumai serta memenuhi harapan warga Kota Dumai dalam terwujudnya "**Dumai Kota IDAMAN**". Harapan kami adalah pembangunan kesehatan menjadi tanggungjawab bersama seluruh komponen masyarakat Kota Dumai dan mengajak semua pemangku kepentingan secara bersama-sama berbuat untuk membenahi dan menyejahterakan warga Kota Dumai secara lahir dan batin. Dengan bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas Insya Allah kita dapat wujudkan cita-cita dan realisasikan Visi – Misi Pemerintah Kota Dumai.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya sehingga tersusunnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029, kami mengucapkan terimakasih.

Dumai, 18 September 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Dumai


dr. SYAIFUL, M.KM
Pembina Utama Muda
NIP 197107242001121004

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	vi
Daftar Gambar	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN	9
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan.....	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kesehatan.....	9
2.1.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan	41
2.1.3 Kinerja Pelayanan	72
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan.....	118
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan	118
2.2.2 Isu Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai.....	128
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	132
3.1. Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025- 2029.....	132
3.2. Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029.....	133
3.3. Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029.....	137
3.4. Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029.....	137
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KESEHATAN	140
4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	140
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	240
BAB V. PENUTUP	246
Lampiran	

Daftar Tabel

Tabel	2.1	Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk di Kota Dumai dari Tahun 2020 s/d 2024	44
Tabel	2.2	Daftar Rumah Sakit Se Kota Dumai Tahun 2024	45
Tabel	2.3	Cakupan Puskesmas Per Kecamatan di Kota Dumai dari Tahun 2020 s/d 2024	46
Tabel	2.4	Rasio Puskesmas Per 1.000 Penduduk di Kota Dumai dari Tahun 2020 s/d 2024	46
Tabel	2.5	Daftar Puskesmas Se Kota Dumai Tahun 2024	47
Tabel	2.6	Cakupan Puskesmas Pembantu Per Kelurahan di Kota Dumai dari Tahun 2020 s/d 2024	49
Tabel	2.7	Daftar Puskesmas Pembantu Se Kota Dumai Tahun 2024	50
Tabel	2.8	Perincian Penyebaran Puskesmas Keliling Se Kota Dumai Tahun 2024	51
Tabel	2.9	Perincian Penyebaran Ambulans Se Kota Dumai Tahun 2024	52
Tabel	2.10	Perincian Penyebaran Sepeda Motor Se Kota Dumai Tahun 2024	53
Tabel	2.11	Perincian Penyebaran Poskeskel Se Kota Dumai Tahun 2024	56
Tabel	2.12	Jumlah Posyandu Balita Menurut Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2024	57
Tabel	2.13	Jumlah Posyandu Usila Menurut Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2024	58
Tabel	2.14	Jumlah Polindes di Kota Dumai Tahun 2024	58
Tabel	2.15	Jumlah Posbindu Menurut Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2024	60
Tabel	2.16	Data Penyebaran Sarana Pelayanan Kesehatan Lain, Sarana Produksi Dan Distribusi Kefarmasian Dan Optical di Kota Dumai Tahun 2024	62

Tabel	2.17	Daftar Rekapitulasi Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Sampah Medis (SW 100) Kota Dumai Tahun 2024	64
Tabel	2.18	Perincian Puskesmas yang memiliki Genset dan Sumur Bor Dalam Tahun 2024	65
Tabel	2.19	Gambaran Kelengkapan Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Di Puskesmas se Kota Dumai Tahun 2024 (Berdasarkan Data Aspak per April 2025)	66
Tabel	2.20	Rasio dan Jumlah Tenaga Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Dumai (RSUD dan Puskesmas) Per 100.000 Penduduk Berdasarkan Target Renstra dan Pencapaian Tahun 2024	71
Tabel	2.21	Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020-2024	72
Tabel	2.22	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020 s/d 2024	74
Tabel	2.23	Perkembangan Kasus Kematian Bayi di Kota Dumai Tahun 2020 - 2024	76
Tabel	2.24	Perkembangan Kasus Kematian Bayi di Kota Dumai Berdasarkan Kecamatan selama Tahun 2020 - 2024	76
Tabel	2.25	Perkembangan Kasus Kematian Balita di Kota Dumai Tahun 2020 - 2024	78
Tabel	2.26	Perkembangan Kasus Kematian Balita di Kota Dumai Berdasarkan Kecamatan selama Tahun 2020 - 2024	78
Tabel	2.27	Perkembangan Kasus Kematian Ibu di Kota Dumai Tahun 2020 - 2024	80
Tabel	2.28	Perkembangan Kasus Kematian Ibu di Kota Dumai Berdasarkan Kecamatan selama Tahun 2020 - 2024	81
Tabel	2.29	Umur Harapan Hidup (UHH) di Indonesia, Provinsi Riau dan Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2024	83
Tabel	2.30	Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Kepesertaan Kota Dumai Tahun 2020 - 2024	102

Tabel	2.31	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Dumai Tahun 2020 - 2024	103
Tabel	2.32	Perkembangan Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan dari Tahun 2020 – 2024 di dalam APBD Kota Dumai	117
Tabel	2.33	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kesehatan dari Tahun 2020 – 2024	118
Tabel	2.34	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kesehatan Kota Dumai	126
Tabel	3.35	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD	136
Tabel	3.36	Penahapan Renstra PD	137
Tabel	3.37	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	138
Tabel	3.38	Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029	139
Tabel	4.39	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Dumai Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025	141
Tabel	4.40	Program Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029	148
Tabel	4.41	Teknis Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029	153
Tabel	4.42	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029	180
Tabel	4.43	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029	239
Tabel	4.44	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029	240
Tabel	4.45	Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029	243
Tabel	4.46	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029	244

Daftar Grafik

Grafik	2.1	Persebaran Tenaga Kesehatan Menurut Jenis Tenaga di RSUD Kota Dumai dan Puskesmas se Kota Dumai Tahun 2024	68
Grafik	2.2	Perkembangan Kepadatan dan Distrubusi Tenaga Kesehatan Per 1000 penduduk di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah (RSUD Kota Dumai dan Puskesmas se Kota Dumai) Tahun 2020-2024	70
Grafik	2.3	Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2024	75
Grafik	2.4	Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2024	77
Grafik	2.5	Pencapaian Angka Kematian Ibu di Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2024	80
Grafik	2.6	Pencapaian Umur Harapan Hidup Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2024	82
Grafik	2.7	Pencapaian Angka Kesakitan Malaria (API) Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2024	84
Grafik	2.8	Perkembangan Kasus Malaria Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2020 – 2024	85
Grafik	2.9	Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2024	86
Grafik	2.10	Perkembangan Kasus TB Paru BTA + Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2020 – 2024	87
Grafik	2.11	Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2024	88
Grafik	2.12	Data Kumulatif Kasus HIV Kota Dumai Dari Tahun 2020 sampai dengan 2024	89
Grafik	2.13	Pencapaian Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue Kota Dumai Dari Tahun 2020 sampai dengan 2024	90
Grafik	2.14	Perkembangan Kasus Demam Berdarah Dengue Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2020 – 2024	91

Grafik	2.15	Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Buruk Kota Dumai Dari Tahun 2020 sampai dengan 2024	93
Grafik	2.16	Perkembangan Kasus Balita Dengan Gizi Buruk Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2020 – 2024	94
Grafik	2.17	Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Kurang Kota Dumai dari Tahun Tahun 2020 sampai dengan 2024	95
Grafik	2.18	Perkembangan Kasus Balita Dengan Gizi Kurang Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2020 – 2024	96
Grafik	2.19	Pencapaian Prevalensi Stunting Pada Balita Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2024	98
Grafik	2.20	Perkembangan Kasus Stunting Pada Balita per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2020 s/d 2024	98
Grafik	2.21	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Dumai Tahun Tahun 2020 sampai dengan 2024	101
Grafik	2.22	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K 4 Kota Dumai Tahun 2020 sampai dengan 2024	105
Grafik	2.23	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2024	106
Grafik	2.24	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Kota Dumai Dari Tahun 2020 sampai dengan 2024	107
Grafik	2.25	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Kota Dumai Dari Tahun 2020 sampai dengan 2024	108
Grafik	2.26	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar di Kota Dumai Dari Tahun 2020 sampai dengan 2024	109
Grafik	2.27	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Kota Dumai Tahun 2020 sampai dengan 2024	110
Grafik	2.28	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Kota Dumai Tahun 2020 sampai dengan 2024	111
Grafik	2.29	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Kota Dumai Tahun 2020 sampai dengan 2024	112
Grafik	2.30	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus Kota Dumai Tahun 2020 sampai dengan 2024	113

Grafik	2.31	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Kota Dumai Tahun 2020 sampai dengan 2024	114
Grafik	2.32	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis di Kota Dumai Tahun 2020 sampai dengan 2024	115
Grafik	2.33	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV di Kota Dumai Tahun 2020 sampai dengan 2024	116

Daftar Gambar

Gambar	2.1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Dumai	11
Gambar	2.2	Struktur Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A	22
Gambar	2.3	Struktur Organisasi UPT Instalasi Farmasi Kelas A	25
Gambar	2.4	Struktur Organisasi UPT Puskesmas	27
Gambar	2.5	Struktur Organisasi UPT RSUD Kota Dumai	30
Gambar	4.6	Cascading Pemerintah Kota Dumai dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029	146



B A B I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Pembangunan kesehatan di Kota Dumai bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, dengan ditandai oleh penduduknya yang berperilaku hidup bersih dan sehat dan hidup dalam lingkungan yang sehat, serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata di seluruh wilayah Kota Dumai. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan pembangunan kesehatan baik oleh pemerintah kota, masyarakat, maupun swasta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Menengah (RPJM) baik tingkat Nasional maupun Daerah (Provinsi dan Kabupaten Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Mengacu pada Pasal 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam merencanakan program dan kegiatan setiap tahunnya yang menyentuh kebutuhan masyarakat Dumai. Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai merupakan dokumen perencanaan yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang bersifat indikatif dan akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025–2029.

Lebih lanjut, mengacu pada pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029 melalui tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan Perubahan; dan f. penetapan.

Dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029 ini acuan utama yang digunakan adalah arah pembangunan kesehatan dalam Visi Misi Presiden 2025-2029 (Misi ke 4 dari 8 Misi Asta Cita), Visi Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 “**Masyarakat Yang Sehat dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045**”, rumusan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Riau dalam Rancangan Awal RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 “**Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju**” dengan misi terkait urusan kesehatan yakni Misi 1 dari 7

misi, serta rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Walikota/Wakil Walikota Dumai periode Tahun 2025–2029. Adapun visi Walikota/Wakil Walikota Dumai adalah: ***“Kota Industri Yang Unggul, Sejahtera Dan Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu Tahun 2029”*** dengan misi terkait kesehatan yakni **Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Yang Berdaya Saing.**

Hubungan Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan secara vertikal bahwa Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai disusun berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RPJPN Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025–2029, RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029, RPJPD Kota Dumai Tahun 2025–2045, RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029, dan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan RI. Kemudian secara horizontal Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai berperan sangat penting dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan Perangkat Daerah. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dokumen renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Dokumen Renstra ini dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara dan telah mendapat pengesahan dari DPRD. Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029 juga memperhatikan rekomendasi dari KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029 ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai rujukan yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Koedifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045;

20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E)
21. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 7 Seri E)
23. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2025 Nomor 8 Seri D)
24. Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D)
25. Peraturan Walikota Dumai Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum daerah pada Dinas Kesehatan Kota Dumai;
26. Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 3 Seri D)
27. Draft Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah menyediakan dokumen pembangunan Dinas Kesehatan Kota Dumai untuk periode tahun 2025-2029 yang sudah selaras dengan kebijakan Nasional sehingga dapat dijadikan pedoman bagi seluruh personil organisasi Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan serta memberikan arah pada penyelenggaraan program-program kesehatan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kota Dumai selama tahun 2025-2029. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai ini adalah untuk:

1. Menyediakan data performance dan analisis kinerja pembangunan Dinas Kesehatan 5 tahun yang lalu
2. Memberikan gambaran permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah tahun 2025-2029 serta memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan masyarakat Dumai seutuhnya dengan menyelaraskan permasalahan kesehatan di tingkat regional, nasional maupun lokal area, berdasarkan isu strategis, program strategis, kerangka pendanaan, dan indikator kinerja
3. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Walikota dan Wakil Walikota Dumai ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Dumai yang terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun 2025-2029.
4. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam tahun 2025-2029 agar terwujud konsistensi antara perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kota Dumai dengan perencanaan pembangunan tahunan Dinas Kesehatan Kota Dumai.
5. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan baik bagi internal Dinas Kesehatan Kota Dumai sendiri, DPRD Kota Dumai, maupun lembaga/badan pengawas pembangunan dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kota Dumai.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

Bab ini menjelaskan gambaran pelayanan Dinas Kesehatan yang meliputi tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, hasil evaluasi capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai tahun 2020-2024, permasalahan dan isu strategis Dinas Kesehatan

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

Bab ini menjelaskan tentang tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KESEHATAN

Bab ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan kesehatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029

BAB V. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kesehatan

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai terbaru ditetapkan melalui Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2023. Mengacu pada peraturan tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

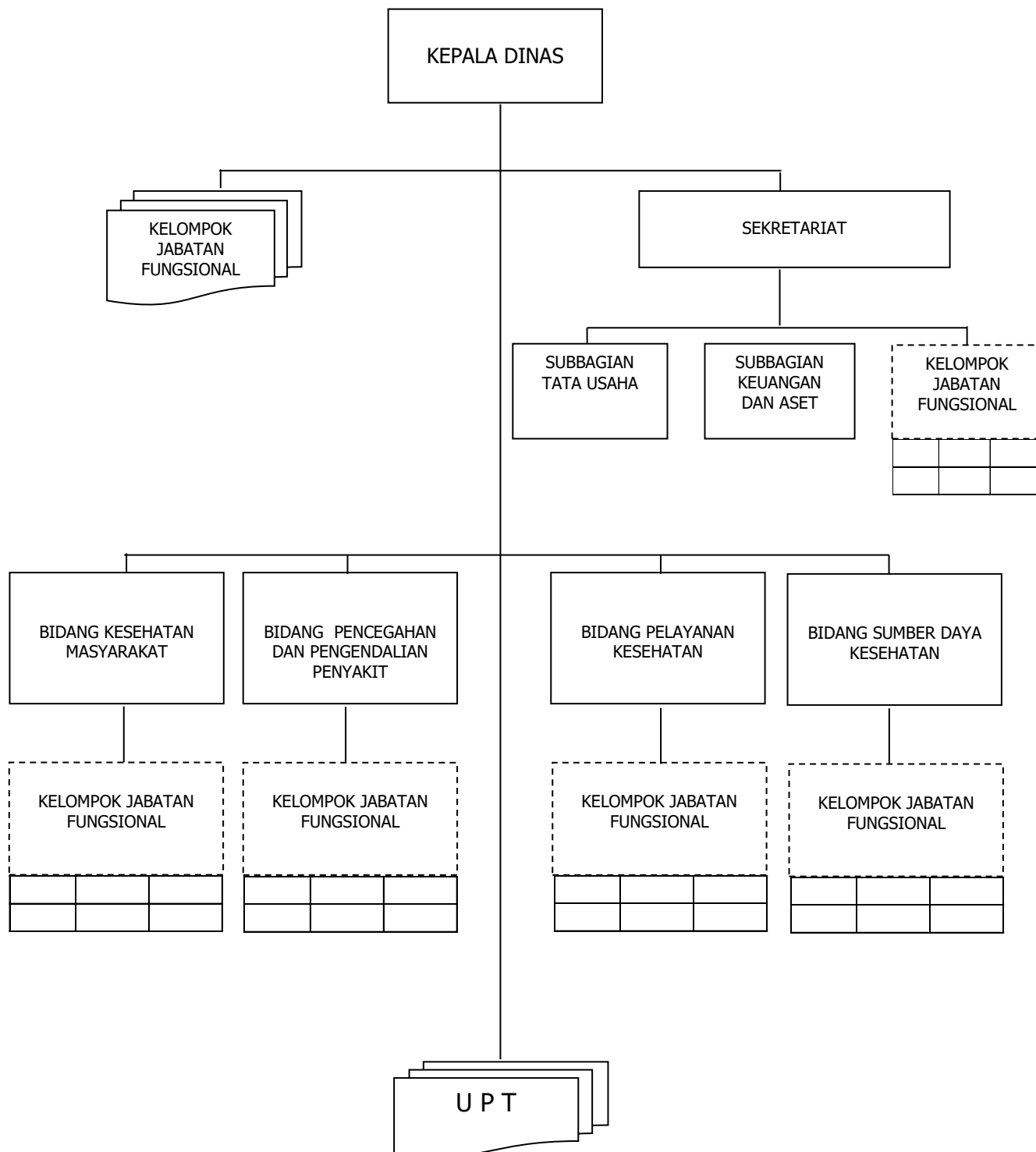
1. Perumusan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Dumai dan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2023, Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 52 Tahun 2022 yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 1. Subbagian Tata Usaha
 2. Subbagian Keuangan dan Aset
 3. Kelompok Jabatan Fungsional

- c. Bidang Kesehatan Masyarakat
Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan
Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan
Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
 - a. UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A
 - b. UPT Instalasi Farmasi Kelas A
 - c. UPT Puskesmas
 - d. UPT RSUD Kota Dumai

Gambar 2.1 Struktur Organisasi
Dinas Kesehatan Kota Dumai
(Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2023)



Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2023, uraian tugas Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas nya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional. Uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundang-undangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;

- c. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana/program dan kegiatan jangka panjang, menengah, pendek berupa rencana strategi organisasi, serta bahan pemantauan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan penyelenggaraan program dan pencapaian akuntabilitas kinerja;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah; dan
- h. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan;
- b. Pengoordinasian dan menyusun rencana dan kegiatan jangka panjang, menengah, pendek berupa rencana strategi organisasi, serta bahan pemantauan, pengawasan dan pengendalian program, program, evaluasi, pelaporan dan anggaran Dinas;
- c. Pelaksanaan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk, pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan rencana program, evaluasi, pelaporan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan penyelenggaraan program dan pencapaian akuntabilitas kinerja;
- d. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;;
- e. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;

- g. Penataan organisasi dan tata laksana;
- h. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah; dan
- j. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

1) Subbagian Tata Usaha

Uraian tugas Subbagian Tata Usaha sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- b. Melakukan kegiatan pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan yang berhubungan dengan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- c. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. Mengoordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dibidang organisasi dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis jabatan;
- g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan surat menyurat/naskah dinas dan kearsipan;
- h. Menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan masyarakat dan protokol; dan

- i. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya

2) Subbagian Keuangan dan Aset

Uraian tugas Subbagian Keuangan dan Aset sebagai berikut :

- a. Menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan daerah serta sarana program;
- b. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis berkaitan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan daerah serta sarana program;
- c. Menyiapkan bahan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana;
- d. Menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan bahan perlengkapan rumah tangga;
- e. Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan daerah serta sarana program; dan
- h. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan program kesehatan keluarga dan gizi, program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dan program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- b. Menyelenggarakan program kesehatan keluarga dan gizi, program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dan program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- c. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi program kesehatan keluarga dan gizi, program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dan program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kesehatan keluarga dan gizi, program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dan program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
- e. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan perencanaan dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan

- f. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

4. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan haji, kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza). Dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan program surveilans dan imunisasi, program pengendalian penyakit menular, dan program pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan haji, kesehatan jiwa dan napza;
- b. Menyelenggarakan program surveilans dan imunisasi, program pengendalian penyakit menular, dan program pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan haji, kesehatan jiwa dan napza;
- c. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi program surveilans dan imunisasi, program pengendalian penyakit menular, dan program penyakit tidak menular, kesehatan haji, kesehatan jiwa dan napza;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program Surveilans dan Imunisasi, program pengendalian penyakit menular, dan program pengendalian penyakit menular program pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan haji, kesehatan jiwa dan napza; dan
- e. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan perencanaan dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan haji, kesehatan jiwa dan napza;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan

- pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan haji, kesehatan jiwa dan napza;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan haji, kesehatan jiwa dan napza;
 - d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan haji, kesehatan jiwa dan napza;
 - e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan haji, kesehatan jiwa dan napza; dan
 - f. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

5. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pembiayaan dan jaminan kesehatan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan program pelayanan kesehatan primer, peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional, program pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan, dan program pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- b. Menyelenggarakan program pelayanan kesehatan primer, peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional, program pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan, dan program pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- c. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi program pelayanan kesehatan primer, peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer dan

kesehatan tradisional, dan program pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan;

- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengendalian penyakit menular program pelayanan kesehatan primer, peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional, program pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan, dan program pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- e. Melaksanakan update dan validasi data kepesertaan program pembiayaan dan jaminan kesehatan; dan
- f. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan perencanaan dibidang pelayanan kesehatan primer, kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu rujukan dan pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer, kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu rujukan dan pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer, kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu rujukan dan pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan kesehatan primer, kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu rujukan dan pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- e. Pemantauan, evaluasi, pelaporan dan validasi data dibidang pelayanan kesehatan primer, kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu rujukan dan pembiayaan dan jaminan kesehatan; dan
- f. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesediaan

farmasi dan alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan program kesediaan farmasi dan alat kesehatan, program prasarana dan sarana, dan program pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- b. Melaksanakan pengelolaan perbekalan kesehatan yang meliputi obat-obatan dan alat kesehatan yang terkait dengan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian;
- c. Menyelenggarakan program prasarana dan sarana, dan program pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- d. Melaksanakan penyusunan sistem data dan informasi sumber daya manusia kesehatan serta pemetaan sumber daya manusia kesehatan;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan kefarmasian;
- f. Melaksanakan pengawasan dalam pengembangan sarana dan prasarana;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kefarmasian dan pemanfaatan alat kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana, dan pengembangan sumber daya kesehatan;
- h. Melaksanakan program pendidikan berkelanjutan dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya manusia kesehatan berdasarkan kebutuhan program di Dinas Kesehatan (tugas belajar) dan Program Pendidikan Dokter Spesialis-Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis-Berbasis Kompetensi (PPDS-PPDGS-BK);
- i. Melaksanakan kegiatan Program Internsip Dokter Indonesia;
- j. Melaksanakan kegiatan pemberian izin kerja dan rekomendasi izin praktek bagi Tenaga Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan inventarisasi dan penyiapan data sarana dan prasarana kesehatan;
- l. Melaksanakan kegiatan pemberian rekomendasi perizinan sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan
- m. Melaksanakan penyiapan laporan kebutuhan, ketersediaan farmasi dan pemakaian obat; dan

- n. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perencanaan kebijakan operasional dibidang ketersediaan farmasi dan alat kesehatan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia kesehatan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang ketersediaan farmasi dan alat kesehatan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia kesehatan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang ketersediaan farmasi dan alat kesehatan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia kesehatan;
- d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan farmasi dan alat kesehatan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia kesehatan;
- e. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan sistem data dan informasi dibidang ketersediaan farmasi dan alat kesehatan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia kesehatan;
- f. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi lintas program koordinasi, monitoring dan evaluasi lintas program dan lintas sektor dibidang ketersediaan farmasi dan alat kesehatan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia kesehatan;
- g. Penyiapan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, penyuluhan keamanan pangan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan dan minuman Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) termasuk pemberian rekomendasi izin produk;
- h. Penyiapan pelaksanaan kegiatan pemberian rekomendasi izin kerja dan praktek bagi Tenaga Kesehatan serta perizinan sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. Penyiapan pelaksanaan program pendidikan berkelanjutan dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya manusia kesehatan berdasarkan kebutuhan program di Dinas Kesehatan (tugas belajar) dan Program

Pendidikan Dokter Spesialis-Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis-Berbasis Kompetensi (PPDS-PPDGS-BK), serta kegiatan Program Internsip Dokter Indonesia; dan

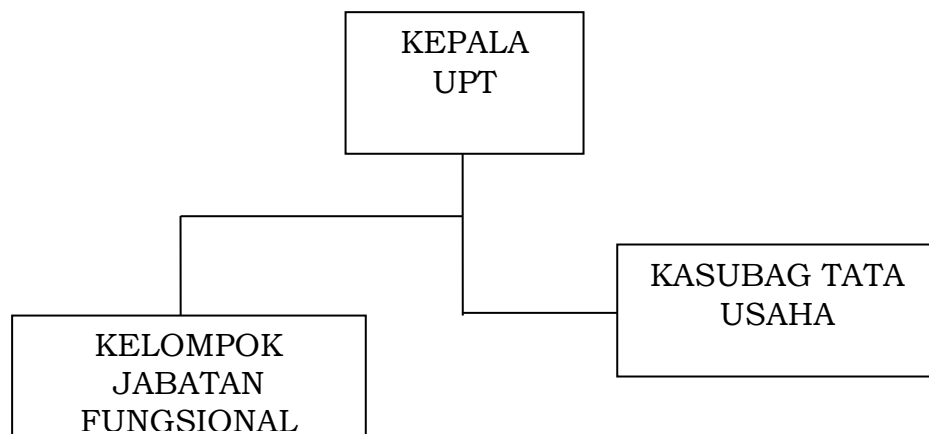
- j. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada Dinas Kesehatan Kota Dumai dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Dumai:

- a. **UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A** terdiri dari :

- 1). Struktur Organisasi



Gambar 2.2
Struktur Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A Kota Dumai

- 2). Tugas dan Fungsi

Merupakan sebuah UPT pada Dinas Kesehatan di Bidang Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air, bertugas sebagai penunjang penegakan

diagnose, menjadi pusat rujukan laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air di daerah.

UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyelenggaraan ketatausahaan, administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan monitoring evaluasi kegiatan operasional;
- b) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi teknis operasional pelayanan laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air;
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- d) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3). Uraian Tugas

a) Kepala UPT

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sesuai dengan lingkup bidang yang menjadi kewenangannya, dibantu oleh Kepala Subbagian Tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan yang meliputi administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian di lingkup UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A.

Menyelenggarakan fungsi:

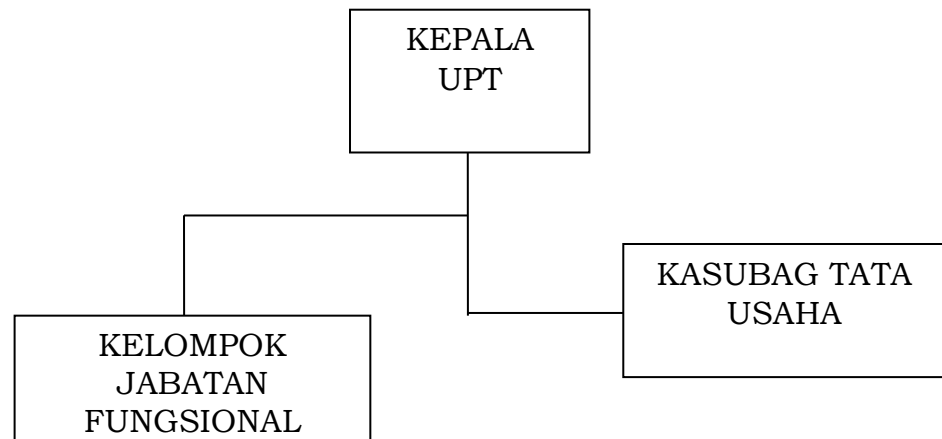
- (1) Penyusunan, persiapan dan pengkoordinasian rencana anggaran satuan kerja UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A;
- (2) Pembagian tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok;

- (3) Pemeriksaan hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - (4) Pengevaluasian kegiatan ketatausahaan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - (5) Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
 - (6) Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A;
 - (7) Penyelenggaraan urusan rumah tangga UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A;
 - (8) Pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A;
 - (9) Pembuat dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - (10) Penginventarisasian, pengidentifikasian dan penyiapan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; dan
 - (11) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT.
- c) Jabatan Fungsional
- (1) Mempunyai tugas membantu Kepala UPT berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu Kepala UPT sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.

b. UPT Instalasi Farmasi Kelas A terdiri dari :

1) Struktur Organisasi



Gambar 2.3
Struktur Organisasi UPT Instalasi Farmasi Kelas A
Kota Dumai

2) Tugas dan Fungsi

Melaksanakan tugas di Bidang Kesehatan, Pengelolaan Obat dan Perbekalan Obat meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan pelaporan dan monitoring evaluasi.

Menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyelenggaraan ketatausahaan, administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan monitoring evaluasi kegiatan operasional;
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi teknis operasional pelayanan instalasi farmasi;
- (3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan

- (4) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3) Uraian Tugas

a) Kepala UPT

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sesuai dengan lingkup bidang yang menjadi kewenangannya. dibantu oleh Kepala Subbagian Tata usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan lingkup UPT.

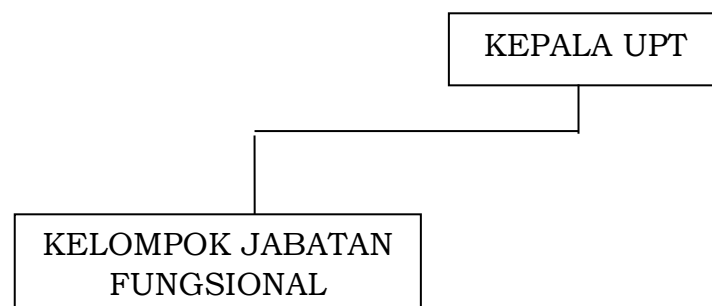
Menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyusunan, persiapan dan pengkoordinasian rencana anggaran UPT Instalasi Farmasi Kelas A;
- (2) Pembagian tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok;
- (3) Pemeriksaan hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- (4) Pengevaluasian kegiatan ketatausahaan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- (5) Pelaksanaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, dan perlengkapan di lingkungan UPT Instalasi Farmasi Kelas A;
- (6) Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPT Instalasi Farmasi Kelas A;
- (7) Penyelenggarakan urusan rumah tangga UPT Instalasi Farmasi Kelas A;
- (8) Pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPT Instalasi Farmasi Kelas A;

- (9) Pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - (10) Penginventarisasian, pengidentifikasian dan penyiapan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; dan
 - (11) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT.
- c) Jabatan Fungsional
- (1) Mempunyai tugas membantu Kepala UPT berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu Kepala UPT sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing;

c. **UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)** terdiri dari :

1) Struktur Organisasi



Gambar 2.4
Struktur Organisasi UPT PUSKESMAS
Se Kota Dumai

2) Tugas dan Fungsi

Tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan di Bidang Penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penyelenggara Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyelenggaraan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat;
- b) Penyelenggaraan ketatausahaan, administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan monitoring evaluasi kegiatan operasional;
- c) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi teknis operasional bidang kesehatan di wilayah kerjanya;
- d) Pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektor dalam pelaksanaan program upt pusat kesehatan masyarakat;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas kesehatan;
- f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3) Uraian Tugas

a) Kepala UPT

Tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan sesuai dengan lingkup bidang yang menjadi kewenangannya, dibantu Kelompok Jabatan Fungsional.

b) Jabatan Fungsional

- (1) Membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu kepala UPT sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.

d. UPT Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai

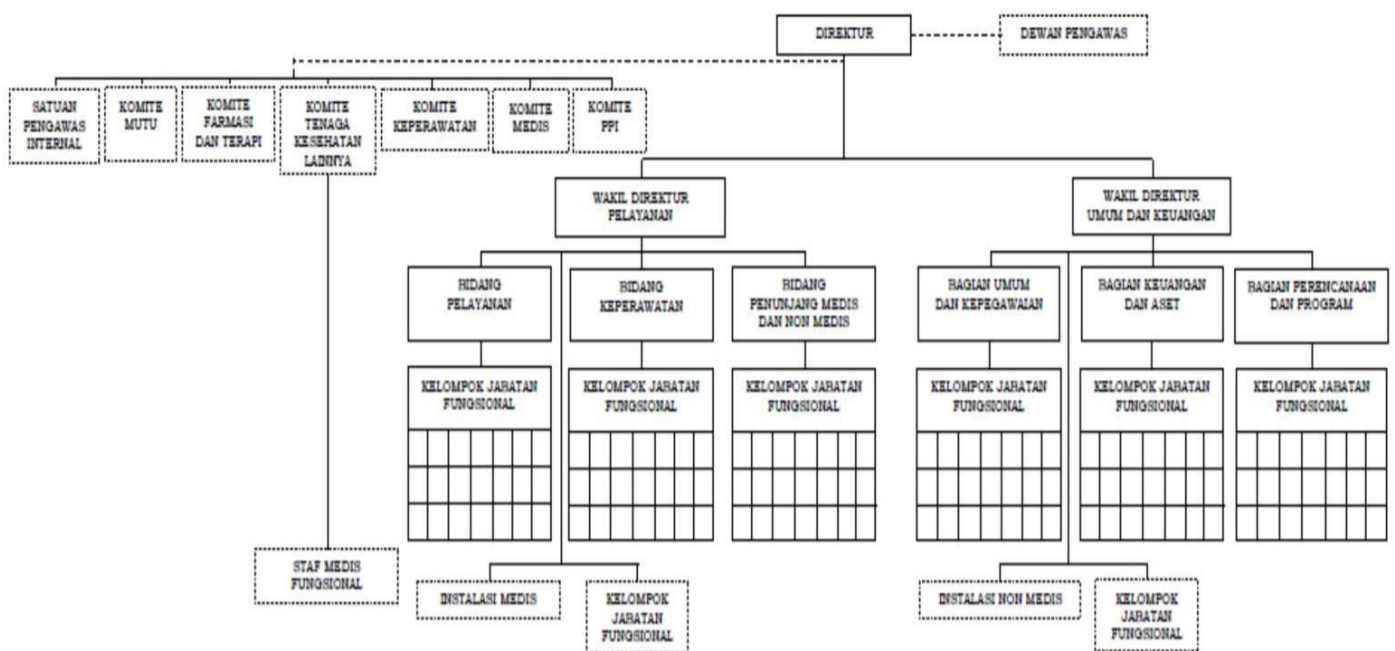
Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum daerah pada Dinas Kesehatan Kota Dumai, dinyatakan bahwa kedudukan RSUD Kota Dumai adalah sebagai Organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan Kota Dumai yang melaksanakan pelayanan Kesehatan. Rumah Sakit Umum daerah Kota Dumai di Pimpin oleh seorang direktur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Penyampaian Laporan penyampaian pelaksanaan keuangan dan Barang Milik daerah. RSUD Kota Dumai merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kota Dumai yang disertai wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Dumai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;

- e. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan;
- f. Pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI



Gambar 2.5
Struktur Organisasi UPT RSUD Kota Dumai

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 52 Tahun 2022, susunan organisasi RSUD terdiri dari:

A. Direktur

Direktur merupakan Pejabat pimpinan tinggi Pratama (eselon II.b) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan RSUD.

B. Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu dan menyelenggarakan sebagian tugas direktur untuk menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan

pengendalian serta bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Program dan Perencanaan.

1. Bagian Umum dan Kepegawaian

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pelayanan administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.

Uraian tugas Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan dan melaksanakan urusan surat yang masuk dan keluar, pengembalian, pengiriman, pencatatan, penarikan dan pengendalian serta penyusunan arsip;
- b. Menyiapkan dan mengatur penyediaan alat tulis kantor;
- c. Menyiapkan dan mengatur operator telepon, faximile serta pengemudi kendaraan dinas;
- d. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas, keamanan, kebersihan dan perawatan kantor, pengaturan penggunaan ruang rapat, rumah dinas, kendaraan dinas termasuk dokumen dan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
- e. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan RSUD;
- f. Melaksanakan bahan penyelenggaraan urusan keprotokolan dan humas;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan formasi pegawai, meliputi formasi kebutuhan, kenaikan pangkat, perbantuan/perpindahan wilayah pembayaran gaji;
- h. Menyiapkan bahan penyelesaian mutasi pegawai, meliputi peningkatan status, pengangkatan dalam pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijazah, peninjauan masa kerja, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pensiun;
- i. Melaksanakan pelayanan penyelesaian kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, askes, taspen, cuti, kenaikan gaji berkala, penyelesaian angka kredit jabatan fungsional dan pemberian penghargaan;

- j. Melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait dalam hal pengembangan sumber daya manusia;
- k. Melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia dengan melaksanakan pelatihan dan penelitian;
- l. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kinerja pegawai; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas nya Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan, administrasi dan pembinaan pegawai;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan, sarana prasarana dan rumah tangga;
- d. pelaksanaan evaluasi, pelaporan, hukum dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan publikasi dan pemasaran sosial; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

2. Bagian Keuangan Dan Aset

Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan program, penganggaran dan mobilisasi dana, membantu Direktur dalam kebijakan pengembangan RSUD, kegiatan perbendaharaan, verifikasi, manajemen dan analisis akuntansi.

Uraian tugas Bagian Keuangan Dan Aset adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja RSUD;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data keuangan untuk bahan penyusunan laporan pengelolaan keuangan;
- c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data aset untuk bahan penyusunan laporan pengelolaan keuangan;

- d. Menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - e. Melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah di lingkungan RSUD mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
 - f. Memproses usul pengangkatan atau pemberhentian bendaharawan di lingkup RSUD;
 - g. Menganalisis data bahan pendapatan dan pengeluaran anggaran keuangan;
 - h. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
 - i. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan pembayaran gaji pegawai;
 - j. Menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan; dan
 - k. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan atasan.
- Dalam melaksanakan tugas, Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi keuangan RSUD;
 - b. penyiapan draf penyusunan dan penetapan besaran jasa pelayanan atau remunerasi;
 - c. pelaksanaan mobilisasi keuangan RSUD;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan RSUD;
 - e. penyusunan laporan pokok keuangan (neraca, arus kas, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan);
 - f. pemberian masukan dan saran sebagai bahan pertimbangan atasan untuk perumusan kebijakan;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan keuangan RSUD; dan
 - h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan atasan.

3. Bagian Perencanaan Dan Program

Bagian Perencanaan dan Program melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dalam rangka penyusunan perencanaan program, penelitian dan pengembangan manajemen dan RSUD serta RM dan sistem informasi RSUD.

Uraian tugas Bagian Perencanaan Dan Program adalah sebagai berikut :

- a. menganalisis data bahan penyusunan anggaran keuangan;
- b. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pertanggung jawaban pembukuan;
- c. menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan dan pengembangan program kegiatan RSUD;
- d. melakukan koordinasi dengan lembaga formal dan non formal yang berkaitan dengan program kegiatan RSUD;
- e. menyusun perencanaan strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahunan;
- f. merencanakan dan menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang memuat rencana kegiatan, pendapatan, dan belanja;
- g. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- h. menyusun Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LkjIP), Laporan Keterangan Perangungjawaban (LKPJ), Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP);
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan RSUD;
- j. Menyusun dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD);
- k. melaksanakan pengumpulan data rutin dan program bagian penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagai dasar penyusunan rencana dan pengendalian program;
- l. mengolah, menganalisis dan menyajikan data rutin dan program bagian penyelenggaraan pelayanan kesehatan;

- m. menyusun data statistik program bagian penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- n. menyiapkan bahan dan koordinasi dalam rangka sinkronisasi, kesinergian dan pengendalian program bagian penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- o. menyusun rencana dan pelaksanaan program bagian penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- p. melaksanakan penyusunan profil RSUD;
- q. melaksanakan penyusunan rencana draf pola tarif tiap 5 (lima) tahun;
- r. melaksanakan sosialisasi visi dan misi RSUD;
- s. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) lingkup RSUD;
- t. melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja RSUD;
- u. menghimpun dan menyusun laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan RSUD;
- v. penyiapan dan pelaksanaan perencanaan kegiatan rekam dan Sistem Informasi Rumah Sakit, pencatatan dan pelaporan;
- w. penyiapan dan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi rekam dan Sistem Informasi RSUD, pencatatan dan pelaporan;
- x. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan rekam medis dan Sistem Informasi RSUD, pencatatan dan pelaporan;
- y. penyiapan dan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa, evaluasi, penyajian dan umpan balik data/informasi kegiatan upaya kesehatan di RSUD;
- z. melaksanakan kegiatan dokumentasi dan RM; dan
- aa. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perencanaan dan Program menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan anggaran RSUD;
- b. menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan dan pengembangan program kegiatan RSUD;

- c. melakukan koordinasi dengan lembaga formal dan non formal yang berkaitan dengan program kegiatan RSUD;
- d. menyusun perencanaan strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahunan;
- e. merencanakan dan menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang memuat rencana kegiatan, pendapatan, dan belanja;
- f. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- g. menyusun Lappran Kerja Instansi Pemerintah (LkjIP), Laporan Keterangan Perangungjawaban (LKPJ), Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP);
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan RSUD; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan.

C. Wakil Direktur Pelayanan.

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas membantu dan menyelenggarakan sebagian tugas direktur untuk menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan, keperawatan dan penunjang.

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

1. Bidang Pelayanan

Kepala Bidang Pelayanan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan pelayanan dan informasi medis serta penunjang medis sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan teknis pelayanan.

Uraian tugas Bidang Pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan promosi RSUD;
- b. mengatur kegiatan unit pelayanan medis dan tenaga medis;
- c. melakukan pembinaan terhadap tenaga medis baik unit rawat inap maupun rawat jalan dan instalasi pelayanan medis;

- d. memberikan petunjuk dan pelaksanaan medis dengan cara tertulis maupun lisan, agar tujuan pelayanan medis yang telah ditentukan dapat dicapai;
- e. mengatur kegiatan unit pelayanan medis dan tenaga medis;
- f. merencanakan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan pelayanan medis;
- g. merencanakan kegiatan tenaga medis berdasarkan jumlah, jenis mutu untuk mendukung pelayanan medis;
- h. melakukan pembinaan terhadap tenaga medis baik unit rawat inap maupun rawat jalan dan instalasi pelayanan medis;
- i. memberikan petunjuk dan pelaksanaan medis dengan cara tertulis maupun lisan, agar tujuan pelayanan medis yang telah ditentukan dapat dicapai; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan medis;
- b. pengkoordinasian semua kegiatan pelayanan medis;
- c. perencanaan kebutuhan tenaga medis berkoordinasi dengan substansi kepegawaian;
- d. mengkoordinasikan kebutuhan alat-alat medis yang berhubungan dengan pelayanan medis;
- e. perencanaan langkah-langkah kegiatan pelayanan medis;
- f. perencanaan dan melaksanakan pembinaan tenaga medis;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada direktur tentang langkah- langkah yang perlu diambil dalam bagian tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

2. Bidang Keperawatan

Bidang Keperawatan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua pelaksana dan pengawasan asuhan, etika pelayanan keperawatan serta mutu keperawatan.

Uraian tugas Bidang Keperawatan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun standar tenaga, fasilitas dan peralatan;
- b. menyusun alat penilaian, mutu pelayanan dan kinerja staf;
- c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap pelayanan sesuai dengan bagian tugasnya dan supervisi sesuai dengan bagian tugasnya;
- d. menyiapkan dan melaksanakan perencanaan kegiatan etika dan mutu keperawatan, kebutuhan tenaga keperawatan;
- e. menyiapkan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian etika dan mutu keperawatan, kebutuhan tenaga keperawatan;
- f. menyiapkan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi etika dan mutu keperawatan kebutuhan keperawatan;
- g. menyiapkan bahan bimbingan dan pembinaan terhadap etika dan mutu keperawatan, tenaga keperawatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan rencana kerja tahunan bagian perawatan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan tenaga dan prosedur tetap/Standar Operasional Prosedur pelayanan keperawatan;
- c. pelaksanaan sosialisasi standar-standar, prosedur tetap/Standar Operasional Prosedur asuhan keperawatan alat dan tenaga keperawatan;
- d. penyusunan alat penilaian, mutu pelayanan dan kinerja staf;
- e. pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap pelayanan sesuai dengan bagian tugasnya;
- f. pelaksanaan program mobilisasi dan retensi tenaga keperawatan;
- g. pelaksanaan supervisi sesuai dengan bagian tugasnya dan pengawasan dan penilaian pelayanan keperawatan sesuai dengan bagian tugasnya secara berkala dan berkesinambungan;
- h. pengadaan penilaian sumber daya (tenaga, fasilitas, alat dan dana) sesuai dengan tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Penunjang Medis dan Non Medis.

Bidang Penunjang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan penunjang medis dan non medis sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

Uraian tugas Bidang Penunjang Medis Dan Non Medis adalah sebagai berikut :

- a. menyusun kegiatan unit penunjang medis dan non medis;
- b. merencanakan kebutuhan penunjang medis dan non medis pada masing-masing unit pelayanan yang ada di RSUD;
- c. menyusun dan mengatur kegiatan pelayanan, pengendalian serta evaluasi kegiatan penunjang medis dan non medis pada masing-masing unit pelayanan;
- d. menyiapkan dan memberikan bahan pembinaan pada pelaksanaan penunjang medis dan non medis yang menjadi tanggung jawabnya di masing-masing unit pelayanan serta memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan;
- e. menyiapkan bahan informasi tentang rencana kebutuhan unit pelayanan medis dan non medis kepada atasan langsung berdasarkan hasil inventarisasi kebutuhan di masing-masing unit pelayanan;
- f. memberikan informasi tentang rencana kebutuhan unit pelayanan medis dan non medis kepada atasan langsung berdasarkan hasil inventarisasi kebutuhan di masing-masing unit pelayanan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penunjang Medis dan Non Medis menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penunjang medis dan non medis;
- b. pengkoordinasian semua kegiatan penunjang medis dan non medis;
- c. perencanaan kebutuhan tenaga penunjang medis dan non medis berkoordinasi dengan substansi kepegawaian;
- d. perencanaan kebutuhan alat-alat medis dan non medis;
- e. perencanaan langkah-langkah kegiatan penunjang medis dan non medis;

- f. perencanaan dan melaksanakan penunjang medis dan non medis; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D. Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas terdiri dari unsur pemilik rumah sakit, organisasi profesi, asosiasi perumahsakit dan tokoh masyarakat.

E. Instalasi

Merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional dirumah sakit yang dipimpin oleh seorang kepala instalasi yang diberi tanggung jawab dan wewenang dalam mengatur serta mengendalikan kegiatan pelayanan diinstalasi unit kerjanya.

F. Komite Medis

Merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari ketua- ketua staf medis fungsional yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun Standar Pelayanan Medis (SPM), memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional dan mengembangkan program pelayanan.

G. Komite Keperawatan

Komite keperawatan merupakan kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan yang mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan.

H. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Direktur berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

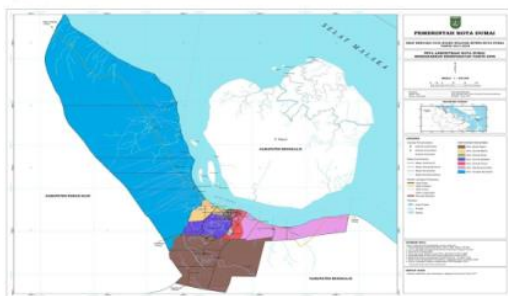
Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu Direktur sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing

2.1.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan

A. Gambaran Umum

Kota Dumai terletak di pesisir timur pulau Sumatra berhadapan dengan pulau Rupat dan Selat Malaka pada posisi antara 01°26'50" - 02°15'40" Lintang Utara dan 101°0'38" - 101°43'33" Bujur Timur. Sejajar pantai terdiri dari tanah rawa bergambut dengan kedalaman 0 – 0,5 meter dan beberapa kilometer kearah selatan terdapat dataran dengan kemiringan 0 – 3%. Hanya sebagian kecil merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan lereng antara 8-15%. Luas wilayah Kota Dumai keseluruhan 2.066,72 Km². Adapun batas wilayah:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat.
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis.
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batin Solapan Kabupaten Bengkalis.
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko, Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Rimba Melintang dan Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir.



Secara geografis letak Kota Dumai sangat strategis dimana posisinya sebagai gerbang propinsi Riau bagian utara yang memiliki aksesibilitas tinggi terhadap negara Malaysia dan Singapura.

Iklim di Kota Dumai adalah tropis basah

dengan curah hujan rata-rata antara 200-300 mm, dengan musim kemarau antara bulan Maret sampai dengan Agustus dan musim hujan antara bulan September sampai dengan Pebruari serta suhu udara rata-rata 22-34 °C.

Jenis tanah di Kota Dumai umumnya terdiri organosol humus dan podsolik merah kuning yang sesuai untuk bercocok tanam dan perkebunan. Beberapa sungai besar dan kecil terdapat di Kota Dumai yang dilalui oleh sampan dan perahu. Kondisi air tanah di Kota Dumai yang berasal dari tanah dangkal atau sumur gali dan sumur pompa dengan kedalaman rata-rata 1-2 m maupun air tanah dalam atau sumur bor, namun pada umumnya kurang baik.

Kota Dumai merupakan salah satu Kota di Propinsi Riau yang terbentuk tanggal 27 April 1999 yang sebelumnya berada dalam wilayah Kabupaten Bengkalis. Pembentukan Kota Dumai ini diatur dengan Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 1999 dengan perundangan dan penetapan dalam lembaran negara Nomor 50 tahun 1999. Menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah maka Kota Dumai menjadi wilayah otonomi dengan status Kota Dumai. Pada awal pembentukannya Kota Dumai terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Barat dan Kecamatan Bukit Kapur. Kemudian kecamatan di Kota Dumai bertambah sebanyak 2 kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang pembentukan kecamatan Sungai Sembilan dan Medang Kampai. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan Dumai Kota dan Kecamatan Dumai Selatan dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada organisasi perangkat daerah Kota Dumai, dengan demikian jumlah kecamatan di Kota Dumai menjadi 7 Kecamatan. Lebih lanjut sesuai Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelurahan Bagan Besar Timur Kecamatan Bukit Kapur, Kelurahan Bukit Kapur Kecamatan Bukit Kapur dan kelurahan Sungai Geniot Kecamatan Sungai Sembilan, maka ada pemekaran kelurahan dari 33 kelurahan menjadi 36 kelurahan dengan perincian sebagai berikut :

- Kecamatan Dumai Timur seluas 35,52 km² terdiri dari 5 kelurahan
- Kecamatan Dumai Barat seluas 36,16 km² terdiri dari 4 kelurahan
- Kecamatan Bukit Kapur seluas 339,26 km² terdiri dari 7 kelurahan.

- Kecamatan Sungai Sembilan seluas 1.420,92 km² terdiri dari 6 kelurahan
- Kecamatan Medang Kampai seluas 163,49 km² terdiri dari 4 kelurahan
- Kecamatan Dumai Kota seluas seluas 5,29 km² terdiri dari 5 kelurahan
- Kecamatan Dumai Selatan seluas 66,08 km² terdiri dari 5 kelurahan

Pada tahun 2024, berdasarkan Data Agregat Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, jumlah penduduk Kota Dumai sebanyak 343.597 jiwa, dengan jumlah rumah tangga/KK sebesar 103.964 KK, rata-rata jiwa per rumah tangga sebesar 4 jiwa dan kepadatan penduduk per km² sebesar 166,25 jiwa. Persebaran penduduk di Kota Dumai tidak merata, dimana Kecamatan Dumai Kota merupakan kecamatan terpadat yang merupakan pusat kota dengan kepadatan 7.895,65 jiwa per km². Sementara Kecamatan Sungai Sembilan merupakan kecamatan yang penduduknya paling jarang yaitu 33,96 orang per km².

Penduduk Kota Dumai pada umumnya bekerja di perdagangan dan sektor jasa, juga industri dan pertanian/ perkebunan. Sebagai wilayah yang berdekatan dengan Malaysia dan Singapura, Dumai merupakan daerah transit dengan keragaman suku dan budaya penduduknya. Komposisi penduduk Kota Dumai yang dirinci menurut etnis menunjukkan bahwa suku melayu merupakan jumlah yang paling besar yaitu 32%, sedangkan sisanya merupakan suku jawa/sunda sebesar 22%, Tapanuli/Batak 13% dan suku lainnya 8%. Sedangkan persebaran penduduk Kota Dumai menurut agama menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Dumai (84,86%).

B. Sarana Kesehatan

Sejak berdirinya Kota Dumai pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2024 telah terjadi peningkatan jumlah sarana pelayanan kesehatan di Kota Dumai, baik itu rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, dan puskesmas keliling serta sarana Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Posbindu, Pos Kesehatan Desa/Kelurahan (Poskesdes), dan Polindes. Hal tersebut menunjukan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit sudah meningkat. Diharapkan dengan meningkatnya jumlah sarana

pelayanan kesehatan tersebut sebagian besar masyarakat akan memanfaatkannya secara optimal.

Namun akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh Kota Dumai terutama di beberapa daerah terpencil atau sulit dijangkau yang berada di Kecamatan Bukit Kapur, Medang Kampai, dan Sungai Sembilan, karena kondisi geografis yang sulit dan masih terbatasnya transportasi dan infrastruktur.

Jumlah sarana kesehatan dan rasionya terhadap jumlah penduduk sebagai berikut :

1. Rumah Sakit

Pada tahun 2024 jumlah rumah sakit yang ada di Kota Dumai sebanyak 6 rumah sakit yang terdiri dari 1 rumah sakit milik pemerintah Kota Dumai tipe B yakni RSUD Kota Dumai, 1 rumah sakit milik BUMN tipe D yakni RS Pertamina, 1 rumah sakit milik TNI/POLRI yakni RS Bhayangkara dan 3 rumah sakit swasta. Total jumlah tempat tidur rumah sakit sebesar 721 yang terdiri dari RSUD Kota Dumai sebanyak 309 tempat tidur, RS Pertamina sebanyak 74 tempat tidur, RS Bhayangkara sebanyak 50 tempat tidur, RS Graha Yasmine sebanyak 50 tempat tidur, RS Awal Bross sebanyak 130 tempat tidur dan RS Naray sebanyak 108 tempat tidur (mulai operasional pada akhir Mei 2024). Pada tahun 2024 rasio jumlah rumah sakit per 1.000 penduduk adalah 0,017. Hal ini berarti setiap 57,266 penduduk dilayani oleh 1 rumah sakit.

Tabel 2.1
Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk di Kota Dumai
dari Tahun 2020 s/d 2024

Tahun	Jumlah Penduduk Kota Dumai	Jumlah Rumah Sakit	Rasio Rumah Sakit Per 1.000 penduduk
2020	314.166	3	0,010
2021	321.238	3	0,009
2022	328.378	4	0,012
2023	335.303	5	0,015
2024	343.597	6	0,017

Selama periode tahun 2020-2024 perkembangan rasio rumah sakit per 1.000 penduduk mengalami peningkatan dari 0,010 pada tahun 2020 menjadi 0,017 pada tahun 2024.

Tabel 2.2
Daftar Rumah Sakit Se Kota Dumai Tahun 2024

NO	RUMAH SAKIT	JUMLAH TEMPAT TIDUR	KEPEMILIKAN	NAMA DIREKTUR	STATUS RUMAH SAKIT
1.	RSUD Kota Dumai Jl. Tanjung Jati No.4 Dumai	309	RS Pemerintah	drg. Ridhonaldi	Terakreditasi Paripurna
2.	RSU Pertamina Dumai Jl. Raya Bukit Datuk Dumai	74	RS BUMN	dr. Indra Darna	Terakreditasi Paripurna
3.	RS Bhayangkara Jl. Hang Tuah No. 01 Dumai	50	RS TNI/POLRI	dr. Nia Kurnia	Terakreditasi Paripurna
4.	RS Graha Yasmine Jl. Marlan Jaya Dumai	50	RS Swasta	dr. Husni Widyawati	Terakreditasi Paripurna
5.	RS. Awal Bross Jl. Sudirman Dumai	130	RS Swasta	dr. Vandra Yovano, MARS	Terakreditasi Paripurna
6.	RS Naray Jl. Dr. Wahidin No 98- 99 Kelurahan Purnama	108	RS Swasta	dr. Christ Hally Santoso, MARS	Terakreditasi Paripurna

Dari tabel di atas terlihat pada tahun 2024 seluruh rumah sakit (6 rumah sakit) di Kota Dumai telah terakreditasi paripurna.

2. Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Pada awal berdirinya Kota Dumai jumlah puskesmas yang ada sebanyak 3 (tiga) buah dan merupakan hibah dari Kabupaten Bengkalis yakni Puskesmas Dumai Timur (sekarang bernama Puskesmas Dumai Kota), Puskesmas Dumai Barat dan Puskesmas Bukit Kapur. Dari tahun ke tahun jumlah puskesmas yang ada terus berkembang dan pada saat ini jumlah puskesmas yang ada di Kota Dumai sebanyak 10 buah. Pada umumnya pembangunan puskesmas-puskesmas di Kota Dumai menggunakan anggaran bersumber non APBD Kota Dumai seperti dana Budget Sharing Propinsi Riau, Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Riau, dana APBN (DAK Kesehatan) dan dana bantuan luar negeri (DHS ADB).

Saat ini puskesmas yang operasional di Kota Dumai terdiri dari 7 puskesmas non rawat inap dan 3 puskesmas rawat inap. Puskesmas non rawat inap terdiri dari Puskesmas Dumai Kota, Puskesmas Dumai Barat, Puskesmas Bumi Ayu, Puskesmas Bukit Timah, Puskesmas Jaya Mukti, Puskesmas Purnama dan Puskesmas Bukit Kayu Kapur. Sedangkan puskesmas rawat inap terdiri dari Puskesmas Bukit Kapur, Puskesmas Sungai Sembilan dan Puskesmas Medang Kampai. Guna meningkatkan penampilan puskesmas, setiap bangunan puskesmas yang mengalami kerusakan secara bertahap direhabilitasi atau direnovasi. Perkembangan cakupan puskesmas per kecamatan dari tahun 2020 s/d 2024 cenderung statis. Hal tersebut dikarenakan jumlah puskesmas tetap demikian juga jumlah kecamatan. Pada tahun 2024 cakupan puskesmas per kecamatan adalah 142,86.

Tabel 2.3
Cakupan Puskesmas Per Kecamatan di Kota Dumai
dari Tahun 2020 s/d 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah puskesmas	10	10	10	10	10
Jumlah kecamatan	7	7	7	7	7
Cakupan puskesmas per kecamatan	142,86	142,86	142,86	142,86	142,86

Sedangkan perkembangan rasio jumlah puskesmas per 1.000 penduduk dari tahun 2020 s/d 2024 cenderung menurun. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk bertambah namun jumlah puskesmas tetap. Pada tahun 2024 rasio jumlah puskesmas per 1.000 penduduk adalah 0,029. Ini berarti setiap 34.360 penduduk dilayani oleh 1 puskesmas.

Tabel 2.4 Rasio Puskesmas Per 1.000 Penduduk di Kota Dumai
dari Tahun 2020 s/d 2024

Tahun	Jumlah Penduduk Kota Dumai	Jumlah Puskesmas	Rasio Puskesmas Per 1.000 penduduk
2020	314.166	10	0,032
2021	321.238	10	0,031
2022	328.378	10	0,030
2023	335.303	10	0,030
2024	343.597	10	0,029

Tabel 2.5 Daftar Puskesmas Se Kota Dumai Tahun 2024

NO	NAMA PUSKESMAS	ALAMAT PUSKESMAS	KECAMATAN	WILAYAH KERJA KELURAHAN	STATUS PUSKESMAS	KODE PUSKESMAS	KOORDINAT	
							LINTANG (LATITUDE)	BUJUR (LONGITUDE)
1	Bukit Kapur 	Jl. Soekarno Hatta Km. 17 Kel. Bagan besar Telp (0765) 440024	Bukit Kapur	1. Bukit Nenas 2. Bagan Besar 3. Bagan Besar Timur	Rawat Inap Akreditasi Paripurna	147200200001	1.858477	101.393907
2	Bukit Kayu Kapur 	Jl. Soekarno Hatta Km 27,5 Kelurahan Bukit Kayu kapur	Bukit Kapur	1. Bukit Kayu Kapur 2. Gurun Panjang 3. Kampung Baru 4. Bukit Kapur	Non Rawat Inap Akreditasi Utama	147200200002	1.4936580	101.349311
3	Medang Kampai 	Jl. Mesjid Kel Teluk Makmur Telp (0765) 7007825	Medang Kampai	1. Mundam 2. Teluk Makmur 3. Guntung 4. Pelintung	Rawat Inap Akreditasi Paripurna	147200200003	1.638925	101.53926
4	Sungai Sembilan 	Jl. Raya Dumai-Basilam Baru Km.14 Kel Lubuk Gaung Telp (0765) 7007675	Sungai Sembilan	1. Bangsal Aceh 2. Lubuk Gaung 3. Tj. Penyembal 4. Basilam Baru 5. Batu Teritip 6. Sungai Geniot	Rawat Inap Akreditasi Paripurna	147200200004	1.7610900	101.35426
5	Dumai Barat 	Jl. M.H. Thamrin Kel. Pangkalan Sesai Telp (0765) 32538	Dumai Barat	1. Pangkalan Sesai 2. Simpang Tetap Darul Ikhsan	Non Rawat Inap Akreditasi Paripurna	147200200005	1.6762780	101.423523
6	Purnama 	Jl. Raja Ali Haji No. 22 Kel. Purnama Telp (0765) 439930	Dumai Barat	1. Purnama 2. Bagan Keladi	Non Rawat Inap Akreditasi Paripurna	147200200006	1.7019980	101.395206
7	Bukit Timah 	Jl. Gatot Subroto Km 8 Kel. Mekar Sari Telp (0765) 7007415	Dumai Selatan	1. Bukit Timah 2. Mekar Sari	Non Rawat Inap Akreditasi Utama	147200200007	1.6139400	101.37950
8	Bumi Ayu 	Jl. Budi Utomo, Kel Bumi Ayu Telp (0765) 7007287	Dumai Selatan	1. Bumi Ayu 2. Ratu Sima 3. Bukit Datuk	Non Rawat Inap Akreditasi Utama	147200200008	1.6541700	101.43571
9	Jaya Mukti 	Jl. K.H. Nasution, Kel Jaya Mukti Telp (0765) 439956	Dumai Timur	1. Jaya Mukti 2. Tanjung Palas 3. Bukit Batrem 4. Teluk Binjai 5. Buluh Kasap	Non Rawat Inap Akreditasi Paripurna	147200200009	1.6613310	101.462505
10	Dumai Kota 	Jl. Datuk laksamana, Kel Dumai Kota Telp (0765) 439947	Dumai Kota	1. Dumai kota 2. Sukajadi 3. Laksamana 4. Rimba Sekampung 5. Bintan	Non Rawat Inap Akreditasi Utama	147200200010	1.6839020	101.441724

Dari tabel di atas terlihat, dari 10 puskesmas hanya 6 puskesmas atau sebesar 60% yang telah terakreditasi paripurna. Puskesmas yang belum terakreditasi paripurna adalah Puskesmas Bukit Kayu Kapur, Puskesmas Bukit Timah, Puskesmas Bumi Ayu dan Puskesmas Dumai Kota.

Sampai dengan tahun 2024 telah dilaksanakan beberapa relokasi pembangunan puskesmas karena belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat khususnya pasal 11 tentang persyaratan lokasi yang salah satunya aksesibilitas untuk jalur transportasi seperti Puskesmas Purnama pada tahun 2018 dan puskesmas Bukit Timah pada tahun 2019. Beberapa puskesmas dilakukan pembangunan baru pada kondisi existing dengan mengacu pada standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat seperti Puskesmas Bukit Kapur pada tahun 2019, Puskesmas Medang Kampai dan Puskesmas Sungai Sembilan pada tahun 2020, serta Puskesmas Dumai Barat pada tahun 2021. Rancangan bangunan puskesmas tersebut sudah mengacu pada prototype bangunan puskesmas perbatasan yang dirancang oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada tahun 2023 dilakukan relokasi pembangunan puskesmas Bukit Kayu Kapur bersumber APBD Kota Dumai. Akan tetapi karena keterbatasan anggaran yang tersedia, puskesmas Bukit Kayu Kapur tersebut baru bisa operasional pada tahun 2025 karena pekerjaan pembangunannya baru selesai pada tahun 2024.

Namun demikian, beberapa persyaratan puskesmas lainnya sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, belum semuanya dimiliki oleh seluruh puskesmas, seperti masih ada puskesmas yang belum memiliki lahan parkir, belum memiliki pagar, belum memiliki IPAL, belum memiliki sarana air bersih (sumur bor dalam), dan belum memiliki rumah dinas tenaga kesehatan. Hal tersebut dikarenakan kondisi lahan puskesmas yang terbatas dan keterbatasan anggaran.

3. Puskesmas Pembantu

Dalam rangka mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas salah satunya puskesmas pembantu. Puskesmas pembantu berfungsi meluaskan jangkauan pelayanan puskesmas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pada awal berdirinya Kota Dumai jumlah puskesmas pembantu yang ada sebanyak 10 (sepuluh) buah. Dalam perjalanannya ada 4 puskesmas pembantu yang beralih fungsi menjadi Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) yakni Puskesmas Pembantu Mekarsari menjadi Poskeskel Mekarsari, Puskesmas Pembantu Simpang Siak menjadi Poskeskel Kampung Baru, Puskesmas Pembantu Selinsing menjadi Poskeskel Guntung dan Puskesmas Pembantu Rimba Sekampung menjadi Poskeskel Rimba Sekampung. Sampai dengan tahun 2024 jumlah puskesmas pembantu sebanyak 12 buah. Puskesmas pembantu tersebar di 4 (empat) wilayah kerja puskesmas. Guna meningkatkan penampilan puskesmas pembantu, setiap bangunan puskesmas pembantu yang mengalami kerusakan secara bertahap direhabilitasi atau direnovasi.

Perkembangan cakupan puskesmas pembantu per kelurahan dari tahun 2020 s/d 2024 menunjukkan kecenderungan statis. Hal tersebut dikarenakan jumlah kelurahan tetap demikian juga jumlah puskesmas pembantu. Pada tahun 2024 cakupan puskesmas pembantu per kelurahan adalah 33,33.

Tabel 2.6 Cakupan puskesmas pembantu per kelurahan di Kota Dumai dari Tahun 2020 s/d 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah puskesmas pembantu	13	12	12	12	12
Jumlah kelurahan	33	36	36	36	36
Cakupan puskesmas pembantu per kelurahan	39,39	33,33	33,33	33,33	33,33

Tabel 2.7 Daftar Puskesmas Pembantu Se Kota Dumai Tahun 2024

No	Kecamatan	Wilayah Kerja Puskesmas	Nama Puskesmas Pembantu	
1.	Dumai Barat	Purnama	1. Parit Pisang Mas	Jl. Harapan RT 08 Kelurahan Bagan Keladi
2.	Bukit Kapur	Bukit Kayu Kapur	2. Gurun Panjang	Jl. Merpati Rt 02 Kelurahan Gurun Panjang
			3. Kampung Baru/ Simpang Siak	Jl. Utama Rt 06 Kelurahan Kampung Baru
3.	Sungai Sembilan	Sungai Sembilan	4. Suka Damai	Jl. Sekolah Rt 08 No.107 Kelurahan Bangsal Aceh
			5. Kampung Sejati	Jl. Raya Dumai –Medan Kelurahan Bangsal Aceh
			6. Basilam Baru	Jl. KH. Baliyan Rt 02 No. 12 Kelurahan Basilam Baru
			7. Sungai Teras	Jl. Sungai Teras Kelurahan Basilam Baru
			8. Bulu Hala	Jl. Bulu Hala Kelurahan Sungai Geniot
			9. Tanjung Penyembal/ Simpang Pulaui	Jl. Pematang Duku Kelurahan Tanjung Penyembal
			10. Batu Teritip/Tianjung	Jl. Perjuangan Kelurahan Batu Teritip
			11. Sungai Sepit	Jl. Mekar sari Rt 09 Kelurahan Batu Teritip
4.	Medang Kampai	Medang Kampai	12. Pelintung	Jl. Pembangunan Rt 1 Kelurahan Pelintung

4) Puskesmas Keliling dan Ambulans

Pada awal berdirinya Kota Dumai jumlah puskesmas keliling yang ada sebanyak 1 (satu) unit. Seiring dengan bertambahnya jumlah puskesmas, jumlah puskesmas keliling dan ambulans yang ada dari tahun ke tahun terus berkembang. Pada tahun 2024 jumlah puskesmas keliling yang operasional di puskesmas sebanyak 8 unit dan jumlah ambulans yang operasional sebanyak 23 unit.

Tabel 2.8
Perincian Penyebaran Puskesmas Keliling Se Kota Dumai Tahun 2024

No.	Nama Puskesmas	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Nomor Polisi	Asal usul Cara Perolehan	Jumlah Barang	Keterangan	Kondisi Kendaraan			
									Baik		Rusak Ringan/ Sedang	
									Volume	Satuan	Volume	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bumi Ayu	Mobil Pusling	Xenia	2024	BM 1274 R	DAK	1 unit		1	unit		
2	Bukit Kapur	Mobil Pusling	Avanza	2014	BM 1082 R	APBD	1 unit				1	unit
3	Bukit Timah	Mobil Pusling	Xenia	2024	BM 1273 R	DAK	1 unit		1	unit		
4	Dumai Kota	Mobil Pusling	Avanza	2014	BM 1081 R	APBD	1 unit	Proses Lelang			1	unit
5	Medang Kampai	Mobil Pusling	Avanza	2014	BM 1078 R	APBD	1 unit				1	unit
6	Sungai Sembilan	Mobil Pusling	Avanza	2014	BM 1079 R	APBD	1 unit				1	unit
7	Dumai Barat	Mobil Pusling	Avanza	2014	BM 1080 R	APBD	1 unit				1	unit
8	Jaya Mukti	Mobil Pusling	Xenia	2024	BM 1272 R	DAK	1 unit		1	unit		
TOTAL							8 unit		3	unit	5	unit

Dari 8 unit puskesmas keliling sebanyak 5 unit (62,50%) diperoleh melalui pengadaan bersumber APBD Kota Dumai, dan sebanyak 3 unit (37,50%) diperoleh melalui pengadaan bersumber APBN (Dana Alokasi Khusus/DAK). Sebanyak 3 unit (37,50%) puskesmas keliling dalam kondisi baik karena baru diadakan pada tahun 2024, sedangkan sisanya sebanyak 5 unit (62,50%) puskesmas keliling dalam kondisi rusak ringan/sedang karena sudah berumur lebih dari 10 tahun. Ada sebanyak 1 (satu) puskesmas keliling di Puskesmas Dumai Kota dalam proses lelang.

Tabel 2.9
Perincian Penyebaran Ambulans Se Kota Dumai Tahun 2024

No.	Nama Puskesmas	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Nomor Polisi	Asal usul Cara Perolehan	Jumlah Barang	Keterangan	Kondisi Kendaraan			
									Baik		Rusak Ringan/ Sedang	
									Volume	Satuan	Volume	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bumi Ayu	Mobil Ambulance	Daihatsu Luxio X 1.5 M/T / Putih	2021	BM 7052 R	DID	1 unit		1	unit		
2	Bukit Kapur	Mobil Ambulance	Daihatsu Luxio 1.5 X M/T / Putih	2021	BM 7049 R	DID	1 unit		1	unit		
		Mobil Ambulance	Toyota All New Kijang INNOVA	2017	BM 7036 R	(DAK)	1 unit				1	unit
3	Bukit Kayu Kapur	Mobil Ambulance	Toyota AVANZA NEW 1.3 E M/T	2017	BM 1203 R	APBDP	1 unit				1	unit
		Mobil Ambulance	Suzuki	2010	BM 8048 R	Setda Kota Dumai	1 unit				1	unit
		Mobil Ambulance	Daihatsu Luxio 1.5 X M/T / Putih	2021	BM 7051 R	DID	1 unit		1	unit		
4	Bukit Timah	Mobil Ambulance	Daihatsu Luxio 1.5 X M/T / Putih	2022	BM 7057 R	APBD-P	1 unit		1	unit		
		Mobil Ambulance	SUZUKI/GC 415 V-APV DLX	2014	BM 7025 R	HIBAH APBN	1 unit				1	unit
5	Dumai Kota	Mobil Ambulance	Toyota All New Kijang INNOVA	2022	BM 7055 R	APBD	1 unit		1	unit		
6	Medang Kampai	Mobil Ambulance	Toyota	2011		APBD Dumai	1 unit				1	unit
7	Purnama	Mobil Ambulance	Luxio	2023	BM 9050 RG	PT. GO RENTAL	1 unit	SEWA	1	unit		
		Mobil Ambulance	Luxio	2024		DAK	1 unit		1	unit		
		Mobil Ambulance	SUZUKI/GC 415 V-APV DLX	2014	BM 7027 R	HIBAH APBN	1 unit				1	unit
8	Sungai Sembilan	Mobil Ambulance	Mobil/ Isuzu Dmax SC 4x4 / Putih	2019	BM 7043 R	APBD	1 unit				1	unit
		Mobil Ambulance	Toyota ALL Hillux Pick Up STD M/T Bensin-Vin 2017	2018	BM 8090 R	APBD	1 unit				1	unit
		Mobil Ambulance	Toyota All New Kijang INNOVA	2017	BM 7037 R	(DAK)	1 unit				1	unit
		Mobil Ambulance	Mitsubishi Triton 2.5L SC HDX-L (4x4) M/T	2023	BM 9031 R	APBD-P	1 unit		1	unit		
9	Dumai Barat	Mobil Ambulance	Luxio	2023	BM 7398 AZ	PT. GO RENTAL	1 unit	SEWA	1	unit		
10	Jaya Mukti	Mobil Ambulance	Toyota ALL Hillux Pick Up STD M/T Bensin-Vin 2017	2018	BM 8089 R	APBD	1 unit				1	unit
		Mobil Ambulance	Luxio	2023		PT. GO RENTAL	1 unit	SEWA	1	unit		
11	PSC	Mobil Ambulance	Daihatsu Luxio 1.5 X M/T / Putih	2021	BM 7054 R	DAK	1 unit		1	unit		
	PSC	Mobil Ambulance	Suzuki GC415V-APV DLX	2016	BM 7753 RA	HIBAH DARI PT. BANK RIAU KEPRI	1 unit				1	unit
	PSC	Mobil Ambulance	Toyota Hilux	2023	BM 8466 RH	PT. GO RENTAL	1 unit	SEWA	1	unit		
TOTAL							23 UNIT		12	UNIT	11	UNIT

Dari 23 unit ambulans, sebanyak 9 unit ambulans (39,13%) diperoleh melalui pengadaan bersumber APBD Kota Dumai, sebanyak 9 unit ambulans (39,13%) diperoleh melalui pengadaan bersumber APBN (DID dan DAK), sebanyak 1 unit ambulans (4,35%) diperoleh melalui hibah dari PT. Bank Riau Kepri, dan sebanyak 4 unit ambulans (17,39%) merupakan ambulans sewa dari PT. GO Rental. Sebanyak 12 unit ambulans (52,17%) dalam kondisi baik, dan sisanya sebanyak 11 unit ambulans (47,83%) dalam kondisi rusak ringan/sedang.

5). Sepeda Motor

Pada tahun 2024 jumlah kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) dinas yang ada sebanyak 69 unit terdiri dari sepeda motor bebek sebanyak 59 unit (85,51%) dan sepeda motor trail sebanyak 10 unit (14,49%). Dari 69 unit sepeda motor tersebut sebanyak 44 unit sepeda motor (63,77%) diperoleh melalui pengadaan bersumber APBD Kota Dumai, sebanyak 18 unit sepeda motor (26,09%) diperoleh melalui pengadaan bersumber APBN (DID dan DAK), sebanyak 2 unit sepeda motor (2,90%) diperoleh melalui pengadaan bersumber APBD Provinsi Riau dan sebanyak 5 unit sepeda motor (7,25%) diperoleh melalui sumber lain-lain. Sepeda motor tersebut tersebar di puskesmas dan jaringannya sebanyak 57 unit (82,61%) dan Dinas Kesehatan termasuk UPT sebanyak 12 unit (17,39%). Dari 69 unit sepeda motor tersebut, sebanyak 14 unit sepeda motor (20,29%) dalam kondisi baik dan sisanya sebanyak 55 unit sepeda motor (79,71%) dalam kondisi rusak ringan.

Tabel 2.10
Perincian Penyebaran Sepeda Motor Se Kota Dumai Tahun 2024

No.	Nama Puskesmas	Uraian Jenis Sepeda Motor				Total Sepeda Motor		Kondisi Sepeda Motor			
		Bebek		Trail				Baik		Rusak Ringan	
		Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan
1	Dumai Kota	13	unit	0	unit	13	unit	0	unit	13	unit
2	Jaya Mukti	6	unit	0	unit	6	unit	0	unit	6	unit
3	Bumi Ayu	2	unit	0	unit	2	unit	0	unit	2	unit
4	Bukit Timah	3	unit	0	unit	3	unit	0	unit	3	unit
5	Dumai Barat	3	unit	0	unit	3	unit	0	unit	3	unit
6	Purnama	4	unit	0	unit	4	unit	0	unit	4	unit
7	Bukit Kapur	3	unit	0	unit	3	unit	0	unit	3	unit
8	Bukit Kayu Kapur	0	unit	1	unit	1	unit	0	unit	1	unit
9	Sungai Sembilan	9	unit	4	unit	13	unit	3	unit	10	unit
10	Medang Kampai	8	unit	1	unit	9	unit	2	unit	7	unit
11	Dinas Kesehatan	8	unit	4	unit	12	unit	9	unit	3	unit
	Total	59	unit	10	unit	69	unit	14	unit	55	unit

6) Sarana Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM)

Untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat telah dikembangkan pula suatu pendekatan keterpaduan di tingkat kelurahan melalui Pos Kesehatan Desa/Kelurahan (Poskeskel), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pondok Bersalin Desa (Polindes), dan Pos Binaan Terpadu (Posbindu) sebagai wujud nyata dari peran serta masyarakat.

- *Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel)*

Salah satu upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat adalah Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel). Dalam rangka pengimplementasian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Pengembangan Desa Siaga dan Pos Kesehatan Desa, maka dibentuklah pos kesehatan kelurahan (poskeskel) di setiap kelurahan di Kota Dumai.



Sampai saat ini telah dibangun 32 (tiga puluh dua) unit poskeskel, di mana 5 poskeskel merupakan alih fungsi dari bangunan puskesmas pembantu. Khusus kelurahan Batu Teritip karena merupakan daerah sulit ada 3 poskeskel yang telah dibangun yakni poskeskel Batu Teritip 1 (Jl. Transmigrasi), poskeskel Senepis (Jl. Kampung Baru Rt 07) dan poskeskel Batu Teritip 2 (Jl. Raya Tianjung Rt 03). Jumlah poskeskel yang aktif saat ini sebanyak 31 poskeskel, di mana ada 1 poskeskel yang belum operasional karena proses pembangunannya belum selesai pada tahun 2024 dan rencananya akan dilanjutkan pada tahun 2025 yakni poskeskel Teluk Binjai (Jl. Air Bersih Kelurahan Teluk Binjai).

Dengan adanya pemekaran kelurahan dari 33 kelurahan menjadi 36 kelurahan sesuai Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelurahan Bagan Besar Timur Kecamatan Bukit Kapur, Kelurahan Bukit Kapur Kecamatan Bukit Kapur dan kelurahan Sungai Geniot Kecamatan Sungai Sembilan, maka jumlah kelurahan yang belum memiliki bangunan poskeskel bertambah menjadi 6 kelurahan (16,67%) yakni kelurahan

Purnama, kelurahan Pangkalan Sesai, kelurahan Dumai Kota, kelurahan Sukajadi, kelurahan Bukit Kayu Kapur dan kelurahan Baslam Baru. Sedangkan untuk kelurahan Bagan Besar, bangunan poskeskel yang ada merupakan rehab eks rumah dinas Camat Bukit Kapur yang sudah dihibahkan ke Dinas Kesehatan Kota Dumai. Pada tahun 2024, poskeskel Bagan Besar sudah mulai operasional setelah dilakukan rehabilitasi dan renovasi pada tahun 2023 dan 2024. Pada umumnya kelurahan yang belum memiliki bangunan poskeskel berada di wilayah perkotaan di mana sulit untuk mendapatkan lahan terkait kebijakan RT/RW di samping keterbatasan anggaran. Dengan demikian, dari 36 kelurahan baru 30 kelurahan yang memiliki bangunan poskeskel, sehingga persentase kelurahan yang memiliki poskeskel adalah sebesar 83,33%.

Tabel 2.11 Perincian Penyebaran Poskeskel Se Kota Dumai Tahun 2024

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	KELURAHAN	NAMA POSKESKEL	ALAMAT
1	BUKIT KAPUR	BUKIT KAYU KAPUR	BUKIT KAYU KAPUR	--	--
			KAMPUNG BARU	Simpang Siak	JL. SIMPANG SIAK RT.12 KAMPUNG BARU
			GURUN PANJANG	Gurun Panjang	JL. UTAMA RT.09 KELURAHAN GURUN PANJANG
			BUKIT KAPUR	Bukit Kapur	JL.PANAM UJUNG RT 18
				TOTAL	3 UNIT
		BUKIT KAPUR	BAGAN BESAR TIMUR	Bagan Besar Timur	JL.ASSALAM RT.01 BAGAN BESAR TIMUR
			BUKIT NENAS	Bukit Nenas	Jl. INPRES SIMPANG JEPANG RT. 08 BUKIT NENAS
			BAGAN BESAR	Bagan Besar	JL. INPRES II BAGAN BESAR (eks rumah camat bagan besar)
				TOTAL	3 UNIT
2	DUMAI BARAT	DUMAI BARAT	PANGKALAN SESAI	--	--
			SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN	Simpang Tetap Darul Ikhsan	JL. MERANTI LAUT
				TOTAL	1 UNIT
		PURNAMA	BAGAN KELADI	Bagan keladi	BAGAN KELADI
			PURNAMA	--	--
				TOTAL	1 UNIT
3	SUNGAI SEMBILAN	SUNGAI SEMBILAN	BANGSAL ACEH	Bangsai Aceh	JL. BUMI PUTERA, KEL. BANGSAL ACEH
			LUBUK GAUNG	Lubuk Gaung	JL. RIMBUN JAYA, KEL. LUBUK GAUNG
			TANJUNG PENYEMBAL	Tanjung Penyembal	JL. BUNGA, KEL. TANJUNG PENYEMBAL
			SUNGAI GENIOT	Sungai Geniot	JL. H. ABDUL AZIS, GENIOT
			BATU TERITIP	Batu Teritip 1	JL. TRANSMIGRASI, TANJUNG
				Senepis	JL. KAMPUNG BARU RT 07 SENEPIS
				Batu Teritip 2	JL. RAYA TANJUNG RT 03
			BASILAM BARU	--	--
				TOTAL	7 UNIT
4	DUMAI TIMUR	JAYA MUKTI	JAYA MUKTI	Jaya Mukti	JL. SWADAYA
			TANJUNG PALAS	Tanjung Palas	JALAN BUDI TANJUNG PALAS
			BULUH KASAP	Buluh Kasap	JALAN SEI ROKAN
			TELUK BINJAI	Teluk Binjai	JALAN AIR BERSIH TELUK BINJAI (BELAKANG KANTOR LURAH TELUK BINJAI) (sedang dalam proses pembangunan)
			BUKIT BATREM	Bukit Batrem	JALAN UTAMA KARYA
				TOTAL	5 UNIT
5	DUMAI KOTA	DUMAI KOTA	DUMAI KOTA	--	--
			SUKAJADI	--	--
			LAKSMANA	Laksmana	JLN.NURI, KELURAHAN LAKSMANA
			BINTAN	Bintan	JLN.JEND SUDIRMAN BLK.KANTOR LURAH BINTAN
			RIMBA SEKAMPUNG	Rimba Sekampung	JL. BELIMBING, KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG
				TOTAL	3 UNIT
6	DUMAI SELATAN	BUMIAYU	BUMIAYU	Bumi Ayu	JLN. GUNUNG BROMO (RUSAK BERAT)
			RATU SIMA	Ratu Sima	JLN. SIDOREJO
			BUKIT DATUK	Bukit Datuk	BTN RAWASARI
				TOTAL	3 UNIT
		BUKIT TIMAH	BUKIT TIMAH	Bukit Timah	JL.ABDUL RAB KHAN KM 3
			MEKAR SARI	Mekar Sari	KM 11 MEKAR SARI
				TOTAL	2 UNIT
7	MEDANG KAMPAI	MEDANG KAMPAI	GUNTUNG	Guntung	JLN.ARIFIN AHMAD GUNTUNG
			MUNDAM	Mundam	JLN.ARIFIN AHMAD MUNDAM
			TELUK MAKMUR	Teluk Makmur	JLN.ARIFIN AHMAD TELUK MAKMUR
			PELINTUNG	Pelintung/Selinsing	JLN.ARIFIN AHMAD PELINTUNG
				TOTAL	4 UNIT
TOTAL KOTA DUMAI					32 UNIT
BANGUNAN STATIS					32 UNIT
DALAM PROSES PEMBANGUNAN					1 UNIT
KELURAHAN BELUM ADA BANGUNAN STATIS POSKESKEL					6 KELURAHAN

b) Posyandu

Pada awal berdirinya Kota Dumai jumlah posyandu balita yang ada sebanyak 121 buah. Dari tahun ke tahun perkembangan jumlah posyandu yang ada cenderung meningkat. Pada tahun 2024, jumlah posyandu yang ada di Kota Dumai sebanyak 201 posyandu, dimana seluruhnya (100%) merupakan posyandu mandiri.

Melalui revitalisasi posyandu, konsep posyandu balita yang semula 100 balita per posyandu dikembangkan menjadi 1 posyandu untuk 1 wilayah dengan jumlah kepala keluarga 250 s/d 500. Satu wilayah dipantau oleh para kader posyandu, dimana setiap 1 kader posyandu memantau 50 s/d 100 kepala keluarga. Saat ini jumlah kader posyandu balita sebanyak 1.010 orang.

Tabel 2.12 Jumlah Posyandu Balita Menurut Puskesmas
Di Kota Dumai Tahun 2024

No	Nama Puskesmas	Jumlah Posyandu		
		Purnama	Mandiri	Jumlah
1.	Dumai Kota	0	34	34
2.	Bumi Ayu	0	18	18
3.	Dumai Barat	0	11	11
4.	Bukit Timah	0	11	11
5.	Bukit Kapur	0	14	14
6.	Sungai Sembilan	0	29	29
7.	Medang Kampai	0	15	15
8.	Jaya Mukti	0	39	39
9.	Purnama	0	12	12
10.	Bukit Kayu Kapur	0	18	18
	Total Kota Dumai	0	201	201

Rasio posyandu per 1.000 balita adalah 5,66 per 1.000 balita. Hal ini berarti bahwa 1 posyandu melayani 177 balita. Apabila dibandingkan dengan jumlah puskesmas maka rata-rata setiap puskesmas membina 20-21 posyandu.

Selain posyandu balita, di Kota Dumai telah dikembangkan posyandu usila sebagai salah satu pengembangan program pelayanan kesehatan usia lanjut (usila). Posyandu usila pertama kali dikembangkan pada tahun 2005 di kelurahan Jaya Mukti yakni Posyandu Lansia Nuri. Pada tahun 2024 jumlah posyandu usila sebanyak 68 posyandu dengan jumlah kader posyandu usila sebanyak 340 orang. Kegiatan yang dilaksanakan setiap bulannya adalah

pemeriksaan kesehatan lansia, pengobatan, penyuluhan kepada para lansia, senam lansia, wirid pengajian, home care, membuat kerajinan tangan serta rekreasi.

Tabel 2.13 Jumlah Posyandu Usila Menurut Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2024

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah
1	Dumai Timur	Jaya Mukti	13
2	Dumai Barat	Dumai Barat	4
		Purnama	4
3	Bukit Kapur	Bukit Kapur	7
		Bukit Kayu Kapur	3
4	Medang Kampai	Medang Kampai	13
5	Sungai Sembilan	Sungai Sembilan	7
6	Dumai Kota	Dumai Kota	11
7	Dumai Selatan	Bumi Ayu	7
		Bukit Timah	2
	TOTAL KOTA DUMAI		68

c) Polindes

Pada awal berdirinya Kota Dumai jumlah polindes yang ada sebanyak 13 buah. Jumlah polindes mengikuti jumlah bidan PTT yang ada pada saat itu. Saat ini jumlah polindes yang ada sebanyak 4 polindes, dengan perincian 2 telah memiliki bangunan polindes yang permanen yakni polindes Santa Hulu dan Polindes Teluk Dalam. Sedangkan 2 lagi masih menumpang di posyandu yakni polindes Bangsal Aceh dan menumpang di rumah pribadi yakni polindes Sungai Geniot. Keseluruhan polindes berada di kecamatan Sungai Sembilan.

Tabel 2.14 Jumlah Polindes di Kota Dumai Tahun 2024

NO	KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS	WILAYAH KERJA	NAMA POLINDES	ALAMAT	PENANGGUNG JAWAB	TITIK KOORDINAT		KETERANGAN
							LINTANG (LATITUDE)	BUJUR (LONGITUDE)	
1	SUNGAI SEMBILAN	SUNGAI SEMBILAN	KELURAHAN BANGSAL ACEH	Bangsai Aceh	JL. TENDRI SANGKA RT 06 BANGSAL ACEH	HESTI PARDINI, Amd. Keb			MENUMPANG DI POSYANDU
2			KELURAHAN SUNGAI GENIOT	Sungai Geniot	JL. PANGLI MA MAKMUR RT 07	ANA SIREGAR, SST			RUMAH PRIBADI
3			KELURAHAN BATU TERITIP	Teluk Dalam	JL. BIMA DESA TELUK DALAM RT 08	DEWI MURNI, Amd. Keb			BANGUNAN STATIS (PEMKOT DUMAI 2020)
4			KELURAHAN BATU TERITIP	Santa Hulu	JL. KAMPUNG BARU RT 01	RIAMA PANGARIBUAN, Amd. Keb	1.99693386N	101.2733914E	BANGUNAN STATIS (PEMKOT DUMAI 2020)
TOTAL				4 UNIT					

d) *Pos Binaan Terpadu (Posbindu)*

Peningkatan jumlah kematian akibat penyakit tidak menular (PTM) seperti penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi menunjukkan adanya pergeseran dalam pola penyakit di Indonesia. Sebagai contoh, di tingkat global, 63% penyebab kematian berasal dari PTM yang membunuh 36 juta jiwa setiap tahun. 80% dari kematian ini terjadi di negara berpenghasilan menengah dan rendah, termasuk Indonesia.

Penyakit tidak menular ini sering kali disebabkan oleh perubahan gaya hidup, seperti pola makan yang buruk, kurangnya aktivitas fisik, merokok, dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Selain itu, faktor sosial ekonomi juga turut memperburuk kondisi, karena kelompok miskin cenderung memiliki akses yang terbatas terhadap fasilitas kesehatan yang memadai dan lebih rentan terhadap paparan lingkungan yang tidak sehat.

Peningkatan prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) menjadi ancaman yang serius dalam pembangunan di bidang kesehatan karena mengancam pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun daerah. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan bahwa dari 10 besar penyebab kematian tertinggi di Indonesia 5 diantaranya adalah karena PTM yaitu Hipertensi (prevalensi 34.1%), Stroke (prevalensi 10.9%), Diabetes Mellitus (prevalensi 8.5%), Gagal Ginjal (prevalensi 3.8%), dan Kanker (prevalensi 1.8%). Selain itu PTM termasuk penyumbang angka kematian yang signifikan yaitu masuk dalam 5 besar.

Pos Binaan Terpadu (Posbindu) dibentuk sebagai salah satu upaya promotif dan deteksi dini faktor resiko PTM yang melibatkan peran serta masyarakat secara aktif. Salah satu kegiatan yang dilakukan di posbindu adalah skrining PTM. Sampai dengan tahun 2024 jumlah posbindu yang telah terbentuk sebanyak 41 posbindu, yang tersebar di 36 kelurahan. Hanya 2 kelurahan yang belum memiliki posbindu yakni kelurahan Batu Teritip di Kecamatan Sungai Sembilan dan kelurahan Bagan Besar Timur di Kecamatan Bukit Kapur, sehingga persentase kelurahan yang melaksanakan kegiatan posbindu PTM sebesar 94,44%.

Tabel 2.15 Jumlah Posbindu Menurut Puskesmas di Kota Dumai
Tahun 2024

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	NAMA POSBINDU
1	DUMAI KOTA	DUMAI KOTA	1. Mekar Senja
			2. Cahaya Bunda
			3. Wahidin
			4. Laksmana
			5. Ar Rahman
2	DUMAI TIMUR	JAYA MUKTI	1. Nuri
			2. Kutilang
			3. Kasih Sayang
			4. Raufa
			5. Berlian
			6. Dara
3	DUMAI SELATAN	BUMI AYU	1. Mardi Mulyo
			2. Permaisuri
			3. Edelwis
		BUKIT TIMAH	1. Bukit Berbunga 2. Mekar Berseri
4	DUMAI BARAT	DUMAI BARAT	1. Sadar
			2. Lestari
			3. Cermi
			4. Mutiara
		PURNAMA	1. Cut Nyak Dien
			2. Tua Ceria 3. Sehat Mandiri
5	BUKIT KAPUR	BUKIT KAPUR	1. Tulip
			2. Teratai
			3. Lily
			4. Mekar Sari
		BUKIT KAYU KAPUR	1. Mentari
			2. Tulip/ Lavender
			3. Kenanga
			4. Bukit Kapur
6	SUNGAI SEMBILAN	SUNGAI SEMBILAN	1. Melati Putih
			2. Harapan Jaya
			3. Tirta Kencana
			4. Permata Bunda
			5. Sejahtera
			6. Sehat

7	MEDANG KAMPAI	MEDANG KAMPAI	1. Laksamana
			2. Hang Nadim
			3. Hang Jebat
			4. Hang Tuah
TOTAL POSBINDU SE KOTA DUMAI			41 POSBINDU

Dengan diimplementasikannya Kebijakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) di Kota Dumai, yang ditandai melalui peluncuran ILP di Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), dan Posyandu se-Kota Dumai di Puskesmas Dumai Kota pada tanggal 14 Agustus 2024, maka kelembagaan posbindu sudah tidak ada lagi karena pelayanannya sudah terintegrasi di posyandu dan puskesmas pembantu atau poskeskel.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 2015 Tahun 2023, Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer merupakan bagian integral dari transformasi kesehatan. Kebijakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) bertujuan untuk menyelaraskan dan mengoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan primer dengan fokus pada siklus hidup individu, keluarga, dan masyarakat, mulai dari janin hingga lansia. ILP bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat, serta memperkuat peran Puskesmas, Pustu, dan Posyandu sebagai garda depan pelayanan kesehatan.

e. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

Salah satu faktor pendukung dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas yaitu ketersediaan sumber daya kesehatan, yang diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satunya adalah ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan). Jenis fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas: a. tempat praktik mandiri tenaga kesehatan; b. pusat kesehatan masyarakat; c. klinik; d. rumah sakit; e. apotek; f. unit transfusi darah; g. laboratorium kesehatan;

h. optikal; i. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan j. fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.

Pada tahun 2024 jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ada di Kota Dumai seperti klinik sebanyak 48 klinik, praktek mandiri dokter spesialis sebanyak 20 orang, praktek mandiri dokter umum sebanyak 71 orang, praktek mandiri dokter gigi sebanyak 35 orang, praktek mandiri bidan sebanyak 141 orang, praktek mandiri perawat sebanyak 6 orang, jumlah laboratorium kesehatan sebanyak 4 unit. Sedangkan jumlah sarana kefarmasian ada sebanyak 126 unit terdiri dari apotik sebanyak 69 unit, toko obat sebanyak 55 unit dan toko alat kesehatan sebanyak 2 unit. Lebih lanjut, jumlah sarana optikal yang ada di Kota Dumai sebanyak 19 unit. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya tersebut mayoritas terkonsentrasi di daerah perkotaan seperti di Kecamatan Dumai Kota dan Kecamatan Dumai Timur.

Tabel 2.16 Data Penyebaran Sarana Pelayanan Kesehatan Lain, Sarana Produksi Dan Distribusi Kefarmasian Dan Optical di Kota Dumai Tahun 2024

NO	KECAMATAN	WILAYAH KERJA PUSKESMAS	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN								SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN			OPTICAL
			KLINIK UTAMA	KLINIK PRATAMA	PRAKTEK DOKTER SPESIALIS	PRAKTEK DOKTER UMUM	PRAKTEK DOKTER GIGI	PRAKTEK BIDAN MANDIRI	PRAKTEK PERAWAT MANDIRI	LABORATORIUM KESEHATAN	APOTEK	TOKO OBAT	TOKO ALKES	
1	Dumai Kota	Dumai Kota	3	15	18	20	14	17	0	3	33	14	2	13
2	Dumai Timur	Jaya Mukti	0	9	0	9	6	29	2	1	10	8	0	2
3	Dumai Selatan	Bumi Ayu	0	4	2	9	10	15	0	0	3	2	0	2
		Bukit Timah	0	1	0	5	0	11	0	0	3	3	0	0
4	Dumai Barat	Dumai Barat	0	1	0	9	2	14	0	0	3	6	0	1
		Purnama	0	2	0	4	2	4	1	0	5	5	0	1
5	Bukit Kapur	Bukit Kapur	0	5	0	5	1	11	1	0	3	2	0	0
		Bukit Kayu Kapur	0	0	0	2	0	25	1	0	3	5	0	0
6	Medang Kampai	Medang Kampai	0	3	0	6	0	9	1	0	3	7	0	0
7	Sungai Sembilan	Sungai Sembilan	0	5	0	2	0	6	0	0	3	3	0	0
TOTAL			3	45	20	71	35	141	6	4	69	55	2	19

Permasalahan yang ditemukan pada fasilitas pelayanan kesehatan lainnya adalah masih ada klinik, praktek mandiri tenaga kesehatan, apotik dan toko obat yang telah habis masa berlaku izinnya pada tahun 2024 namun masih tetap operasional, masih ada toko obat yang tidak memenuhi persyaratan perizinan toko obat yakni tidak memiliki tenaga teknis kefarmasian (sebagai penanggung jawab) namun masih tetap operasional. Lebih lanjut, ada ditemukan tenaga kesehatan dengan izin praktek mandiri namun membuka praktek dengan

plang klinik kecantikan atau ditemukan klinik kecantikan namun izin operasionalnya adalah salon. Hal tersebut dapat membahayakan masyarakat karena masyarakat sebagai konsumen menjadi tidak terlindungi karena ternyata banyak hal-hal yang tidak sesuai baik dari segi keamanan prosedur, tenaga kerja maupun keamanan produk yang digunakan. Disinyalir saat ini masih banyak produk, alat dan prosedur yang belum mendapatkan izin resmi dari pihak terkait di Indonesia. Dengan demikian, bahan-bahan maupun prosedur yang digunakan belum terjamin keamanannya, apakah memiliki efek samping berbahaya atau tidak. Dari tenaga yang digunakan pun terdapat beberapa hal yang menjadi masalah serta masih banyak prosedur yang dilakukan oleh orang yang tidak sesuai dengan kompetensinya.

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan/atau medik spesialistik secara komprehensif. Klinik merupakan kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, sehingga pelaku usaha harus memiliki legalitas perizinan berusaha berupa Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat. Standar yang dapat diperoleh melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021, Klinik kecantikan memiliki pengawasan dari dokter yang memiliki sertifikasi dan kompetensi di bidang kecantikan tertentu. Dokter pengawas bisa seorang dokter umum yang telah mengikuti training selama waktu tertentu dan mendapatkan gelar tersendiri atau bisa juga seorang dokter kulit. Sementara salon kecantikan biasanya diawasi orang awam (tidak memiliki pendidikan medis) dan mendapatkan keahlian berdasar seminar/les khusus kecantikan. Tindakan yang dilakukan pun biasanya tidak memerlukan keahlian medis seperti facial, massage, masker, creambath dll seperti layaknya salon.

7) Sarana Peralatan Kesehatan

Disamping itu, guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Kesehatan Kota Dumai secara bertahap mengadakan peralatan kesehatan dan peralatan non kesehatan serta sarana penunjang lainnya di seluruh puskesmas, puskesmas

pembantu dan poskeskel. Selain melengkapi puskesmas dengan pengadaan peralatan kesehatan dasar puskesmas seperti pengadaan alat-alat kedokteran umum, pengadaan alat-alat kedokteran gigi, pengadaan alat kesehatan kebidanan, pengadaan alat-alat keperawatan dan alat-alat laboratorium, puskesmas juga secara bertahap mulai dilengkapi dengan pengadaan peralatan kesehatan spesialis misalnya pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan seperti peralatan USG, pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi seperti ECG. Selain itu, beberapa puskesmas juga sudah dilengkapi dengan sarana IPAL, generator set dan sumur bor dalam termasuk Laboratorium Kualitas Air dan Gudang Farmasi Kota Dumai.

Tabel 2.17 Daftar Rekapitulasi Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Sampah Medis (SW 100) Kota Dumai Tahun 2024

NO	LOKASI	JENIS	TAHUN
A	PENGADAAN IPAL		
1	Laboratorium Dinas Kesehatan	IPAL	2015
2	Puskesmas Bukit Kapur	IPAL MRC 10	2016
3	Puskesmas Medang Kampai	IPAL MRC 10	2016
4	Puskesmas Sungai Sembilan	IPAL MRC 10	2016
5	Puskesmas Dumai Kota	IPAL BARTEC	2017
6	Puskesmas Jayamukti	IPAL BARTEC	2017
7	Puskesmas Dumai Barat	IPAL BARTEC	2017
8	Puskesmas Bukit Timah	IPAL Bio Wash 5 M3	2020
9	Puskesmas Bukit Kayu Kapur	IPAL Flash Type Eco1 5-14 M3	2021
10	Puskesmas Purnama	IPAL Flash Type Eco1 5-14 M3	2021
11	Puskesmas Bumi Ayu	-	-
12	Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A Kota Dumai	IPAL Flash Type Eco1 5-14 M3	2021
B	PENGADAAN SW 100		
1	Puskesmas Medang Kampai	Steril Wave 100	2019
2	Puskesmas Purnama	Steril Wave 100	2019

Tabel 2.18 Perincian Puskesmas yang memiliki Genset dan Sumur Bor Dalam Tahun 2024

No.	Nama Puskesmas	Jenis Sarana		Keterangan
		Genset + Rumah	Sumur Bor Dalam	
1.	Dumai Kota	2017/2018	2017	
2.	Dumai Barat	2021/2023	2017	Sumur bor dalam rusak (berfungsi).
3.	Sungai Sembilan	2017/2019	2021	
4.	Bukit Kapur	2017/2019	2022	
5.	Medang Kampai	2017/2019	2021	
6.	Jaya Mukti	2017/2019	2017	
7.	Bumi Ayu	2021/2023	-	
8.	Bukit Timah	2021/2023	2019	
9.	Purnama	2020/2023	2019	
10.	Bukit Kayu Kapur	-	2021	

Berdasarkan data Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) per April 2025, pencapaian kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan puskesmas di Kota Dumai adalah sebesar 57,82%. Kelengkapan sarana puskesmas di Kota Dumai rata-rata sebesar 64,19% dengan nilai berkisar antara 47,62% sampai dengan 81,4%. Untuk kelengkapan prasarana puskesmas di Kota Dumai rata-rata sebesar 39,44% dengan nilai berkisar antara 31,48% sampai dengan 48,15%. Sedangkan untuk kelengkapan alat kesehatan puskesmas di Kota Dumai rata-rata sebesar 54,45% dengan nilai berkisar antara 37,21% sampai dengan 93,49%. Berdasarkan puskesmas, puskesmas yang memiliki nilai kelengkapan Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan tertinggi adalah puskesmas Bukit Kapur dengan nilai sebesar 68,06% dan puskesmas yang memiliki nilai kelengkapan Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan terendah adalah puskesmas Bukit Kayu Kapur dengan nilai sebesar 48,01%, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.19 Gambaran Kelengkapan Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Di Puskesmas se Kota Dumai Tahun 2024
(Berdasarkan Data Aspak per April 2025)

Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

dinkeskotadumai

Persentase Kelengkapan Data SPA Puskesmas

Puskesmas					Kelengkapan			Kumulasi (50S +10P +40A)
No	Kode	Nama Puskesmas	Status	Lokasi	Sarana	Prasarana	Alat Kesehatan	
Riau								
1	14720200007	BUKIT TIMAH	-	Kota Dumai	47.62	35.19	93.49	64.72
2	14720200001	BUKIT KAPUR	Ranap	Kota Dumai	81.4	35.85	59.45	68.06
3	14720200010	DUMAI KOTA	-	Kota Dumai	61.9	48.15	57.11	58.61
4	14720200009	JAYA MUKTI	-	Kota Dumai	54.76	46	56.25	54.48
5	14720200008	BUMI AYU	-	Kota Dumai	59.52	31.48	54.7	54.79
6	14720200002	BUKIT KAYU KAPUR	-	Kota Dumai	47.62	43.4	49.65	48.01
7	14720200005	DUMAI BARAT	-	Kota Dumai	59.52	35.19	49.28	52.99
8	14720200006	PURNAMA	-	Kota Dumai	71.43	35.19	47.26	58.14
9	14720200004	SUNGAI SEMBILAN	Ranap	Kota Dumai	76.74	37.04	40.12	58.12
10	14720200003	MEDANG KAMPAI	Ranap	Kota Dumai	81.4	46.94	37.21	60.28

C. Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pada tahun 2024 total tenaga yang ada di sarana kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai sebanyak 2.445 orang. Berdasarkan jenis kelamin, tenaga di sarana kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai didominasi oleh perempuan yakni sebanyak 1.814 orang atau sebesar 74,19% dan sisanya sebanyak 631 orang atau sebesar 25,81% adalah laki-laki. Sedangkan berdasarkan jenis ketenagaan, tenaga di sarana kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai terdiri dari tenaga PNS sebanyak 834 orang (34,11%), tenaga PPPK sebanyak 579 orang (23,68%) dan TKPK (termasuk tenaga PTT dan Internship) sebanyak 1.032 orang (42,21%). Berdasarkan unit kerja, jumlah tenaga terbanyak berada di RSUD Kota Dumai yakni sebanyak 1.252 orang atau sebesar 51,21%, sedangkan jumlah tenaga di Dinas Kesehatan termasuk 12 UPT sebanyak 1.193 orang atau sebesar 48,79%.

Tabel 2.20 Persebaran Tenaga Yang Bekerja Di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Kota Dumai Berdasarkan Unit Kerja dan Status Tenaga Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Status Tenaga			Jumlah
		PNS	PPPK	TKPK	
1.	Dinas Kesehatan + 12 UPT	486	355	352	1.193
2.	RSUD Kota Dumai	348	224	680	1.252
	Jumlah	834	579	1.032	2.445

Berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, dari 841 ASN (PNS dan PPPK) yang ada di Dinas Kesehatan Kota Dumai dan 12 UPT, pendidikan paling banyak yang ditamatkan adalah Diploma (D 3 dan D 4) yakni sebesar 65,44%, sedangkan ASN dengan pendidikan tinggi atau S 1 ke atas hanya sebesar 31,83%. Selain itu, masih ada sebanyak 2,73% ASN di Dinas Kesehatan Kota Dumai dan 12 UPT dengan pendidikan diploma ke bawah.

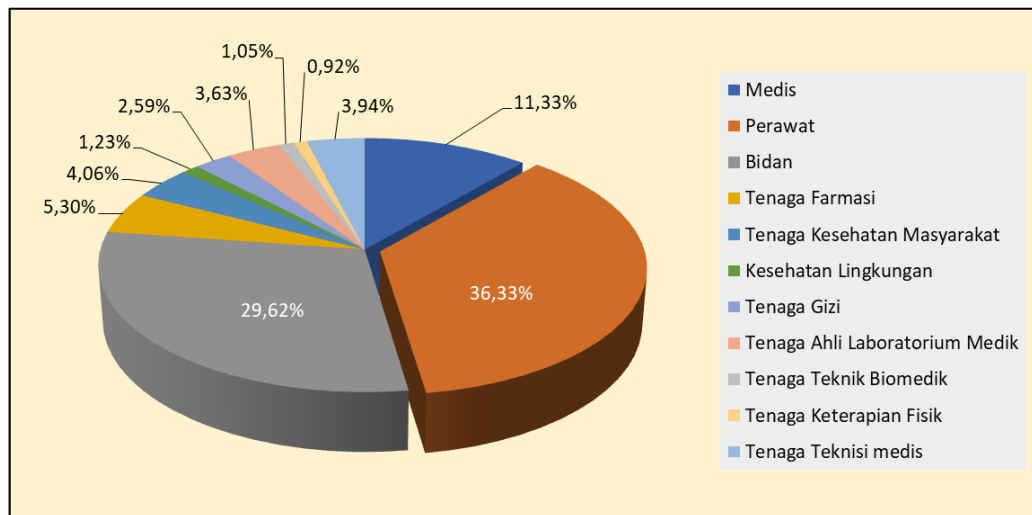
Kapasitas dan kapabilitas aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Dengan rata-rata tingkat pendidikan PNS Dinas Kesehatan yang relatif masih lebih banyak Diploma bahkan ada yang masih lulusan SMA ini merupakan kekurangan/kelemahan dalam hal kompetensi kinerja secara umum. Sebagai lembaga yang bergerak dalam urusan kesehatan masyarakat Kota Dumai, tingkat pendidikan ini tentu menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sebagai lembaga kesehatan secara optimal. Kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah mengenai kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan yang belum sesuai dengan standar.

Persebaran Tenaga Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Dumai

Sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai ada 2 (dua) yakni RSUD Kota Dumai dan Puskesmas se Kota Dumai. Pada tahun 2024 jumlah tenaga di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai tersebut sebanyak 2.285 orang, dimana sebanyak 1.624 orang atau sebesar 71,07% merupakan tenaga pelayanan kesehatan dan sisanya sebanyak 661 orang atau sebesar 28,93% merupakan tenaga penunjang/pendukung kesehatan. Persebaran

tenaga kesehatan menurut jenis tenaga menunjukkan perawat dan bidan merupakan jenis tenaga kesehatan yang paling banyak yakni sebesar 65,95% seperti terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.1 Persebaran Tenaga Kesehatan Menurut Jenis Tenaga di RSUD Kota Dumai dan Puskesmas se Kota Dumai Tahun 2024



1) Tenaga Medis

Pada tahun 2024 total tenaga medis yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai (RSUD Kota Dumai dan Puskesmas se Kota Dumai) sebanyak 184 orang yang terdiri dari dokter spesialis sebanyak 47 orang (termasuk 2 orang spesialis gigi), dokter umum sebanyak 119 orang dan dokter gigi sebanyak 18 orang, Dengan demikian rasio dokter spesialis sebesar 13,68 per 100.000 penduduk, rasio dokter umum sebesar 34,63 per 100.000 penduduk dan rasio dokter gigi sebesar 5,24 per 100.000 penduduk.

2) Tenaga Perawat

Pada tahun 2024 total tenaga perawat yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai (RSUD Kota Dumai dan Puskesmas se Kota Dumai) sebanyak 590 orang. Rasio perawat sebesar 171,71 per 100.000 penduduk.

3) Tenaga Bidan

Pada tahun 2024 total tenaga bidan yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai (RSUD Kota Dumai dan Puskesmas se Kota Dumai) sebanyak 481 orang. Rasio bidan sebesar 139,99 per 100.000 penduduk.

4) Tenaga Farmasi

Pada tahun 2024 total tenaga farmasi yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai (RSUD Kota Dumai dan Puskesmas se Kota Dumai) sebanyak 86 orang yang terdiri dari apoteker sebanyak 33 orang, dan asisten apoteker sebanyak 53 orang. Rasio apoteker sebesar 9,60 per 100.000 penduduk, sedangkan rasio asisten apoteker sebesar 15,43 per 100.000 penduduk.

5) Tenaga Gizi

Pada tahun 2024 total tenaga gizi yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai (RSUD Kota Dumai dan Puskesmas se Kota Dumai) sebanyak 42 orang. Dengan demikian rasio tenaga gizi sebesar 12,22 per 100.000 penduduk.

6) Tenaga Kesehatan Lingkungan

Pada tahun 2024 total tenaga kesehatan lingkungan yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai (RSUD Kota Dumai dan Puskesmas se Kota Dumai) sebanyak 20 orang. Dengan demikian rasio tenaga Kesehatan Lingkungan sebesar 5,82 per 100.000 penduduk.

7) Tenaga Kesehatan Masyarakat

Pada tahun 2024 total kesehatan masyarakat yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai (RSUD Kota Dumai dan Puskesmas se Kota Dumai) sebanyak 66 orang. Dengan demikian rasio tenaga kesehatan masyarakat sebesar 19,21 per 100.000 penduduk.

8) Tenaga Teknisi Medis

Pada tahun 2024 total tenaga teknisi medis yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai (RSUD Kota Dumai dan Puskesmas se Kota Dumai) sebanyak 64 orang. Dengan demikian rasio tenaga teknisi medis sebesar 18,63 per 100.000 penduduk.

9) Tenaga Keterampilan Fisik

Pada tahun 2024 total tenaga keterampilan fisik yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai (RSUD Kota Dumai dan Puskesmas se Kota Dumai) yakni tenaga fisioterapi sebanyak 15 orang. Dengan demikian rasio tenaga fisioterapi sebesar 4,37 per 100.000 penduduk.

10) Tenaga Ahli Laboratorium Medik

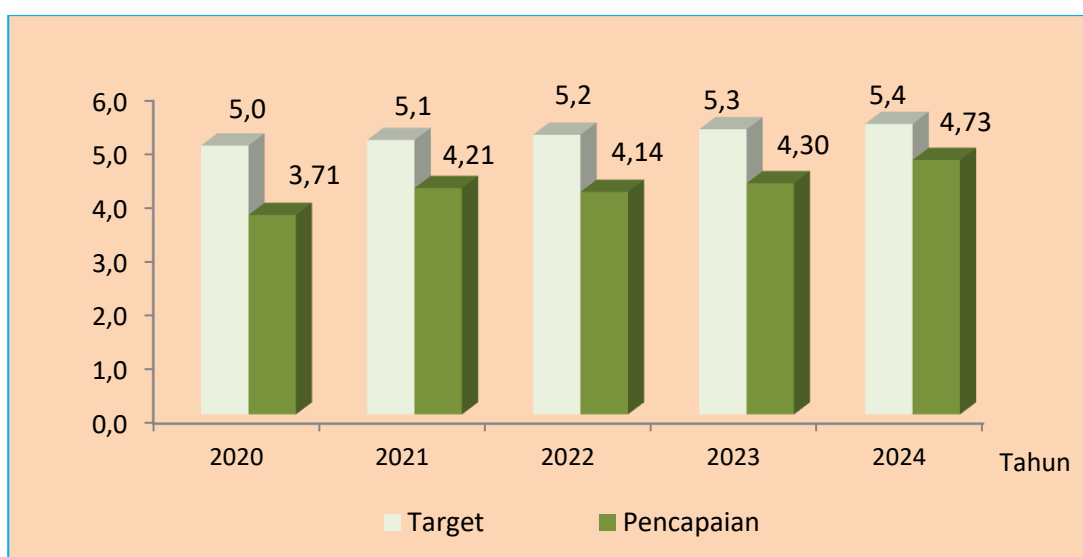
Pada tahun 2024 total tenaga ahli laboratorium medik yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai (RSUD Kota Dumai dan Puskesmas se Kota Dumai) sebanyak 59 orang. Dengan demikian rasio tenaga ahli laboratorium medik sebesar 17,7 per 100.000 penduduk.

11) Tenaga Teknik Biomedik

Pada tahun 2024 total tenaga Teknik Biomedik yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai sebanyak 17 orang. Tenaga ini hanya ada di RSUD Kota Dumai. Dengan demikian rasio tenaga Teknik Biomedik sebesar 4,95 per 100.000 penduduk.

Selama tahun 2020 sampai dengan 2024 perkembangan kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan per 1000 penduduk di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai (RSUD Kota Dumai dan Puskesmas se Kota Dumai) menunjukkan peningkatan dari 3,71 per 1000 penduduk pada tahun 2020 menjadi 4,73 per 1000 penduduk pada tahun 2024, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022. Namun demikian, angka pencapaian kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan per 1000 penduduk tersebut belum mencapai target Renstra.

Grafik 2.2 Perkembangan Kepadatan dan Distrubusi Tenaga Kesehatan Per 1000 penduduk di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah (RSUD Kota Dumai dan Puskesmas se Kota Dumai) Tahun 2020-2024



Tabel 2.20 Rasio dan Jumlah Tenaga Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Dumai (RSUD dan Puskesmas) Per 100.000 Penduduk Berdasarkan Target Renstra dan Pencapaian Tahun 2024

No	Uraian Tenaga Kesehatan	Target Renstra 2024		Pencapaian 2024		Keterangan
		Rasio per 100.000 penduduk	Jumlah	Rasio per 100.000 penduduk	Jumlah	
1.	Dokter Spesialis	16,50	57	13,68	47	Belum mencapai target renstra
2.	Dokter Umum	64	220	34,63	119	Belum mencapai target renstra
3.	Dokter Gigi	17,50	60	5,24	18	Belum mencapai target renstra
4.	Perawat	158	543	171,71	590	Sudah melebihi target renstra
5.	Bidan	168	577	139,99	481	Belum mencapai target renstra
6.	Apoteker	18,50	64	9,60	33	Belum mencapai target renstra
7.	Asisten Apoteker	15,50	53	15,43	53	Sudah mencapai target rebstra
8.	Gizi	13,50	46	12,22	42	Belum mencapai target renstra
9.	Kesehatan Lingkungan	5,60	19	5,82	20	Sudah melebihi target renstra
10.	Kesehatan Masyarakat	15	52	19,21	66	Sudah melebihi target renstra
11.	Ahli Laboratorium Medik	20,60	71	17,17	59	Belum mencapai target renstra
12.	Teknisi Medis	15,50	53	18,3	64	Sudah melebihi target renstra
13.	Teknik Biomedik	8,60	30	4,95	17	Belum mencapai target renstra
14.	Keterampilan Fisik	4,80	16	4,37	15	Belum mencapai target renstra

Dari tabel di atas terlihat tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai (Puskesmas dan RSUD Kota Dumai) yang belum mencapai target Renstra Tahun 2024 baik jumlah dan rasio adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, apoteker, gizi, ahli laboratorium medik, teknik biomedik dan keterampilan fisik. Tenaga kesehatan yang sudah mencapai target Renstra Tahun 2024 baik jumlah dan rasio adalah asisten apoteker. Sedangkan tenaga kesehatan yang sudah melebihi target Renstra Tahun 2024 baik jumlah dan rasio adalah perawat, kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan teknisi medis.

2.1.3 Kinerja Pelayanan

1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020-2024

Tujuan pembangunan jangka menengah Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai tahun 2020 s/d 2024 adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pencapaian tujuan Dinas Kesehatan Kota Dumai tersebut ditunjukkan melalui pencapaian indikator Indeks Kesehatan. Perkembangan pencapaian Indeks Kesehatan Kota Dumai dari tahun 2020 s/d 2024 cenderung statis dan mulai sedikit meningkat pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2024, pencapaian Indeks Kesehatan Kota Dumai adalah sebesar 0,780. Perkembangan persentase capaian kinerja Indeks Kesehatan Kota Dumai dari tahun 2020 s/d 2024 cenderung statis dan mulai sedikit meningkat pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024 persentase capaian kinerja Indeks Kesehatan Kota Dumai adalah sebesar 98,73%.

Tabel 2.21 Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target, Realisasi dan Persentase Pencapaian Indikator Kinerja														
					2020			2021			2022			2023			2024		
					Target	Realisasi	% Pencapaian	Target	Realisasi	% Pencapaian	Target	Realisasi	% Pencapaian	Target	Realisasi	% Pencapaian	Target	Realisasi	% Pencapaian
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan			0,79	0,77	97,47	0,79	0,77	97,47	0,785	0,771	98,22	0,789-0,790	0,778	98,61	0,790-0,791	0,780	98,73
			1 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,04	70,93	99,85	71,04	70,98	99,92	71,10	71,25	100,00	71,29-71,33	71,67	100,00	71,34-71,37	71,78	100,00
			2 Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Kota Dumai	90	85,52	95,02	92	87,55	95,16	92,2	95,8	100,00	97	100,02	100,00	100	99,39	99,39

Pencapaian Sasaran Strategis 1 yakni meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), terlihat perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Dumai dari tahun 2020 s/d 2024 cenderung meningkat dari 70,93 tahun pada tahun 2020 menjadi 71,78 tahun pada tahun 2024. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai tahun 2021 s/d 2026, maka persentase capaian Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Dumai telah melampaui target pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 (100%).

Sedangkan untuk Pencapaian Sasaran Strategis 2 yakni meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang ditunjukan dengan indikator Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terlihat perkembangan cakupan JKN di Kota Dumai dari tahun 2020 s/d 2024 cenderung meningkat dari 85.52% pada tahun 2020 menjadi 99,39% pada tahun 2024. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai tahun 2021 s/d 2026, maka persentase capaian cakupan JKN di Kota Dumai cenderung meningkat, bahkan telah mencapai 100% pada tahun 2022 dan 2023, kecuali pada tahun 2024 persentase capaian cakupan JKN di Kota Dumai mengalami sedikit penurunan.

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020 s/d 2024

Tabel 2.22 Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020 s/d 2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Angka Kematian Bayi	IKU	IKK	SDG's Renstra Kes	19 per 1.000 KH	18 per 1.000 KH	17,5 per 1.000 KH	17 per 1.000 KH	8 per 1.000 KH	7,35 per 1.000 KH	8,26 per 1.000 KH	9,96 per 1.000 KH	11,36 per 1.000 KH	9,33 per 1.000 KH	100%	100%	100%	100%	83,35%
2	Angka Kematian Balita	IKU	IKK	SDG's Renstra Kes	26 per 1.000 KH	25 per 1.000 KH	24,5 per 1.000 KH	24 per 1.000 KH	11 per 1.000 KH	8,81 per 1.000 KH	9,82 per 1.000 KH	11,13 per 1.000 KH	13,42 per 1.000 KH	11,53 per 1.000 KH	100%	100%	100%	100%	95,15%
3	Angka Kematian Ibu	IKU	IKK	SDG's Renstra Kes	102 per 100.000 KH	102 per 100.000 KH	101,5 per 100.000 KH	101 per 100.000 KH	100,5 per 100.000 KH	36,73 per 100.000 KH	263,41 per 100.000 KH	58,56 per 100.000 KH	103,23 per 100.000 KH	73,40 per 100.000 KH	100%	-58,25%	100%	97,79%	100%
4	Angka Harapan Hidup Waktu Lahir (Umur Harapan Hidup)	IKU	-	RPJMD Renstra Kes	71,04 tahun	71,04 tahun	71,10 tahun	71,17-29-71,33 tahun	71,34-71,39 tahun	70,93 tahun	70,98 tahun	71,25 tahun	71,67 tahun	71,78 tahun	99,85%	99,92%	100%	100%	100%
5	Angka Kesakitan Malaria	IKU	IKK	SDG's Renstra Kes	1 per 1.000 penduduk	1 per 1.000 penduduk	0,9 per 1.000 penduduk	0,8 per 1.000 penduduk	0,1 per 1.000 penduduk	0,01 per 1.000 penduduk	0,003 per 1.000 penduduk	0,02 per 1.000 penduduk	0,01 per 1.000 penduduk	0,025 per 1.000 penduduk	100%	100%	100%	100%	100%
6	Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + Terhadap Penduduk Bersiko	IKU	IKK	Renstra Kes	88%	88%	88%	88%	88%	66,57%	9,35%	41,42%	72,00%	71,57%	75,65%	10,63%	47,07%	81,82%	81,33%
7	Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Bersiko	IKU	-	Renstra Kes	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	2,03%	0,17%	0,16%	0,18%	0,19%	-3%	100%	100%	100%	100%
8	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	IKU	IKK	SDG's Renstra Kes	55 per 100.000 penduduk	55 per 100.000 penduduk	55 per 100.000 penduduk	55 per 100.000 penduduk	55 per 100.000 penduduk	114,27 per 100.000 penduduk	15,56 per 100.000 penduduk	56,64 per 100.000 penduduk	198,03 per 100.000 penduduk	229,34 per 100.000 penduduk	-7,76%	100%	97,02%	-160,06%	-224,70%
9	Persentase Balita dengan Gizi Buruk	IKU	-	Renstra Kes	2%	1%	1%	1%	1%	0,01%	0,03%	0,12%	0,07%	0,10%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase Balita dengan Gizi Kurang	IKU	IKK	SDG's Renstra Kes	5%	3%	3%	3%	2%	0,41%	0,38%	0,69%	1,10%	1,62%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	IKU	-	RPJMD SDG's Renstra Kes	90%	92%	92,2%	97,0%	100%	85,52%	87,55%	95,80%	100,02%	99,39%	95,02%	95,16%	100%	100%	99,39%

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan kesehatan diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Ada 11 indikator yang ditetapkan sebagai indikator Indikator Kinerja Utama (IKU) bidang kesehatan yang harus dicapai mulai tahun 2020 s/d 2024, sebagai berikut:

1. Angka Kematian Bayi

Kematian perinatal merupakan kematian bayi dengan umur kehamilan lebih dari 22 minggu yang lahir dalam keadaan meninggal dalam masa tujuh hari setelah persalinan. Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal.

Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Dumai dari tahun 2016 s/d 2020 berfluktuasi. Selama tahun 2020 s/d 2024 Angka Kematian Bayi cenderung meningkat dari 7,35 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2020 menjadi 11,36 per 1.000 kelahiran pada tahun 2023. Akan tetapi, pada tahun 2024 Angka Kematian Bayi mengalami penurunan menjadi 9,33 per 1.000 kelahiran hidup. Meskipun mengalami penurunan, pencapaian Angka Kematian Bayi tersebut telah melebihi target Renstra tahun 2024 yakni sebesar 8 per 1.000 Kelahiran Hidup. Penyebab kematian bayi didominasi oleh kasus Asfiksia dan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).

Grafik 2.3 Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2024



Perkembangan kasus kematian bayi di Kota Dumai selama tahun 2020-2024 adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2.23
Perkembangan Kasus Kematian Bayi di Kota Dumai Selama Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kelahiran Hidup	Kelahiran Hidup	8.168	8.352	8.538	8.718	9.537
2	Kematian Absolut	Bayi	60	69	85	99	89
3	Angka Kematian Bayi	per 1.000 Kelahiran Hidup	7,35	8,26	9,96	11,36	9,33

Berdasarkan kecamatan, kasus kematian bayi banyak terjadi di kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Bukit Kapur. Perkembangan kasus kematian bayi di Kota Dumai selama tahun 2020-2024 berdasarkan kecamatan adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2.24
Perkembangan Kasus Kematian Bayi di Kota Dumai Berdasarkan Kecamatan Selama Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH
1	Dumai Kota	8		5		8		12		15	
2	Dumai Timur	8		12		13		21		17	
3	Dumai Selatan	10		15		22		14		16	
4	Dumai Barat	10		9		16		12		12	
5	Bukit Kapur	10		13		15		21		10	
6	Sungai Sembilan	11		9		8		16		10	
7	Medang Kampai	3		6		3		3		9	
	Kota Dumai	60	7,35	69	8,26	85	9,96	99	11,36	89	9,33

Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Angka Kematian Bayi adalah sebagai berikut:

- Merupakan komitmen global (SDG's), komitmen Nasional, Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Dumai karena merupakan prioritas dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi dan RPJMD Kota Dumai
- Inovasi oleh puskesmas, rumah sakit dan Dinas Kesehatan dalam pengelolaan pelayanan kesehatan bayi.
- Tersedianya pelayanan ambulance PSC gratis dan pelayanan OPLET SIPAI di Kota Dumai serta rumah tunggu di Mess Pemko Dumai di Pekan Baru.

Faktor penghambat capaian indikator Angka Kematian Bayi adalah sebagai berikut:

- Puskesmas yang ada di Kota Dumai belum merupakan puskesmas PONEB
- Belum optimalnya pelayanan PONEK di RSUD Kota Dumai karena keterbatasan sarana dan prasarana
- Keterlambatan identifikasi komplikasi pada pertumbuhan dan perkembangan janin dan rendahnya pengetahuan keluarga dalam perawatan bayi baru lahir
- Kemampuan tenaga kesehatan yang tidak merata di fasilitas pelayanan kesehatan primer dalam penanganan kegawatdaruratan neonatal

2. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak umur kurang dari 5 tahun per 1.000 penduduk. Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi.

Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Dumai dari tahun 2020 s/d 2023 menunjukkan kecenderungan meningkat dari 8,81 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2020 menjadi 13,42 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2023. Akan tetapi, pada tahun 2024 Angka Kematian Balita mengalami penurunan menjadi 11,53 per 1.000 kelahiran hidup. Meskipun mengalami penurunan, pencapaian Angka Kematian Balita tersebut telah melebihi target Renstra tahun 2024 yakni sebesar 11 per 1.000 Kelahiran Hidup. Penyebab kematian pada balita sebagian besar disebabkan Asfiksia dan BBLR (Berat Bayi lahir Rendah).

Grafik 2.4 Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2024



Perkembangan kasus kematian balita di Kota Dumai selama tahun 2020-2024 adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2.25
Perkembangan Kasus Kematian Balita di Kota Dumai Selama Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kelahiran Hidup	Kelahiran Hidup	8.168	8.352	8.538	8.718	9.537
2	Kematian Absolut	Balita	72	82	95	117	110
3	Angka Kematian Balita	per 1.000 Kelahiran Hidup	8,81	9,82	11,13	13,42	11,53

Berdasarkan kecamatan, kasus kematian balita banyak terjadi di kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Bukit Kapur. Perkembangan kasus kematian balita di Kota Dumai selama tahun 2020-2024 berdasarkan kecamatan adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2.26
Perkembangan Kasus Kematian Balita di Kota Dumai Berdasarkan Kecamatan Selama Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH
1	Dumai Kota	9		7		8		17		16	
2	Dumai Timur	10		13		15		24		23	
3	Dumai Selatan	12		18		22		16		19	
4	Dumai Barat	12		10		20		17		16	
5	Bukit Kapur	13		16		17		23		15	
6	Sungai Sembilan	13		11		9		16		11	
7	Medang Kampai	3		7		4		4		10	
	Kota Dumai	72	8,81	82	9,82	95	11,13	117	13,42	110	11,53

Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Angka Kematian Balita kurang dari target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Merupakan komitmen global (SDG's), komitmen Nasional, Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Dumai karena merupakan prioritas dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi dan RPJMD Kota Dumai
- Inovasi oleh puskesmas, rumah sakit dan Dinas Kesehatan dalam pengelolaan pelayanan kesehatan balita.

- c. Tersedianya pelayanan ambulance PSC gratis dan pelayanan OPLET SIPAI di Kota Dumai serta rumah tunggu di Mess Pemko Dumai di Pekan Baru.

Faktor penghambat capaian indikator Angka Kematian Balita adalah sebagai berikut:

- a. Masih belum kuatnya komitmen masyarakat seperti masih ada ibu yang enggan membawa anaknya ke posyandu untuk dilakukan pemantauan tumbuh kembang balitanya dan masih ada ketua RT yang tidak mendukung kegiatan posyandu.
- b. Kemampuan tenaga kesehatan yang tidak merata di fasilitas pelayanan kesehatan primer dalam penanganan pelayanan kesehatan balita

3. Angka Kematian Ibu Melahirkan

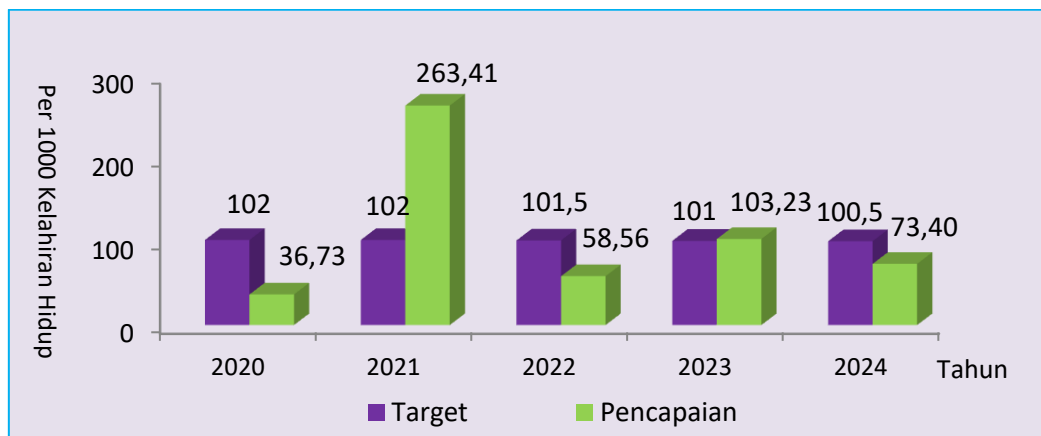
Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan maupun penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan, per 100.000 kelahiran hidup. AKI diperhitungkan pula pada jangka waktu 6 minggu hingga setahun setelah melahirkan. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memantau kematian terkait dengan kehamilan.

AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan ibu dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Hal tersebut disebabkan antara lain kurangnya pemahaman ibu hamil tentang resiko yang terkait dengan kehamilan seperti 4 Terlalu (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Sering dan dan jarak Terlalu Dekat) dan juga 3 Terlambat (Terlambat mengambil keputusan di tingkat keluarga, terlambat merujuk, dan terlambat mendapat pelayanan di fasilitas rujukan). Penyebab langsung kematian ibu antara lain: *eklamsi*, pendarahan, *partus macet*, infeksi, *abortus* dan lain-lain. Penyebab tidak langsung antara lain: penyakit infeksi seperti malaria, *thypoid* serta penyakit kronis seperti penyakit jantung, penyakit gula dan penyakit lainnya.

Angka kematian ibu melahirkan berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas.

Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kota Dumai dari tahun 2020 s/d 2024 berfluktuasi mengalami naik turun dari 36,73 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020 naik menjadi 73,40 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024. Pencapaian Angka Kematian Ibu tertinggi terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 263,41 per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2023 yakni sebesar 103,23 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun tersebut pencapaian Angka Kematian Ibu telah melebihi target Kota Dumai (yang berarti tingkat pencapaiannya kurang baik). Penyebab kematian ibu di Kota Dumai pada umumnya karena perdarahan, hipertensi (eklamsi) dan gangguan jantung & pembuluh darah. Berdasarkan kelompok umur, pada umumnya kematian ibu terjadi pada kelompok umur 20-35 tahun. Sedangkan berdasarkan jenis kematian ibu, sebagian besar kematian ibu adalah kematian ibu nifas. Lebih lanjut, sebagian besar kematian ibu merupakan kasus rujukan yang meninggal di RSUD Kota Dumai.

Grafik 2.5 Pencapaian Angka Kematian Ibu di Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2024



Perkembangan kasus kematian ibu di Kota Dumai selama tahun 2020-2024 adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2.27
Perkembangan Kasus Kematian Ibu di Kota Dumai Selama Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kelahiran Hidup	Kelahiran Hidup	8.168	8.352	8.538	8.718	9.537
2	Kematian Absolut	Ibu	3	22	5	9	7
3	Angka Kematian Ibu	per 1.00.000 Kelahiran Hidup	36,73	263,41	58,56	103,23	73,40

Berdasarkan kecamatan, kasus kematian ibu banyak terjadi di kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Bukit Kapur dan Kecamatan Sungai Sembilan. Perkembangan kasus kematian balita di Kota Dumai selama tahun 2020-2024 berdasarkan kecamatan adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2.28
Perkembangan Kasus Kematian Ibu di Kota Dumai Berdasarkan Kecamatan Selama Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Absolut	/100.000 KH	Absolut	/100.000 KH	Absolut	/100.000 KH	Absolut	/100.000 KH	Absolut	/100.000 KH
1	Dumai Kota	1		2		0		0		1	
2	Dumai Timur	0		5		1		3		0	
3	Dumai Selatan	0		2		1		2		1	
4	Dumai Barat	0		3		1		1		1	
5	Bukit Kapur	1		6		0		0		0	
6	Sungai Sembilan	0		0		1		3		3	
7	Medang Kampai	1		4		1		0		1	
	Kota Dumai	3	36,73	22	263,41	5	58,56	9	103,23	7	73,40

Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Angka Kematian Ibu adalah sebagai berikut:

- Merupakan komitmen global (SDG's), komitmen Nasional, Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Dumai karena merupakan prioritas dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi dan RPJMD Kota Dumai
- Inovasi oleh puskesmas, rumah sakit dan Dinas Kesehatan dalam pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil hingga ibu nifas.
- Tersedianya pelayanan ambulance PSC gratis dan pelayanan OPLET SIPAI di Kota Dumai serta rumah tunggu di Mess Pemko Dumai di Pekan Baru.

Faktor penghambat capaian indikator Angka Kematian Ibu adalah sebagai berikut:

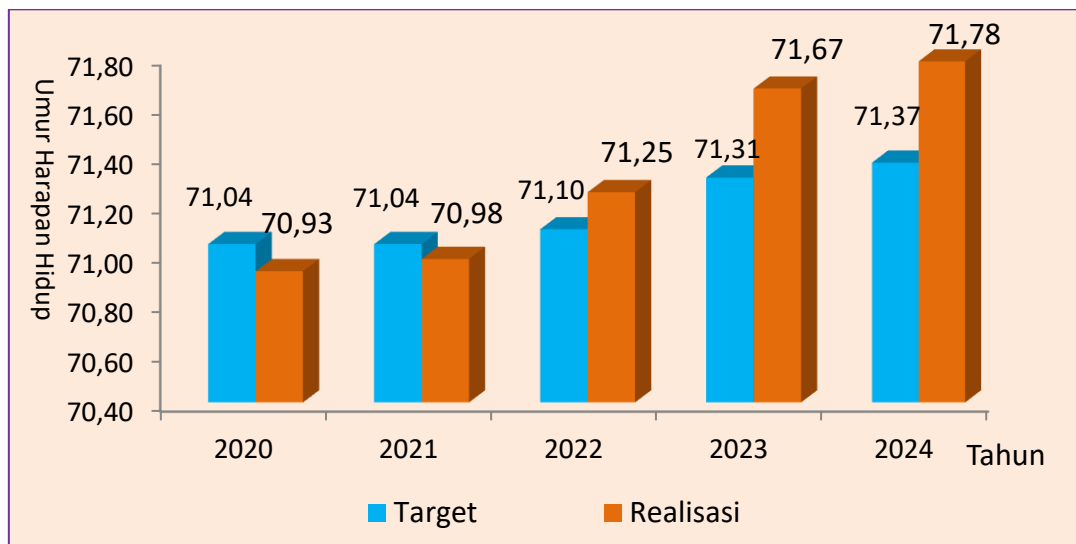
- Jumlah tenaga kesehatan yang menangani kesehatan ibu khususnya bidan sudah relatif tersebar ke seluruh wilayah Kota Dumai, namun kompetensi masih belum memadai.
- Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) ibu pada masa kehamilan dan persalinan serta adanya keterlambatan dalam mengambil keputusan, keterlambatan dalam mengidentifikasi faktor resiko dan kegawatdaruratan maternal

- c. Masih belum optimalnya pelaksanaan rujukan kasus maternal resti dan komplikasi
- d. Puskesmas yang ada belum merupakan puskesmas PONED
- e. Belum optimalnya kualitas pelayanan kegawat daruratan PONEK di RSUD Kota Dumai karena terbatasnya kuantitas dan kualitas/kompetensi serta terbatasnya kapasitas tempat tidur ruang kebidanan sehingga tidak semua rujukan kasus maternal resti dan komplikasi dapat ditangani.

4. Umur Harapan Hidup

Perkembangan Pencapaian Umur Harapan Hidup Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan peningkatan seperti terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.6
Pencapaian Umur Harapan Hidup Kota Dumai
dari Tahun 2020 sampai dengan 2024



Namun bila dibandingkan dengan pencapaian Umur Harapan Hidup Provinsi Riau dan pencapaian Umur Harapan Hidup Indonesia dari tahun 2020 s/d 2024 terlihat capaian Umur Harapan Hidup Kota Dumai masih di bawah angka Provinsi Riau dan angka Nasional, seperti tabel berikut:

Tabel 2.29 Umur Harapan Hidup (UHH) di Indonesia, Provinsi Riau dan Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2024

No	Tahun	Indonesia	Provinsi Riau	Kota Dumai
1.	2020	71,47	71,60	70,93
2.	2021	71.57	71.67	70.98
3.	2022	71.85	71.95	71.25
4.	2023	73.93	72.24	71.67
5.	2024	74,15	72,52	71,78

Sumber : Badan Pusat Statistik Pusat Tahun 2025

5. Angka Kesakitan Malaria (API)

Penyakit malaria masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang dapat menyebabkan kematian terutama pada kelompok risiko tinggi yaitu bayi, anak balita, ibu hamil, selain itu malaria secara langsung menurunkan produktivitas kerja. Penyakit malaria adalah penyakit mudah menular yang dapat menimbulkan kematian dan Kejadian Luar Biasa (KLB). Penyakit ini menyerang semua golongan umur. Secara alamiah penyakit malaria ditularkan melalui nyamuk anopheles dan juga dapat melalui transfusi darah serta pada bayi melalui tali pusat pada waktu hamil. Upaya untuk menekan angka kesakitan dan kematian dilakukan melalui program pemberantasan Malaria pada daerah eliminasi yang kegiatannya antara lain meliputi : surveilans Malaria, supervisi dan pengendalian vektor, yang kesemuanya ditujukan untuk memutuskan mata rantai penularan malaria. Keberhasilan penanggulangan Malaria diukur dengan indikator Annual Parasite Incidence (API) dengan nilai $< 1\%$. Mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia, daerah endemis Malaria dibagi menjadi :

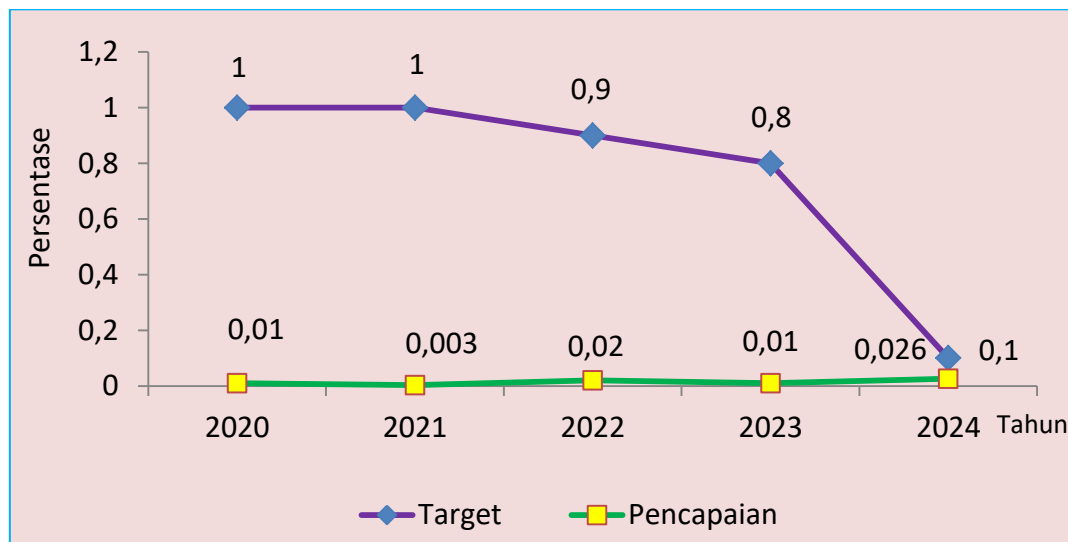
- Endemis tinggi adalah API > 5 per 1.000 penduduk
- Endemis sedang adalah API berkisar antara 1- < 5 per 1.000 penduduk
- Endemis rendah adalah API 0-1 per 1.000 penduduk
- Non endemis adalah yang tidak terdapat penularan Malaria API = 0

Untuk daerah dengan pencapaian API < 1 per 1.000 penduduk statusnya adalah bebas Malaria. Pencapaian API Kota Dumai dari tahun 2020-2024 berkisar antara 0.003 sd 0.01 per 1.000 penduduk sehingga Kota Dumai masuk dalam

kategori endemis rendah Malaria dan berstatus bebas Malaria. Atas keberhasilan Kota Dumai dalam menurunkan kasus Malaria, pada tahun 2014 Menteri Kesehatan RI memberikan sertifikat eliminasi Malaria kepada Pemerintah Kota Dumai.

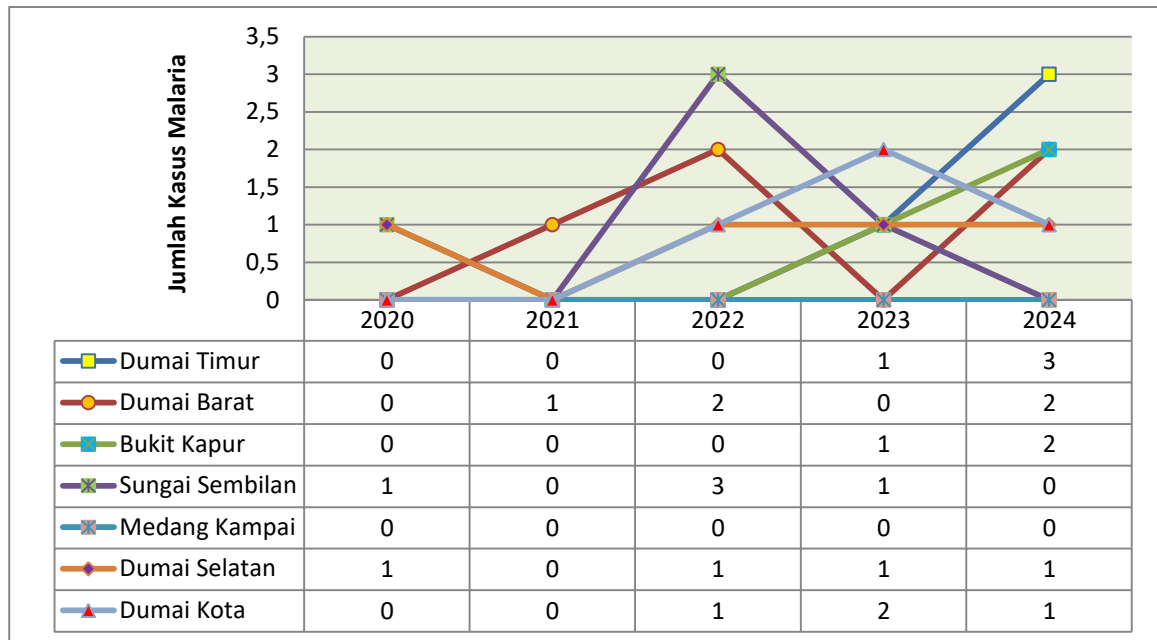
Meskipun Kota Dumai telah eliminasi Malaria, selama tahun 2020-2024 masih ada ditemukan kasus malaria yang merupakan kasus import, dengan kecendrungan penemuan kasus malaria meningkat dari 2 kasus pada tahun 2020 menjadi 9 kasus pada tahun 2024. Perkembangan Angka Kesakitan Malaria (API) di Kota Dumai dari tahun 2020 s/d 2024 berfluktuasi dan cenderung meningkat. Akan tetapi, bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai dari tahun 2020 s/d 2024, maka pencapaian *Annual Parasite Incidence* (API) masih di bawah target. Seluruh penderita Malaria (100%) telah mendapat pengobatan standar di puskesmas. Pencapaian tersebut dapat dilihat dari grafik berikut ini:

Grafik 2.7 Pencapaian Angka Kesakitan Malaria (API)
Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2024



Berdasarkan kecamatan, kasus Malaria ditemukan di Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Bukit Kapur. Perkembangan kasus Malaria per kecamatan selama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.8 Perkembangan Kasus Malaria Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2020 – 2024



Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Angka Kesakitan Malaria adalah sebagai berikut:

- Adanya komitmen global (SDG's), komitmen Pusat maupun Provinsi Riau terkait eliminasi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) yang merupakan salah satu sasaran prioritas dalam RPJMN 2020-2024 .
- Kondisi dan situasi kehidupan di masyarakat pasca pandemic COVID 19 mulai berangsur normal, sehingga masyarakat sudah mau berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kesehatannya.
- Kota Dumai termasuk daerah endemis malaria dan berstatus bebas Malaria. Sejak tahun 2014 Kota Dumai dinyatakan telah eliminasi Malaria oleh Kementerian Kesehatan RI

Faktor penghambat capaian indikator Angka Kesakitan Malaria adalah sebagai berikut:

- Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya penduduk dan tingginya mobilitas penduduk dari dan keluar Kota Dumai
- Tingginya tingkat kepadatan penduduk di wilayah perkotaan
- Faktor perilaku masyarakat yang belum melaksanakan PHBS dan rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk

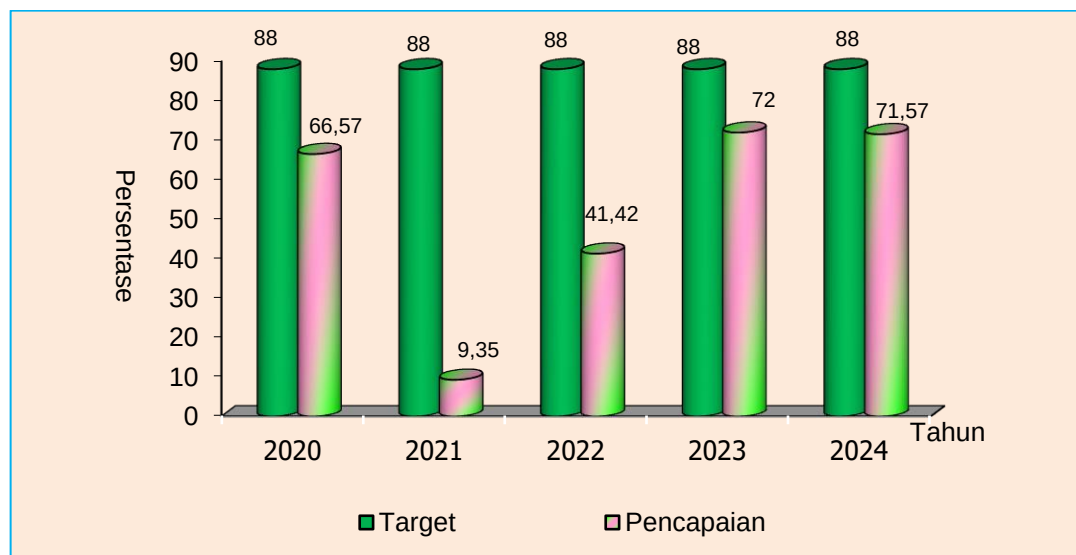
- d. Sebagian besar penduduk Kota Dumai masih menggunakan bak/drum sebagai tempat penampungan air.
- e. Belum tersedianya sarana dan prasarana sanitasi dan sarana air bersih yang layak dan memadai di Kota Dumai

6. Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +

Tuberkulosis (TBC) saat ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat baik di Indonesia maupun internasional sehingga menjadi salah satu tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs). Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Indonesia merupakan negara ke-2 tertinggi penderita tuberkulosis.

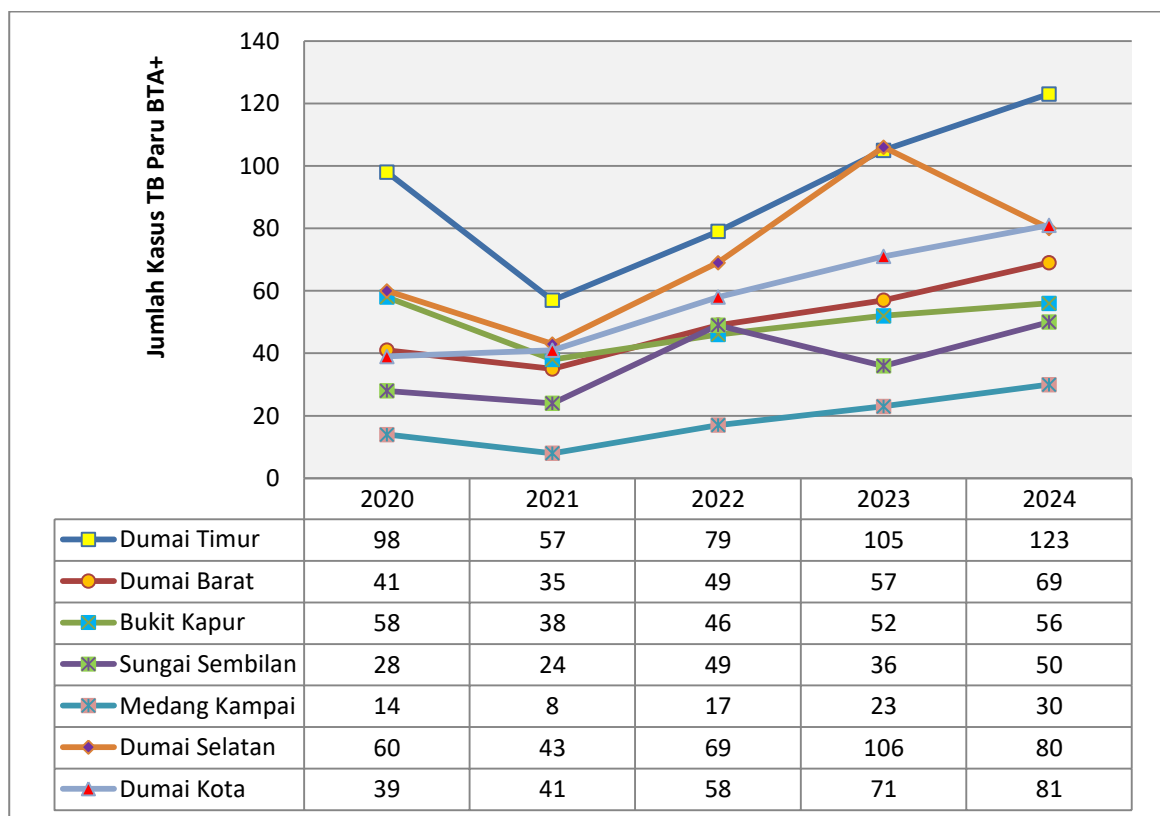
Perkembangan Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + di Kota Dumai dari tahun 2020 s/d 2024 berfluktuasi. Pada tahun 2020 Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + sebesar 66,57% meningkat menjadi 71,57% pada tahun 2024. Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + Kota Dumai mencapai angka terendah pada tahun 2021 yakni sebesar 9,35% sebagai dampak pandemic COVID 19. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2020 s/d 2024 yakni 88%, maka pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + di Kota Dumai ini masih di bawah target. Pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat dari grafik berikut ini :

Grafik 2.8 Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2024



Berdasarkan kecamatan, kasus TB Paru BTA+ banyak terjadi di daerah perkotaan yakni di Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Kota dan Kecamatan Dumai Barat. Tingginya kasus TB Paru BTA+ di 4 (empat) kecamatan tersebut disebabkan ke empat kecamatan tersebut merupakan kecamatan dengan padat penduduk yang memudahkan penularan penyakit TB Paru BTA+. Kasus Kasus TB Paru BTA+ per kecamatan selama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.10 Perkembangan Kasus TB Paru BTA+ Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2020 – 2024



Faktor pendukung/pendorong capaian indikator angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + adalah sebagai berikut:

- Adanya komitmen global (SDG's), komitmen Pusat maupun Provinsi Riau terkait eliminasi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) yang merupakan salah satu sasaran prioritas dalam RPJMN 2020-2024 dan merupakan indikator SPM.
- Kondisi dan situasi kehidupan di masyarakat pasca pandemic COVID 19 mulai berangsur normal, sehingga masyarakat sudah mau berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kesehatannya.

- c. Adanya dukungan anggaran dari Pusat melalui APBN (dana transfer) yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik berupa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

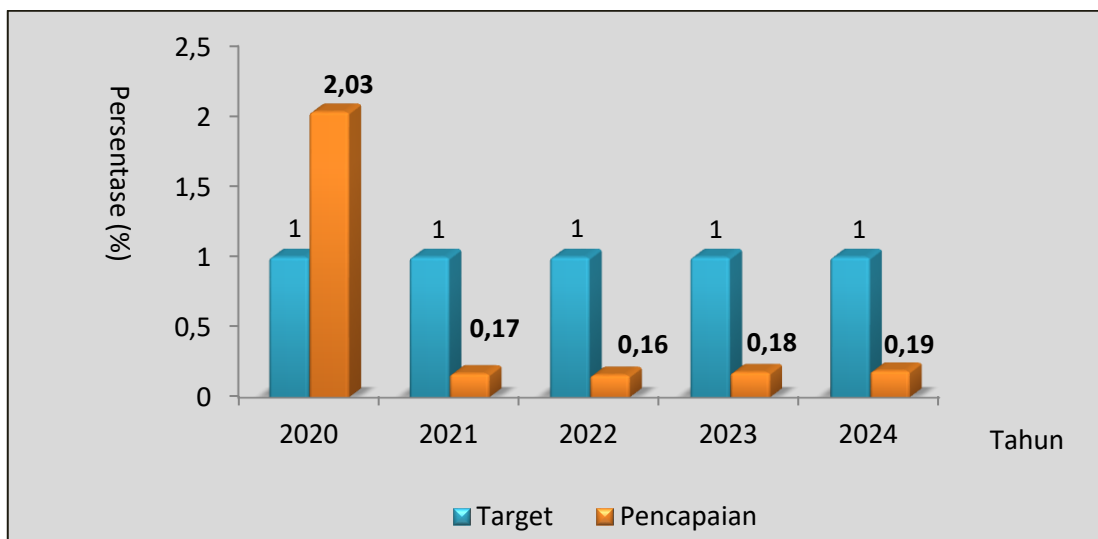
Faktor penghambat capaian indikator angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + adalah sebagai berikut:

- a. Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya penduduk dan tingginya mobilitas penduduk dari dan keluar Kota Dumai
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya ke fasilitas pelayanan kesehatan
- c. Masih rendahnya tingkat kepatuhan penderita TB Paru selama masa pengobatan dengan OAT selama 6 bulan
- d. Masih belum optimalnya petugas TB puskesmas melakukan follow up langsung kepada pasien

7. Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko

Perkembangan pencapaian Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 berfluktuasi dan cenderung meningkat seperti terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.11 Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2024

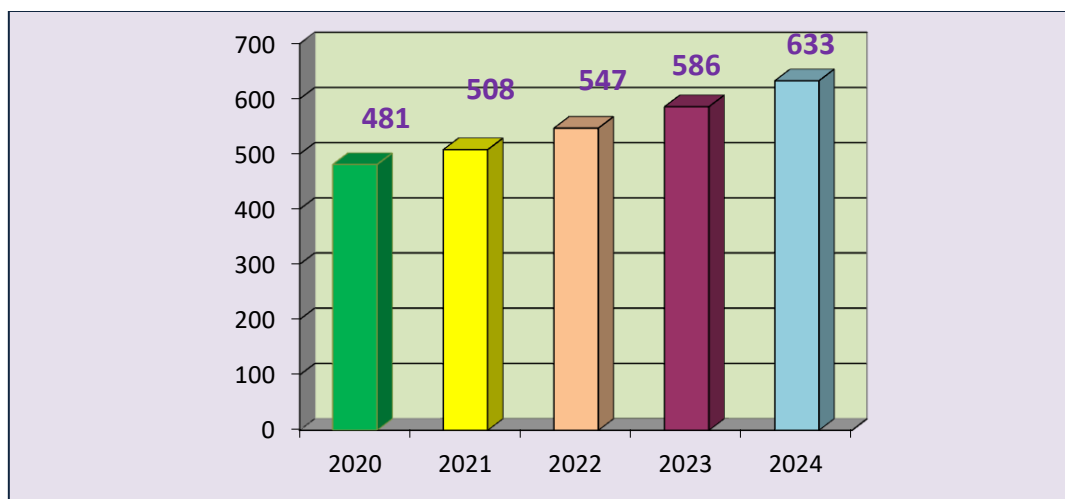


Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2020 s/d 2024 yakni < 1%, maka pencapaian Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk

Beresiko di Kota Dumai ini sejak tahun 2021-2024 masih di bawah target Kota Dumai kecuali tahun 2020.

Sampai dengan tahun 2024 kumulatif kasus HIV yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 633 kasus. HIV-AIDS merupakan fenomena gunung es, artinya kasus yang ditemukan saat ini hanya sebagian kecil, belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Melihat potensi Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing, serta mobilisasi penduduk dari dan ke kabupaten/kota yang memiliki angka prevalensi HIV/AIDS cukup tinggi seperti Kota Batam, Tanjung Balai Karimun, serta Kepulauan Riau, maka tidak tertutup besar kemungkinannya penyakit HIV/AIDS akan bertambah dan tetap menjadi permasalahan di Kota Dumai.

Grafik 2.12 Data Kumulatif Kasus HIV Kota Dumai Dari Tahun 2020 s/d 2024



Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko adalah sebagai berikut:

- Adanya komitmen global (SDG's), komitmen Pusat maupun Provinsi Riau terkait eliminasi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) yang merupakan salah satu sasaran prioritas dalam RPJMN 2020-2024 dan merupakan indikator SPM.
- Kondisi dan situasi kehidupan di masyarakat pasca pandemic COVID 19 mulai berangsur normal, sehingga masyarakat sudah mau berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kesehatannya.
- Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Dumai sudah kembali aktif pada tahun 2023 dengan dukungan dana Hibah dari Pemerintah Kota Dumai

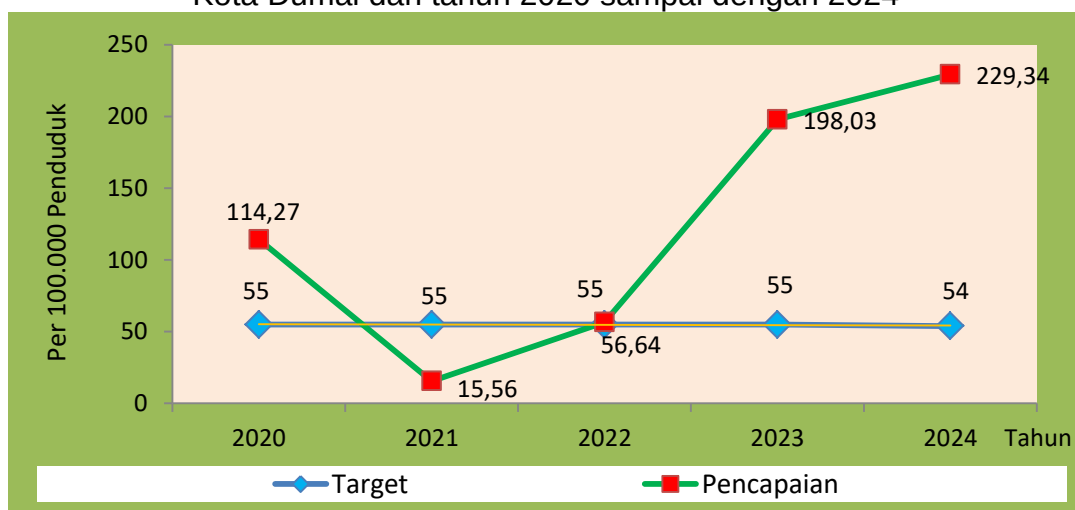
Faktor penghambat capaian indikator Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko adalah sebagai berikut:

- Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya penduduk dan tingginya mobilitas penduduk dari dan keluar Kota Dumai
- Adanya dogma di masyarakat terhadap penderita HIV/AIDS sehingga mereka dikucilkan
- Masih minimnya anggaran untuk penanganan HIV/AIDS di Kota Dumai sehingga penanganan HIV/AIDS belum optimal
- Masih ada beberapa pengusaha tempat-tempat hiburan dan hotel/penginapan yang tidak mengizinkan petugas kesehatan untuk melakukan skrining pemeriksaan HIV/AIDS di tempat usahanya

h. Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)

Kota Dumai merupakan daerah endemis Demam Berdarah Dengue (DBD). Perkembangan Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Dumai dari tahun 2020 s/d 2024 berfluktuasi dan cenderung meningkat. Pencapaian Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) tertinggi terjadi pada tahun 2024 yakni sebesar 229,34 per 100.000 penduduk, pada tahun 2023 yakni sebesar 198,03 per 100.000 penduduk dan pada tahun 2020 yakni sebesar 114,27 per 100.000 penduduk. Pada tahun tersebut pencapaian Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) telah melebihi target Kota Dumai Pencapaian angka Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat dari grafik berikut ini:

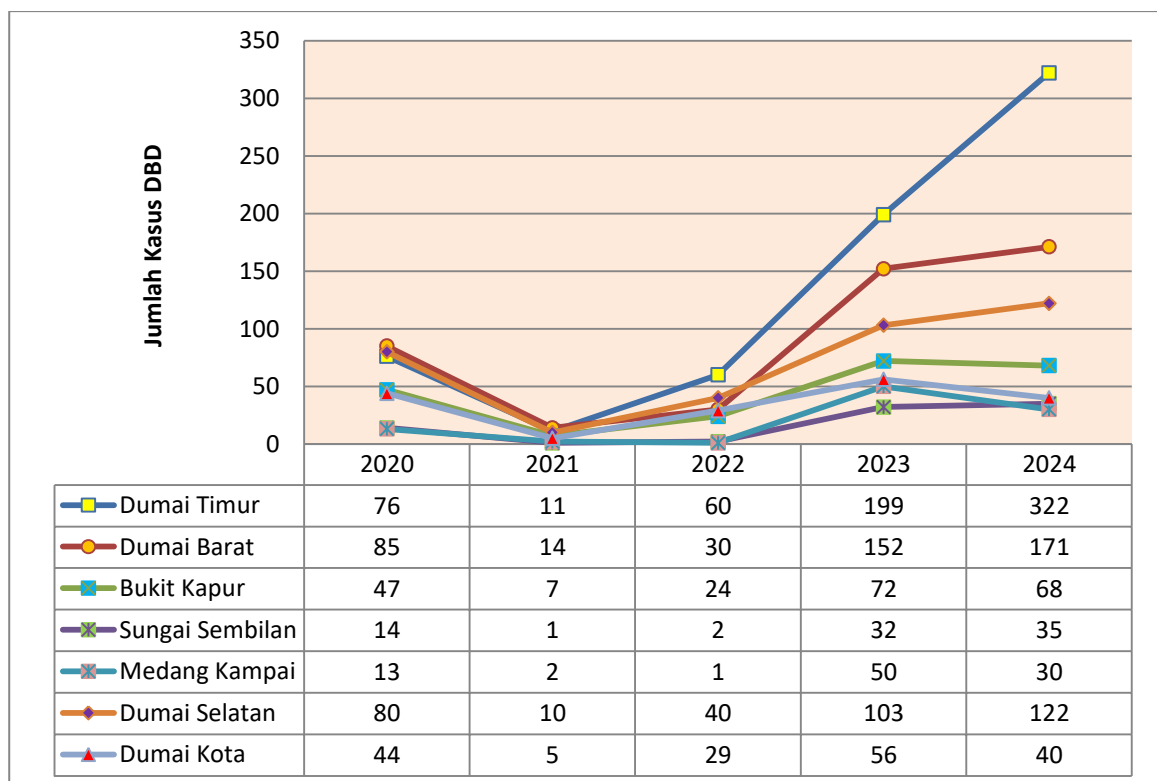
Grafik 2.13 Pencapaian Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2024



Masih tingginya angka kesakitan DBD terutama disebabkan oleh faktor perilaku, lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat yang masih mendukung sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk vektor DBD seperti $\pm 80\%$ penduduk Dumai masih menggunakan bak-bak penampung air hujan (PAH) dalam memenuhi kebutuhan air bersih, serta tingginya mobilitas penduduk. Di samping itu, dampak dari global warming juga memicu meningkatnya angka kesakitan DBD. Dari hasil pengamatan data jumlah kasus DBD dalam kurun waktu tertentu menunjukkan grafik naik turun. Berdasarkan pengamatan tersebut, ada suatu masa yang menunjukkan pola jumlah kasus DBD yang lebih tinggi di banding waktu-waktu lainnya, yang biasanya muncul setiap lima tahun. Inilah yang kemudian di sebut dengan siklus lima tahunan DBD.

Berdasarkan kecamatan, kasus DBD banyak ditemukan di Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Selatan dan Kecamatan Bukit Kapur. Perkembangan Kasus DBD per kecamatan selama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafikl 2.14 Perkembangan Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2020 – 2024



Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi dan situasi kehidupan di masyarakat pasca pandemic COVID 19 mulai berangsur normal, sehingga masyarakat sudah mau berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kesehatannya.

Faktor penghambat capaian indikator Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue adalah sebagai berikut:

- a. Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya penduduk dan tingginya mobilitas penduduk dari dan keluar Kota Dumai
- b. Faktor iklim, yakni perubahan cuaca yang ekstrim yang berakibat adanya banjir dan Kota Dumai merupakan daerah endemis DBD
- c. Tingginya tingkat kepadatan penduduk di wilayah perkotaan
- d. Faktor perilaku masyarakat yang belum melaksanakan PHBS dan rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk serta adanya paradigma di masyarakat dalam pencegahan DBD masih berorientasi pada fogging
- e. Sebagian masyarakat penduduk Kota Dumai masih menggunakan bak/drum sebagai tempat penampungan air.
- f. Belum tersedianya sarana dan prasarana sanitasi dan sarana air bersih yang layak dan memadai di Kota Dumai

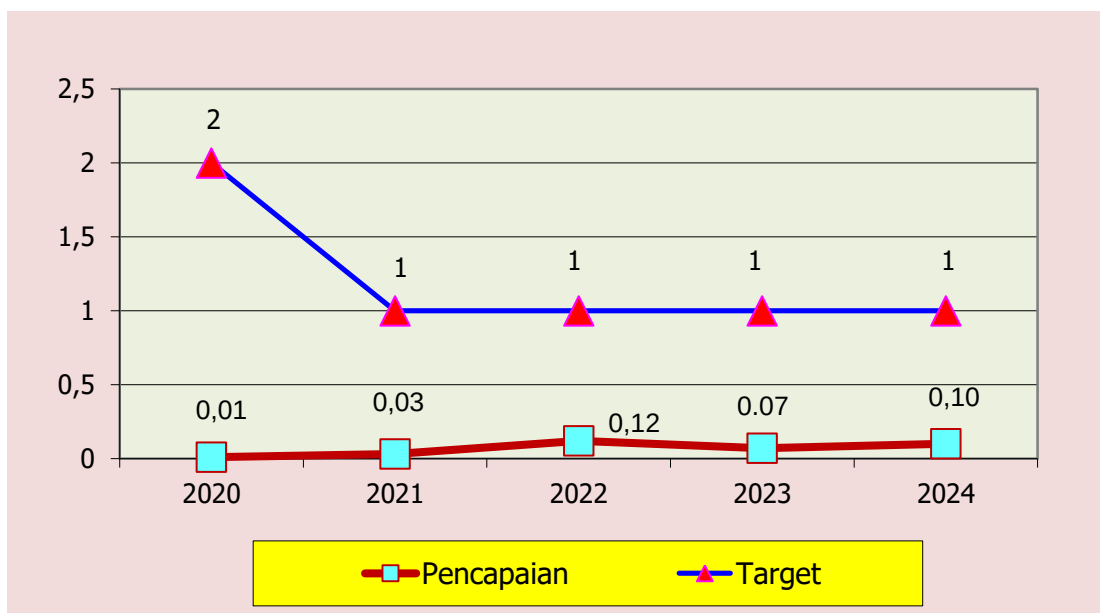
9. Persentase Balita dengan Gizi Buruk

Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena di samping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan. Gizi buruk pada balita adalah kondisi kekurangan nutrisi yang menyebabkan berat badan dan tinggi badan anak jauh di bawah rata-rata. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh kekurangan asupan energi dan protein

dalam jangka waktu yang lama. Menurut Departemen Kesehatan RI (2008), gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) ≤ 3 standar deviasi WHO-NCHS dan ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor.

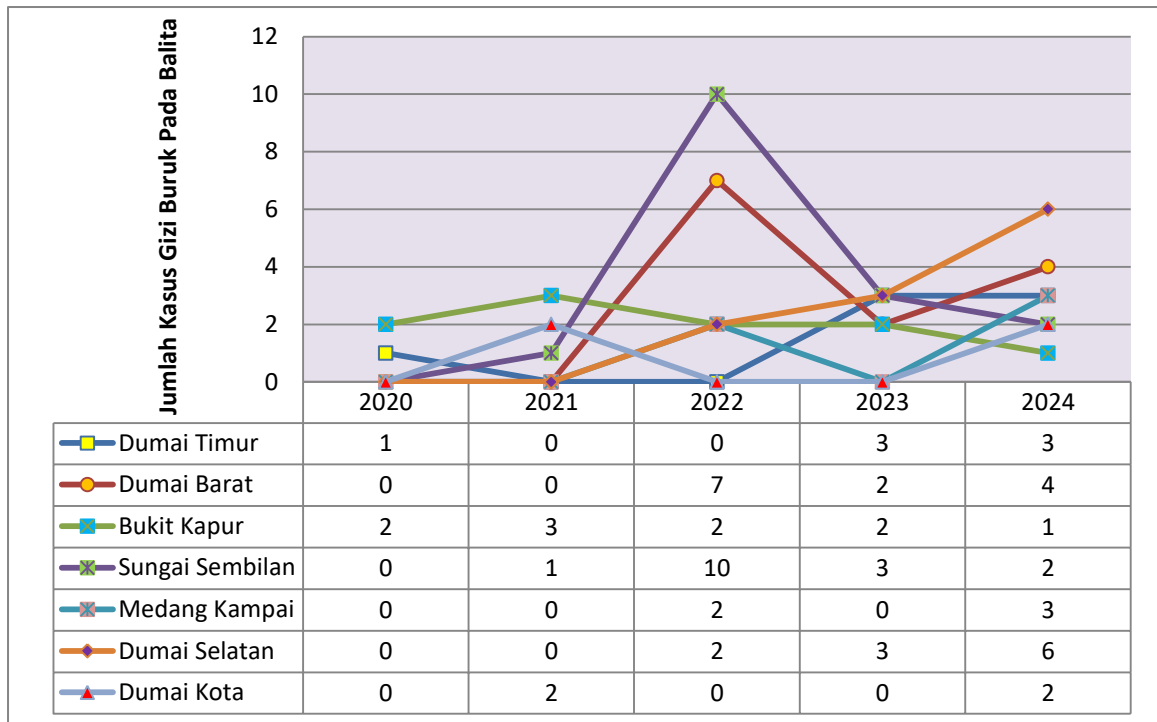
Perkembangan persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai dari tahun 2020 s/d 2024 berfluktuasi dan cenderung meningkat dari 0,01% pada tahun 2020 menjadi 0,10 pada tahun 2024. Secara kasus, jumlah kasus gizi buruk pada balita cenderung meningkat dari 3 kasus pada tahun 2020 menjadi 21 kasus pada tahun 2024. Pencapaian persentase balita dengan gizi buruk dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat dari grafik berikut ini:

Grafik 2.15 Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Buruk Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2024



Berdasarkan kecamatan, terlihat kasus gizi buruk pada balita sering terjadi di Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Selatan dan Kecamatan Bukit Kapur. Perkembangan kasus gizi buruk pada balita per kecamatan selama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.16 Perkembangan Kasus Gizi Buruk Pada Balita Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2020 – 2024



Faktor pendukung/pendorong capaian indikator persentase balita dengan gizi buruk adalah sebagai berikut:

- Merupakan komitmen global (SDG's), adanya komitmen dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Dumai
- Adanya dukungan dari Tim Penggerak PKK Kota Dumai serta lintas sektor lainnya
- Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat melalui APBN yakni DAK Non Fisik berupa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas dan Dinas Kesehatan dan Hibah dari Pemerintah Provinsi Riau (Dinas Kesehatan Provinsi Riau) melalui pendistribusian PMT untuk balita dan ibu hamil ke puskesmas se Kota Dumai berupa biskuit dan susu.

Faktor penghambat capaian indikator persentase balita dengan gizi buruk adalah sebagai berikut:

- Tingginya mobilitas penduduk Kota Dumai dan penduduk pendatang yang tidak mempunyai kartu identitas KTP Kota Dumai
- Faktor social budaya masyarakat seperti pola asuh balita, faktor ekonomi yang mempengaruhi terhadap kemampuan membeli pangan keluarga, serta adanya penyakit penyerta yang diderita balita

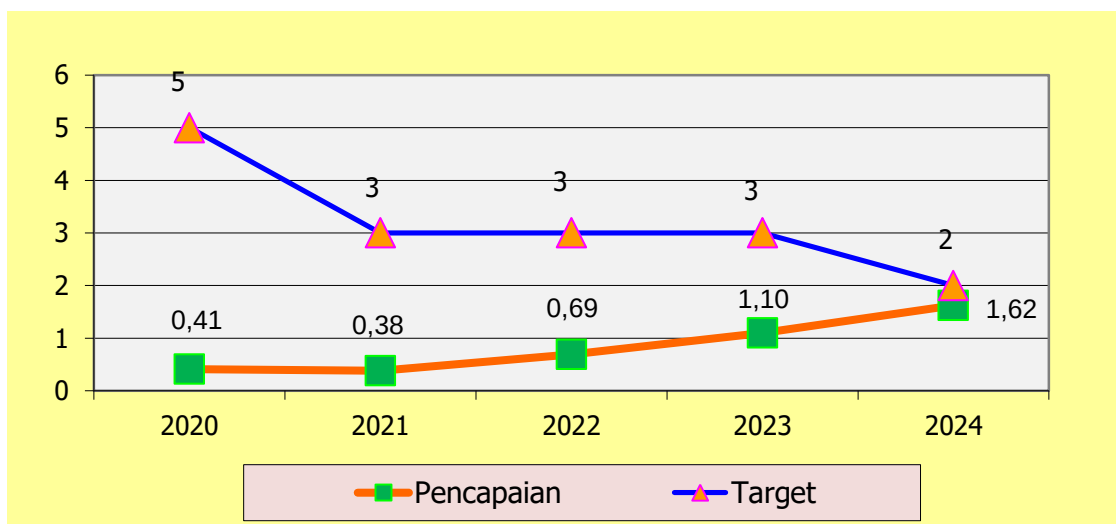
- c. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelayanan posyandu pasca pandemic COVID 19 yakni masih ada masyarakat yang enggan untuk membawa anaknya ke posyandu untuk dilakukan pemantuan pertumbuhan dan perkembangan balita dan pemberian pelayanan kesehatan lainnya seperti imunisasi dan pemberian vitamin A. Pada tahun 2024 persentase balita ditimbang di Kota Dumai sebesar 57,28%.

10. Persentase Balita Dengan Gizi Kurang

Gizi kurang adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Kekurangan zat gizi adaptif bersifat ringan sampai dengan berat. Gizi kurang banyak terjadi pada anak usia kurang dari 5 tahun. Menurut Departemen Kesehatan RI (2008), gizi kurang adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) < 2 s.d -3 standar deviasi WHO-NCHS.

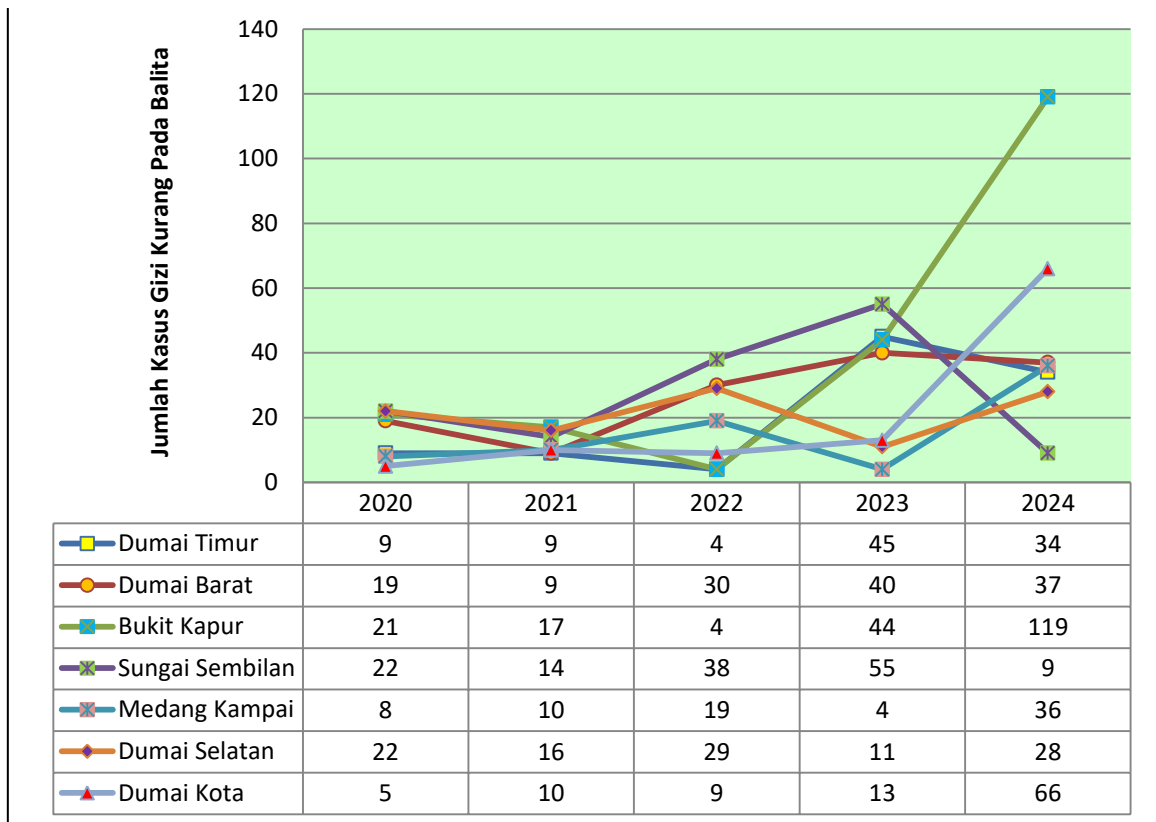
Perkembangan persentase balita dengan gizi kurang di Kota Dumai dari tahun 2020 s/d 2024 cenderung meningkat dari 0,41% pada tahun 2020 menjadi 1,62% ada tahun 2024. Secara kasus, jumlah balita gizi kurang yang ditemukan di Kota Dumai dari tahun 2020 s/d 2024 mengalami peningkatan dari 106 kasus pada tahun 2020 menjadi 329 kasus pada tahun 2024. Pencapaian persentase balita dengan gizi kurang dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat dari grafik berikut ini:

Grafik 2.17 Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Kurang Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2024



. Berdasarkan kecamatan, kasus balita gizi kurang banyak terjadi di Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Dumai Barat dan Kecamatan Dumai Selatan. Perkembangan kasus balita gizi kurang per kecamatan selama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafikl 2.18 Perkembangan Kasus Balita Gizi Kurang per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2020 s/d 2024



Faktor pendukung/pendorong capaian indikator persentase balita dengan gizi kurang adalah sebagai berikut:

- Merupakan komitmen global (SDG's), adanya komitmen dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Dumai
- Adanya dukungan dari Pemerintah Kota Dumai dan Tim Penggerak PKK Kota Dumai serta lintas sektor lainnya
- Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat melalui APBN yakni DAK Non Fisik berupa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas dan Dinas Kesehatan dan Hibah dari Pemerintah Provinsi Riau (Dinas Kesehatan Provinsi Riau) melalui pendistribusian PMT untuk balita dan ibu hamil ke puskesmas se Kota Dumai berupa biskuit dan susu.

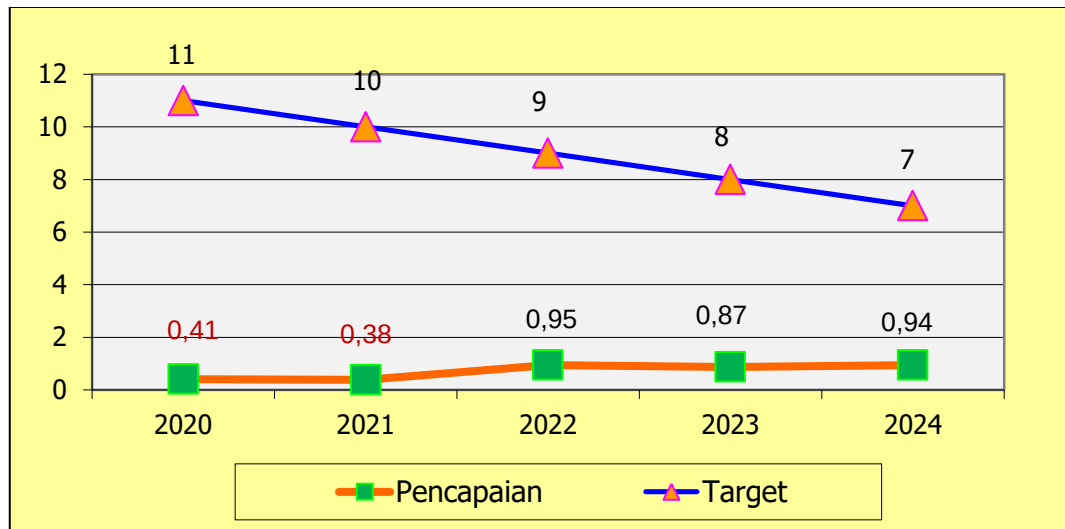
Faktor penghambat capaian indikator persentase balita dengan gizi kurang adalah sebagai berikut:

- a. Tingginya mobilitas penduduk Kota Dumai dan penduduk pendatang yang tidak mempunyai kartu identitas KTP Kota Dumai
- b. Faktor social budaya masyarakat seperti pola asuh balita, faktor ekonomi yang mempengaruhi terhadap kemampuan membeli pangan keluarga, serta adanya penyakit penyerta yang diderita balita
- c. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelayanan posyandu pasca pandemic COVID 19 yakni masih ada masyarakat yang enggan untuk membawa anaknya ke posyandu untuk dilakukan pemantuan pertumbuhan dan perkembangan balita dan pemberian pelayanan kesehatan lainnya seperti imunisasi dan pemberian vitamin A. Pada tahun 2024 persentase balita ditimbang di Kota Dumai sebesar 57,28%.

Perbaikan status gizi masyarakat merupakan salah satu prioritas baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Salah satu kondisi gizi kurang yang menjadi issue strategis baik Glonal, Nasional maupun Provinsi adalah balita pendek atau stunting. Menurut WHO (2015), stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Selanjutnya menurut WHO (2020), stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang/tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversible akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan/atau infeksi berulang / kronis yang terjadi dalam 1000 HPK.

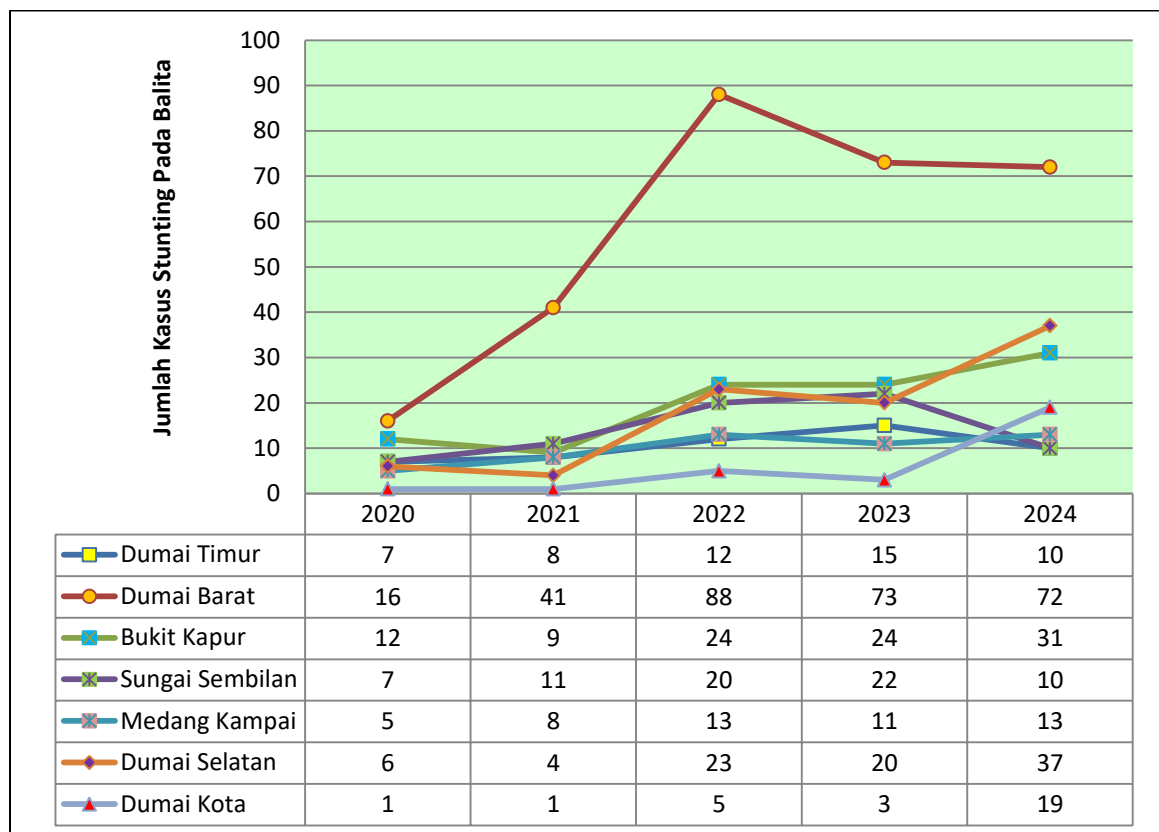
Perkembangan kasus stunting pada balita di Kota Dumai dari tahun 2020 s/d 2024 berfluktuasi dan cenderung meningkat. Berdasarkan data penimbangan balita di posyandu, pada tahun 2020 ditemukan kasus balita stunting sebanyak 54 kasus (prevalensi balita stunting sebesar 0,41%) meningkat menjadi 192 kasus (prevalensi balita stunting sebesar 0,94%) pada tahun 2024.

Grafik 2.19 Pencapaian Prevalensi Stunting Pada Balita Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2024



Berdasarkan kecamatan, kasus stunting pada balita banyak ditemukan di Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Dumai Selatan dan Kecamatan Sungai seperti terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.20 Perkembangan Kasus Stunting Pada Balita per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2020 s/d 2024



Adanya peningkatan yang signifikan kasus balita stunting di Kota Dumai mulai tahun 2021 kemungkinan sebagai dampak dari pandemic COVID 19 yang terjadi sejak tahun 2020 lalu akibat adanya hambatan finansial karena orang tua kehilangan sumber penghasilan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumsi pangan keluarganya terutama balita dan ibu hamil. Selain itu, selama masa kehamilannya sang ibu tidak memeriksakan kehamilannya ke fasilitas pelayanan kesehatan karena takut terkena COVID 19 dan tertundanya layanan imunisasi balita dan layanan antenatal untuk ibu hamil di posyandu. Lebih lanjut, adanya peningkatan jumlah balita stunting tersebut karena mulai tahun 2022 dilakukan Survei Status Gizi Balita (SSGI) serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Dumai sehingga banyak balita stunting yang terjaring pada saat pelaksanaan survey tersebut.

Berdasarkan hasil survei (SSGI dan SKI), perkembangan prevalensi stunting pada balita di Kota Dumai dari tahun 2021 s/d 2024 berfluktuasi dan cenderung meningkat. Pada tahun 2021, angka prevalensi stunting pada balita di Kota Dumai sebesar 23%, turun menjadi 12,8% pada tahun 2022 kemudian meningkat menjadi 14,9% pada tahun 2023 dan menjadi 16,9% pada tahun 2024.

11. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Selain merupakan salah satu indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai, indikator Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional juga merupakan salah satu indikator “Sustainable Development Goal’s” (SDG’s). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Peserta JKN terdiri dari:

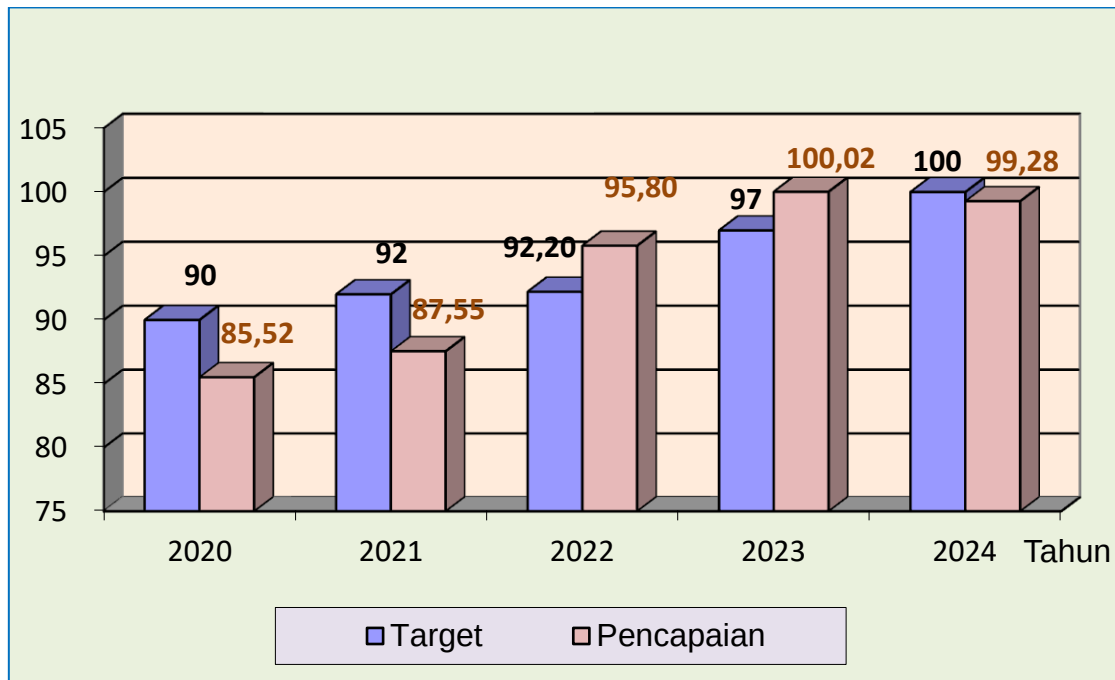
- Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN : Masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN
- Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD : Peserta JKN yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
- Pekerja Penerima Upah (PPU) : Peserta JKN yang terdiri dari PNS, TNI/ POLRI, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang iurannya dibiayai oleh pemberi kerja dan peserta yang bersangkutan.
- Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri : Peserta JKN yang bekerja mandiri dan iurannya dibiayai oleh peserta yang bersangkutan.
- Bukan Pekerja (BP) : Peserta JKN yang terdiri dari investor, pemberi pajak, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan dan bukan pekerja lainnya yang iurannya dibiayai oleh peserta yang bersangkutan.

Selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 jumlah penduduk Kota Dumai yang telah mempunyai jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS baik itu sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI APBN dan PBI APBD) dan Non PBI (pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah/mandiri dan bukan pekerja) cenderung meningkat dari 268.682 orang pada tahun 2020 menjadi 346.869 orang pada tahun 2024. Perkembangan cakupan JKN di Kota Dumai dari tahun 2020 s/d 2024 cenderung meningkat dari 85,52% pada tahun 2020 menjadi 99,28% pada tahun 2024. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai tahun 2020 s/d 2024, maka persentase capaian cakupan JKN di Kota Dumai masih di bawah target, kecuali pada tahun 2022 dan 2023 dimana capaian JKN di Kota Dumai telah mencapai/melebihi target.

Pada tahun 2022, BPJS Indonesia telah menetapkan target bahwa kabupaten/kota dinyatakan mencapai Universal Health Coverage (UHC) apabila persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan melalui program

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 95%. Dengan pencapaian UHC Kota Dumai tersebut, berarti Kota Dumai sudah mencapai UHC sejak tahun 2022.

Grafik 2.21 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Kota Dumai Tahun 2020 – 2024



Berdasarkan jenis kepesertaan JKN, terlihat peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) lebih banyak jumlahnya daripada Non PBI. Hal ini menunjukkan beban Pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Dumai masih besar dalam menyediakan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Perkembangan cakupan jaminan kesehatan menurut jenis jaminan di Kota Dumai mulai Tahun 2020 s/d 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.30 Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk
Menurut Jenis Kepesertaan Kota Dumai Tahun 2020- 2024

No	Jenis Kepesertaan	Peserta Jaminan Kesehatan				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penerima Bantuan Iuran (PBI)						
1	PBI APBN	74,766	75,857	85.175	103.498	100.881
2	PBI APBD	84,057	89,238	108.456	110.015	117.317
Sub Jumlah PBI		158,823	165,095	193.631	213.513	218.198
Non PBI						
1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	82,728	86,623	94.250	97.128	102.704
2	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	26,429	26,350	26.479	22.846	21.737
3	Bukan Pekerja (BP)	702	3,188	3.159	4.644	4.230
Sub Jumlah Non PBI		109,859	116,161	123.888	124.618	128.670
Total Peserta Kota Dumai		268,682	281,256	317.519	338.131	346.869
Jumlah Penduduk Kota Dumai		314,166	321,238	331.445	338.064	349.389
% JKN di Kota Dumai		85.52	87.55	95.80	100.02	99,28

Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai adalah sebagai berikut:

- Merupakan komitmen global (SDG's), sasaran prioritas Nasional, Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Dumai di dalam RPJMN, RPJMD Provinsi Riau dan RPJMD Kota Dumai
- Adanya dukungan anggaran dan regulasi dari Pusat (PBI APBN), Provinsi Riau (budget sharing PBI APBD) dan Pemerintah Kota Dumai (PBI APBD)
- Kota Dumai telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) sejak tahun 2022

Faktor penghambat capaian indikator Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai adalah sebagai berikut:

- Adanya kebijakan dari Pusat di tengah tahun untuk pengalihan kepesertaan PBPU dan BP Pemda Kota Dumai menjadi peserta PBI JK (Pusat) yang berdampak pada berkurangnya pembayaran iuran peserta PBPU dan BP Pemda Kota Dumai. Hal tersebut mengakibatkan realisasi anggaran tidak optimal.
- BPJS Kesehatan kesulitan dalam mendorong kepesertaan pekerja sektor informal dan kelompok muda
- Penyebaran fasilitas kesehatan yang belum merata sehingga peserta kesulitan mengakses pelayanan kesehatan

Tabel. 2.31 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Dumai Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Kesehatan					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pelayanan Kesehatan ibu Hamil	SPM	IKK	SDG's Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	100%	90,54%	88,53%	90,48%	90,59%	89,55%	90,54%	88,53%	90,48%	90,59%	89,55%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	SPM	-	Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	100%	94,93%	92,57%	90,36%	90,88%	89,55%	94,93%	92,57%	90,36%	90,88%	89,55%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	SPM	IKK	Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	100%	92,72%	90,86%	92,74%	93,67%	92,99%	92,72%	90,86%	92,74%	93,67%	92,99%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	SPM	IKK	Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	100%	73,50%	41,82%	88,71%	84,96%	99,33%	73,50%	41,82%	88,71%	84,96%	99,33%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	SPM	-	Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%	48,32%	86,65%	75,16%	83,98%	0,00%	48,32%	86,65%	75,16%	83,98%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	SPM	-	Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	100%	30,60%	56,38%	81,77%	93,95%	90,26%	30,60%	56,38%	81,77%	93,95%	90,26%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	SPM	-	Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	100%	43,03%	66,74%	85,94%	93,66%	100%	43,03%	66,74%	85,94%	93,66%	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	SPM	-	Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	100%	20,01%	18,03%	46,93%	52,89%	75,80%	20,01%	18,03%	46,93%	52,89%	75,80%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	SPM	-	Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	100%	81,52%	100%	94,66%	97,83%	100%	81,52%	100%	94,66%	97,83%	100%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	SPM	-	Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	100%	86,41%	88,38%	97,57%	100%	100%	86,41%	88,38%	97,57%	100%	100%
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan Terduga Tuberkulosis	SPM	-	Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	100%	39,40%	59,56%	100%	100%	100%	39,40%	59,56%	100%	100%	100%
12	Pelayanan Kesehatan orang beseriko terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	SPM	-	Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	100%	24,27%	40,52%	79,35%	100%	83,66%	24,27%	40,52%	79,35%	100%	83,66%

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang – orang yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 tentang Stándar Pelayanan Minimal dan Nomor 4 tahun 2019 tentang Stándar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warganegara.

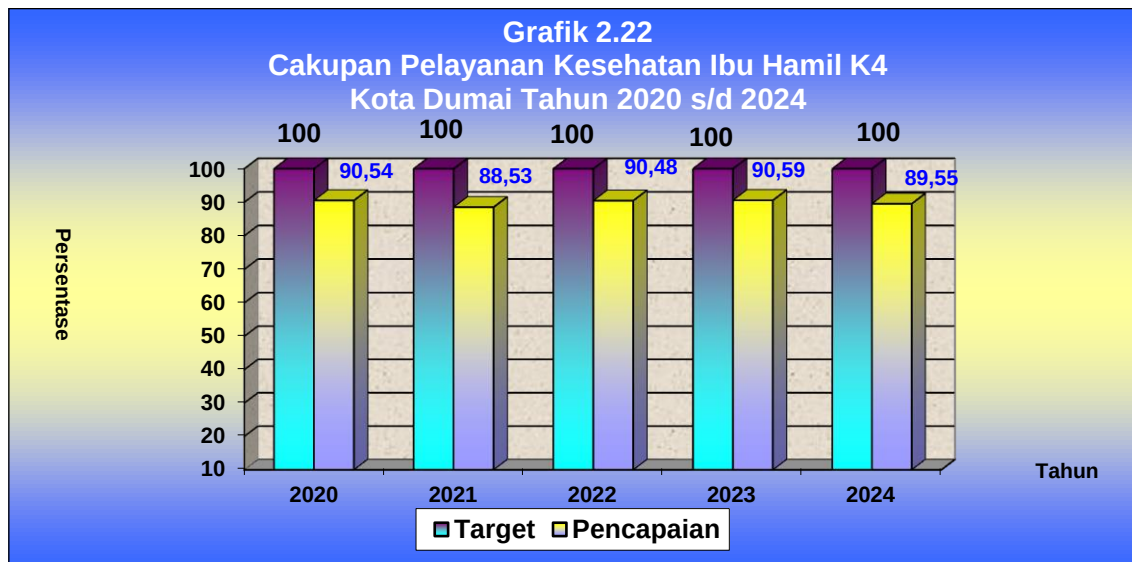
Kinerja program kesehatan dituangkan dalam target – target SPM. Pencapaian target SPM bidang kesehatan merupakan kinerja Pemerintah Daerah. Pencapaian SPM bidang kesehatan Kota Dumai mulai tahun 2020 s/d 2024 sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan kesehatan pada ibu hamil meliputi pelayanan antenatal merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya, dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Kebidanan (SPK). Sedangkan tenaga kesehatan yang berkompeten memberikan pelayanan antenatal kepada ibu hamil antara lain dokter spesialis kebidanan, dokter, bidan dan perawat.

Pelayanan antenatal yang sesuai standar meliputi “10 T” timbang berat badan, pengukuran tinggi badan, tekanan darah, nilai status gizi (ukur lingkar lengan atas), tinggi fundus uteri (puncak rahim), menentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ), skrining status imunisasi tetanus dan memberikan imunisasi Tetanus diphteri (Td) bila diperlukan, pemberian tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan, test laboratorium (rutin dan khusus), tatalaksana kasus, serta temu wicara (konseling), termasuk Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), serta KB pasca persalinan. Mekanisme pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil menggunakan standar kuantitas yakni kunjungan 6 kali selama periode kehamilan (K6) dengan ketentuan a) satu kali pada trimester pertama, b) dua kali pada trimester kedua dan c) tiga kali pada trimester ketiga. Ibu hamil yang dikatakan mendapat pelayanan K6 apabila mendapatkan Pelayanan K1 Murni, K4, dan K5.

Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 berfluktuasi namun belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan masih ada ibu hamil yang tidak mau ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kehamilan. Disamping itu, adanya faktor budaya dimana biasanya ibu hamil dengan kehamilan lebih dari enam bulan akan pulang ke rumah orang tuanya yang berbeda domisili atau daerah dan melahirkan di sana. Hal tersebut mengakibatkan ibu hamil tersebut tidak tercatat di MPDN/e-kohort (tidak dilaporkan) baik di fasilitas kesehatan maupun sesuai alamat wilayah kerja karena ibu hamil tersebut tidak melewati beberapa tahapan pemeriksaan kehamilan. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Dumai dari tahun 2020 s/d 2024 seperti terlihat pada grafik berikut ini.

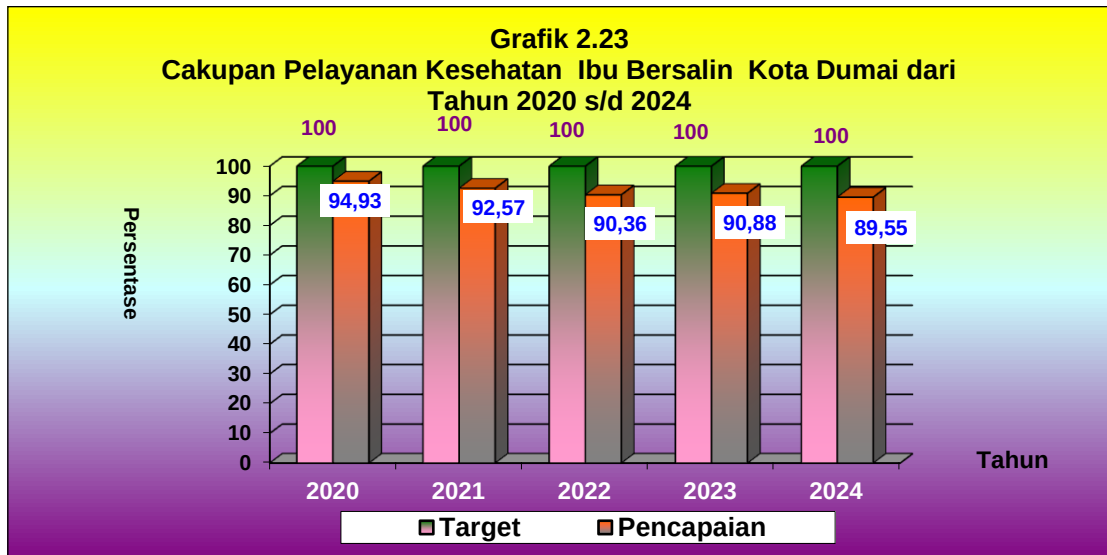


2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan standar kepada ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin meliputi persalinan normal, persalinan komplikasi. Standar persalinan normal yang dilakukan dengan Acuan Persalinan Normal (APN) yang dilakukan, sedangkan persalinan komplikasi mengacu pada buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2020 s.d 2024 cenderung menurun, belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan masih

ada ibu bersalin yang tidak mau ke fasilitas pelayanan kesehatan dan adanya mobilitas ibu bersalin karena faktor budaya dimana ibu melakukan persalinan di tempat orang tuanya berada (luar wilayah Kota Dumai) sehingga tidak tercatat di MPDN/e-kohort (tidak dilaporkan) baik di fasilitas kesehatan maupun sesuai alamat wilayah kerja, serta masih ada ditemukan persalinan yang tidak dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau persalinan dilakukan di rumah pasien.



3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

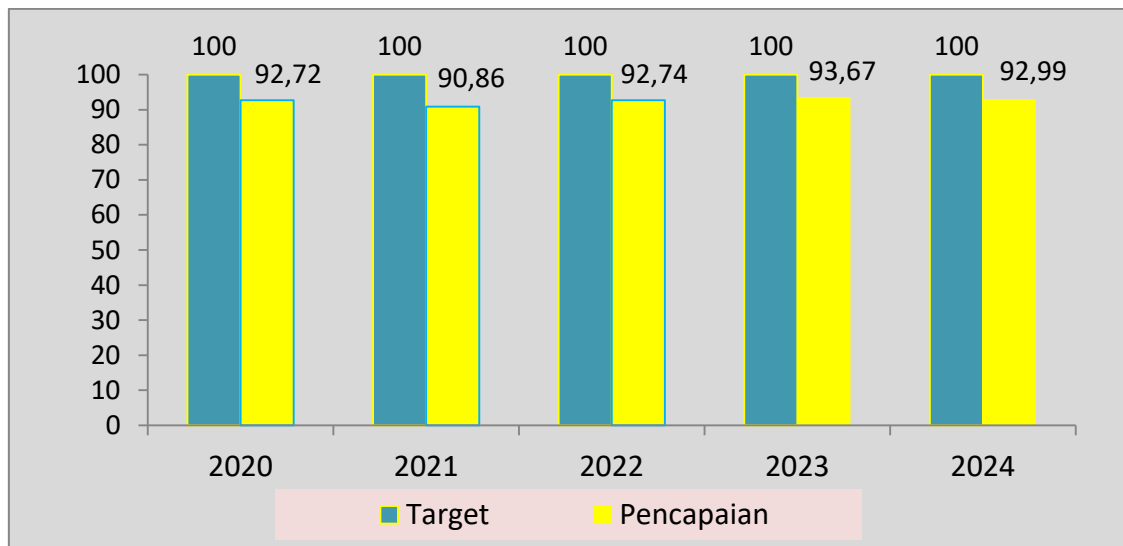
Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali dalam setahun, yaitu satu kali pada umur 29 hari–3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, dan Campak), stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK), manajemen program KIA dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan.

Perkembangan cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 berfluktuasi namun belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan kegiatan posyandu belum berjalan secara optimal dan masih ada orang tua yang tidak mau membawa bayinya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, adanya mobilitas ibu bersalin karena faktor budaya dimana ibu melakukan persalinan di tempat orang tuanya berada (luar wilayah Kota Dumai)

sehingga pelayanan kesehatan bayi lahir tidak tercatat di e-kohort (tidak dilaporkan) baik di fasilitas kesehatan maupun sesuai alamat wilayah kerja.

Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 seperti terlihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.24 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Kota Dumai Dari Tahun 2020 s/d 2024



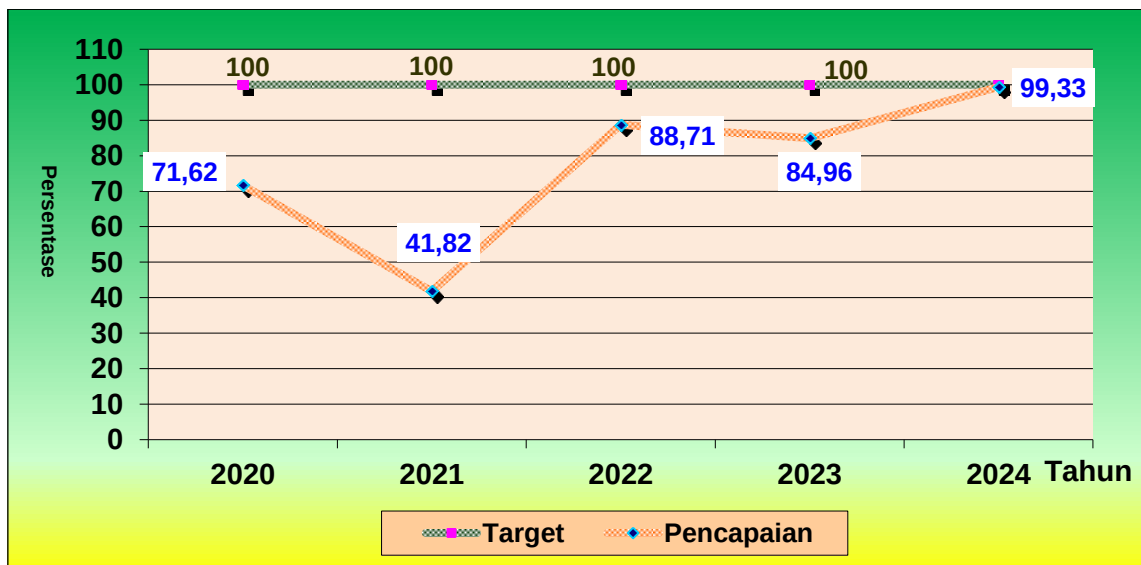
4. Pelayanan Kesehatan Pada balita

Pelayanan kesehatan balita adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS). Setiap balita (0-59 bulan) memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang meliputi pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun, pemberian kapsul Vitamin A, pemberian imunisasi dasar lengkap, penimbangan minimal 8 kali dalam setahun yang dilaksanakan melalui pelayanan SDIDTK oleh tenaga kesehatan, ahli gizi, penyuluh kesehatan masyarakat dan petugas sektor lain yang dalam menjalankan tugasnya melakukan stimulasi dan deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang anak.

Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan balita di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 berfluktuasi dan cenderung meningkat namun belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan kegiatan pemantauan deteksi dini tumbuh kembang anak balita melalui pemantauan pertumbuhan balita di posyandu belum

terlaksana secara optimal dan masih adanya orang tua yang tidak mau membawa balitanya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan balita di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 seperti terlihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.25
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita
Kota Dumai Dari Tahun 2020 s/d 2024



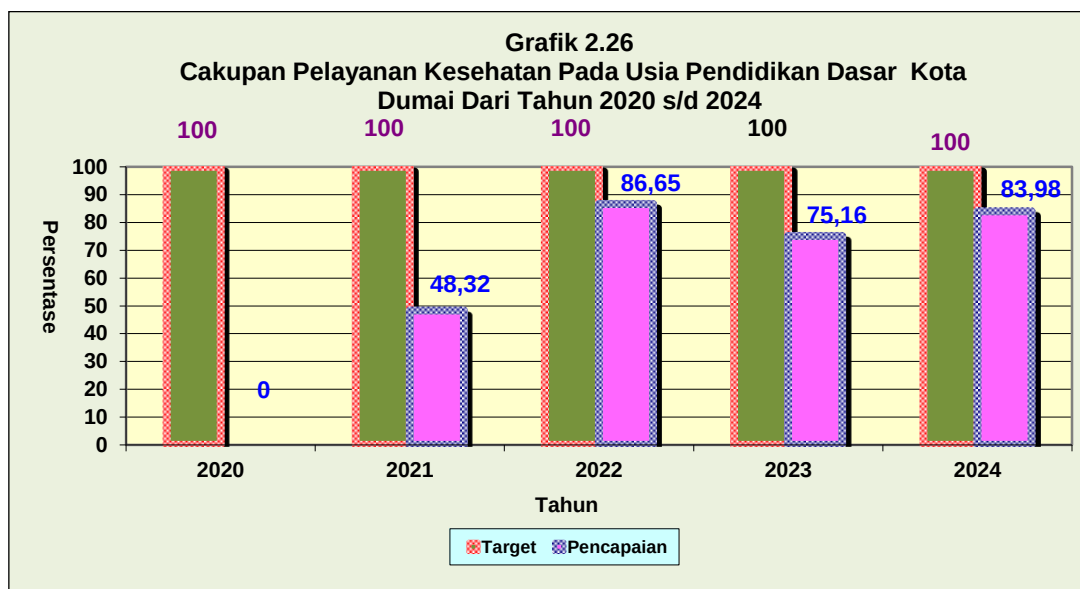
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Setiap anak pada usia pendidikan dasar usia 7 tahun – 15 tahun. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar meliputi skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining kesehatan dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah.

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan luar satuan pendidikan dasar (pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LKPA) dan lainnya meliputi penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, penilaian ketajaman indera. Tindak lanjut hasil skring kesehatan meliputi memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan rujukan bila diperlukan, memberikan penyuluhan kesehatan.

Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar di kota Dumai tahun 2020 sampai dengan 2024 berfluktuasi namun belum mencapai

target 100%. Penjaringan anak sekolah untuk siswa baru sudah dilaksanakan oleh seluruh puskesmas, namun ada beberapa puskesmas yang tidak melakukan penjaringan berkala karena sibuk mempersiapkan akreditasi puskesmas, ada beberapa sekolah yang tutup atau tidak lagi menjadi wilayah binaan puskesmas.. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



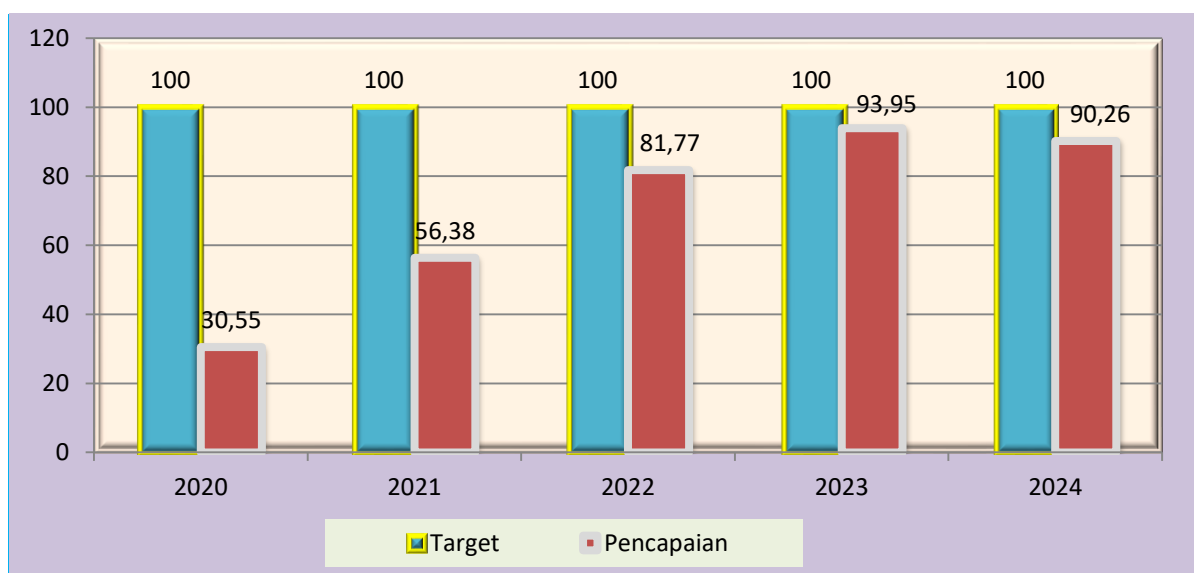
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Setiap warganegara usia 15 tahun – 59 tahun berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai estándar. Pemerintah memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi, dan skrining kesehatan Pelayanan kesehatan pada usia produktif meliputi skrining faktor resiko penyakit menular dan tidak menular, edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana. Pelayanan edukasi pada usia produktif dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/ atau UKBM.

Pelaksanaan skrining kesehatan pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun meliputi pengukuran tinggi, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, anamnesa perilaku beresiko. Wanita usia 30 – 50 tahun yang sudah menikah atau mempunyai riwayat berhubungan seksual beresiko dilakukan pemeriksaan SADANIS dan IVA test. Tindak lanjut skring meliputi melakukan rujukan jika diperlukan dan melakukan penyuluhan kesehatan.

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 cenderung meningkat namun belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan kegiatan pelayanan kesehatan usia produktif di posbindu belum terlaksana secara optimal dan masih adanya penduduk usia produktif yang tidak mau memeriksakan kesehatannya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.27 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Kota Dumai Tahun 2020 – 2024



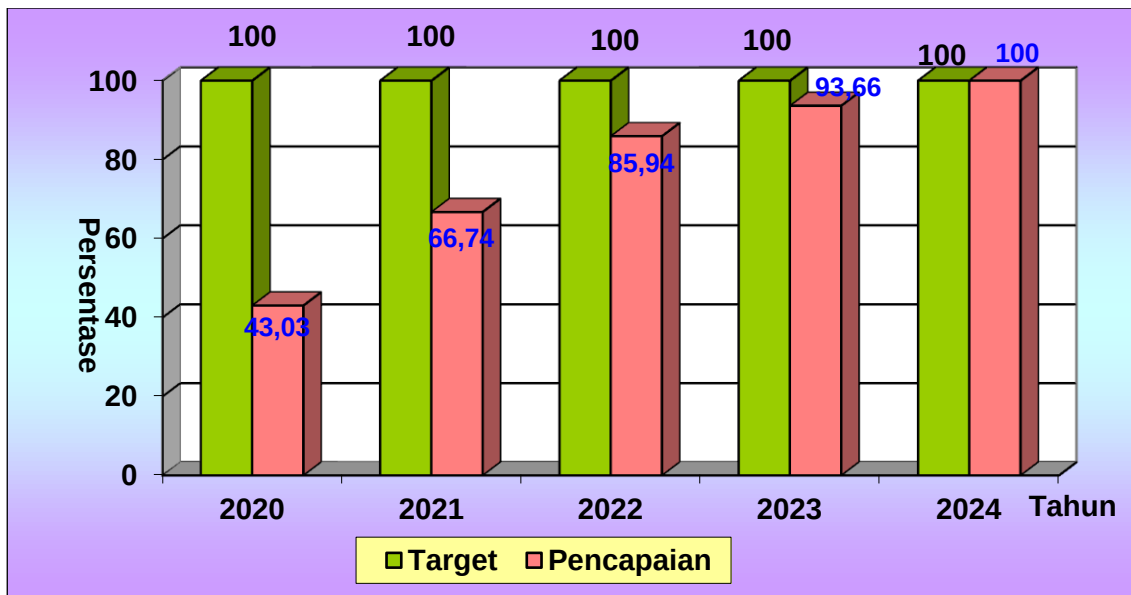
7. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Pelayanan kesehatan standar pada usia lanjut dilakukan pada penduduk usia 60 tahun keatas. Pemerintah memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi, dan skrining kesehatan. Pelayanan kesehatan pada usia produktif meliputi skrining usia lanjut. Pelaksanaan skrining kesehatan pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun meliputi pengukuran tinggi, berat badan dan lingkaran perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan gangguan mental, pemeriksaan gangguan kognitif, pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut, anamnesa perilaku beresiko. Tindak lanjut skring meliputi melakukan rujukan jika diperlukan dan melakukan penyuluhan kesehatan.

Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 cenderung meningkat dan sudah mencapai

100% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan kegiatan pelayanan kesehatan pada usia lanjut di posyandu lansia sudah terlaksana secara optimal karena penduduk usia lanjut sudah mau memeriksakan kesehatannya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.28 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Kota Dumai Tahun 2020 – 2024



8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Selain penyakit menular yang masih merupakan masalah utama kesehatan di Kota Dumai, penyakit tidak menular seperti penyakit degeneratif menunjukkan kecenderungan meningkat dan juga menjadi permasalahan di Kota Dumai seperti penyakit Hipertensi. Hal tersebut menunjukkan telah terjadi transisi epidemiologi yakni perubahan pola penyakit dan kematian yang ditandai dengan beralihnya penyebab penyakit dan kematian yang semula didominasi oleh penyakit infeksi/menular bergeser ke penyakit non infeksi/menular. Perubahan pola penyakit tersebut sangat dipengaruhi oleh keadaan demografi, sosial ekonomi, dan sosial budaya seperti meningkatnya umur harapan hidup, adanya kondisi lingkungan yang merugikan kesehatan seperti pencemaran udara dan rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat serta makin tingginya paparan faktor resiko seperti merokok, pola aktifitas fisik (kurang olah raga), pola makan yang tinggi lemak dan rendah serat.

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai stándar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun keatas. Pelayanan kesehatan sesuai stándar meliputi pengukuran tekanan darah yang dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan. Edukasi perubahan gaya hidup dan/ atau kepatuhan minum obat, melakukan rujukan jika diperlukan. Diagnosa Hipertensi ditegakkan jika Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg, pelayanan yang dilakukan dengan terapi farmakologi.

Perkembangan cakupan pelayanan penderita hipertensi di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 berfluktuasi dan cenderung meningkat namun belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan pelayanan kesehatan hipertensi di posbindu dan posyandu lansia belum terlaksana secara optimal. Disamping itu kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya dan masih adanya penduduk yang tidak mau memeriksakan kesehatannya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Lebih lanjut, kurangnya koordinasi antara puskesmas dengan FKTP lain di wilayah kerjanya dalam pencatatan atau pelaporan pasien Hipertensi. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.29 Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Kota Dumai Tahun 2020 – 2024

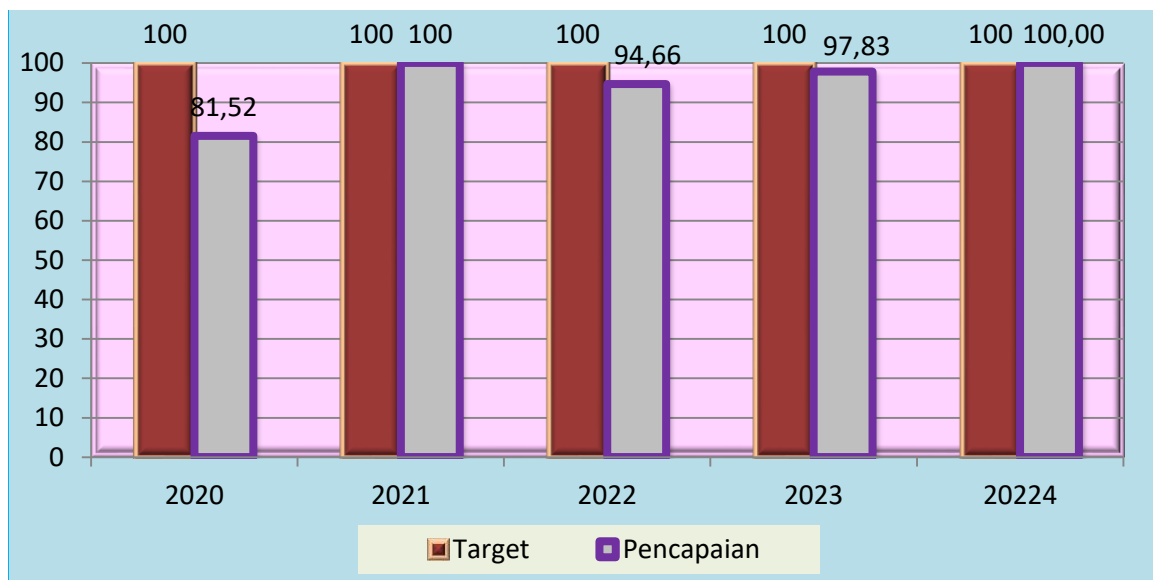


9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai stándar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun keatas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun . Pelayanan kesehatan sesuai stándar meliputi pengukuran pengukuran gula darah yang dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan. Edukasi Rancangan Awal (Ranwal) gaya hidup dan/ atau atau nutrisi, melakukan rujukan jika diperlukan. Diagnosa DM ditegakkan jika Gula Darah Sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl, pelayanan yang dilakukan dengan terapi farmakologi.

Perkembangan cakupan pelayanan penderita Diabetes Mellitus di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 berfluktuasi dan sudah mencapai 100% pada tahun 2021 dan tahun 2024. Hal ini menunjukkan kegiatan pelayanan kesehatan Diabetes Mellitus di posbindu dan posyandu lansia sudah terlaksana secara optimal. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.30 Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Kota Dumai Tahun 2020 – 2024



10. Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai stándar oleh Pemerintah sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun . Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai

standar bagi psikotik akut dan skizoprenia meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa diantaranya pemeriksaan status mental, wawancara, edukasi kepatuhan minum obat, melakukan rujukan jika diperlukan.

Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 cenderung meningkat dan sudah mencapai 100% sejak tahun 2023. Namun demikian masih ada stigma di masyarakat, sehingga keluarga pasien malu atau enggan untuk membawa keluarganya dengan gangguan jiwa ke fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tantangan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.31 Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Kota Dumai Tahun 2020 – 2024

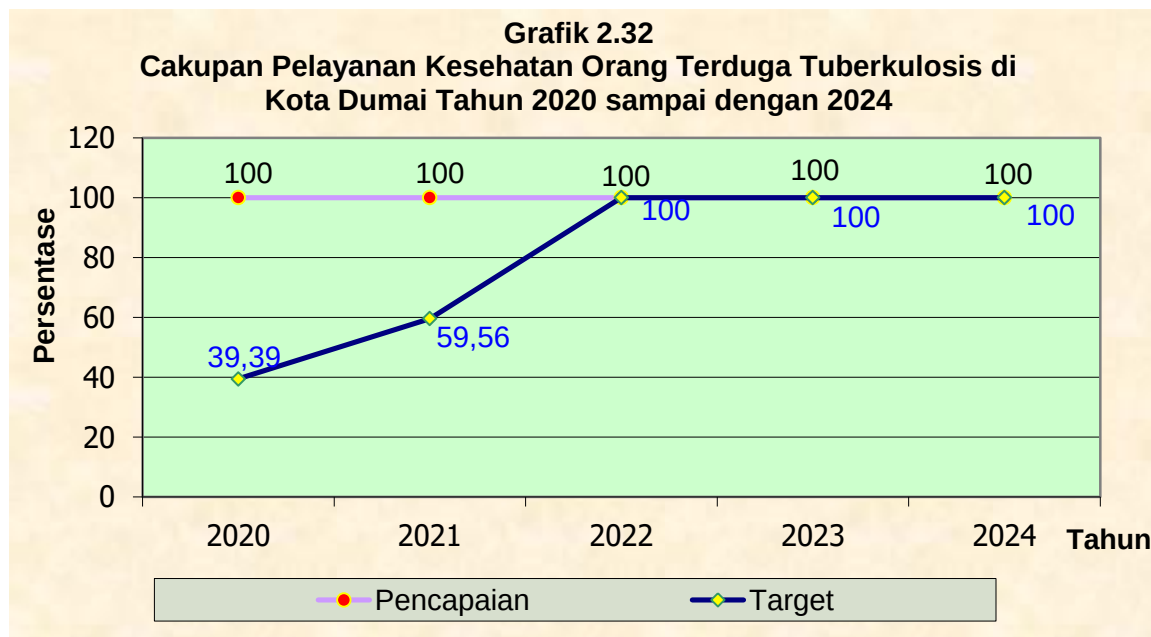


11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Untuk penanggulangan Tuberkulosis Pemerintah memberikan otoritas terhadap kabupaten/kota. Dalam penanggulangan tuberkulosis, WHO telah menetapkan strategi, yang merupakan strategi cost-efektif yaitu strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) yang artinya pengobatan jangka pendek dengan pengawasan minum obat langsung yang memberikan angka kesembuhan yang tinggi.

Setiap orang terduga Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan orang terduga TBC meliputi pemeriksaan klinis dilakukan minimal 1 kali dalam setahun berupa pemeriksaan gejala dan tanda, pemeriksaan penunjang dengan pemeriksaan dahak secara bakteriologis dan/ atau radiologis, edukasi perilaku beresiko dan pencegahan penularan, melakukan rujukan jika diperlukan.

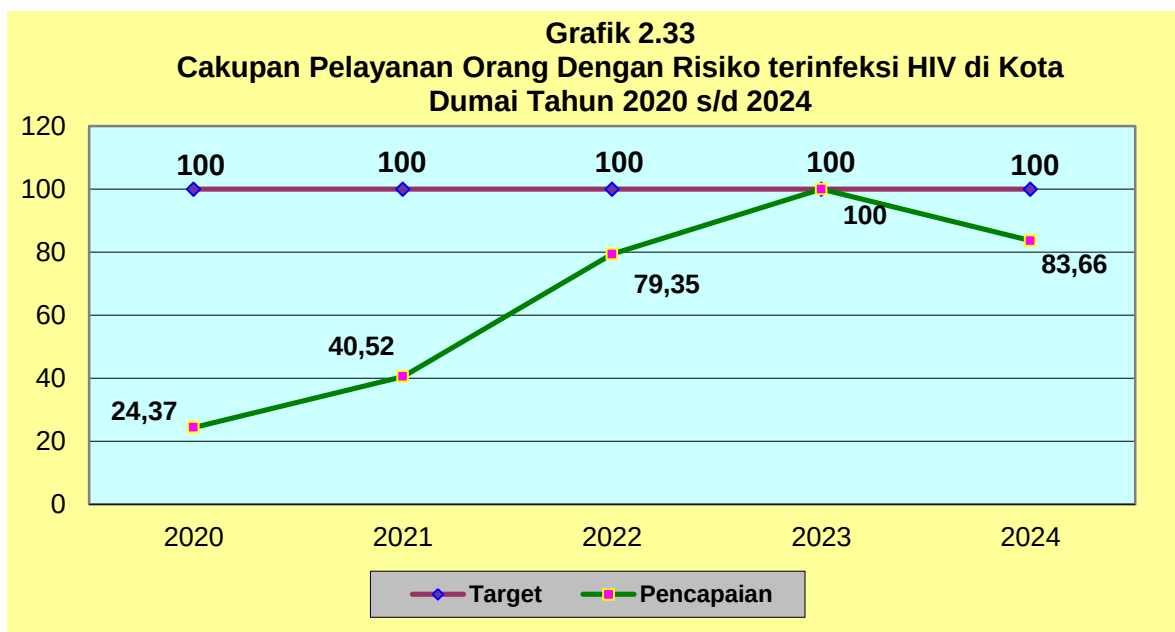
Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis di Kota Dumai tahun 2020 sampai dengan 2024 cenderung meningkat, bahkan sejak tahun 2022 pencapaiannya sudah mencapai 100%. Hal tersebut karena kondisi dan situasi di masyarakat mulai berangsur normal setelah adanya pandemi COVID 19, sehingga masyarakat sudah mau berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kesehatan dirinya. Selain itu, petugas TB puskesmas sudah dapat melaksanakan kegiatan turun kontak serumah dan melakukan skrining massal dengan tetap mengatur jaga jarak dan melaksanakan protokol kesehatan. Lebih lanjut, puskesmas bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan LSM PKBI dalam melakukan penjangkaran TB dan investigasi kontak dengan terjun langsung ke masyarakat di tempat-tempat yang beresiko tinggi dengan TB. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar oleh pemerintah daerah. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV meliputi skrining dengan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun pada orang dengan risiko terinfeksi HIV pada ibu hamil, pasien TBC, pasien IMS, penaja seks, lelaki yang bergubungan seks dengan lelaki (LSL), transgender/waria, pengguna napza suntik (penasun), warga binaan pemasyarakatan (WBP), pelayanan edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan, melakukan rujukan jika diperlukan.

Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV di kota Dumai tahun 2020 sampai dengan 2024 berfluktuasi dan sempat mencapai 100% pada tahun 2023. Namun demikian masih berkembangnya stigma dan diskriminasi bagi penderita HIV merupakan tantangan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV. Disamping itu, petugas sulit mendeteksi di lapangan karena titik hotspot yang sudah menyebar serta sulitnya mendapat izin masuk untuk melakukan pemeriksaan ke titik hotspot. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan orang terinfeksi HIV di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



B. Pembiayaan Kesehatan

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai (termasuk 12 UPT) di dalam APBD Kota Dumai selama tahun 2020 sampai dengan 2024 secara kuantitatif mengalami peningkatan meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022. Pada tahun 2020 alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai sebesar Rp 136.464.408.226,- meningkat menjadi Rp 239.318.135.031,- pada tahun 2024. Demikian juga secara proporsi, persentase anggaran Dinas Kesehatan terhadap APBD Kota Dumai juga mengalami berfluktuasi dan cenderung menurun dari 10,95% pada tahun 2020 menjadi 10,34% pada tahun 2024. Adanya peningkatan yang signifikan pada alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai tahun 2020 karena Kota Dumai menjadi lokus program prioritas Nasional penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak, sehingga Kota Dumai mendapat tambahan dana transfer dari Pusat dalam bentuk DAK, DID dan lain-lain.

Tabel 2.32 Perkembangan Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan dari Tahun 2020 s/d 2024 di dalam APBD Kota Dumai

No.	Tahun	APBD Kota Dumai	Anggaran Dinkes	% Anggaran Dinkes terhadap APBD Kota Dumai
1.	2020	1,246,342,635,984.00	136,464,408,226.00	10.95
2.	2021	1,454,362,356,872.00	152,526,037,994,00	10.49
3.	2022	1,639,213,287,765,00	138,682,633,959.00	8.46
4.	2023	2,016,628,913,661,00	157,052,544,027.00	7.79
5.	2024	2.313.840.996.262,00	239.318.135.031,00	10,34

Sedangkan perkembangan persentase realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai dari tahun 2020 s/d 2024 menunjukkan fluktuasi, dimana persentase realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai mengalami penurunan dari 91,41% pada tahun 2020 menjadi 81,42% pada tahun 2024. Adanya penurunan persentase realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai yang cukup signifikan pada tahun 2024 adalah karena tidak tercapainya target pendapatan Kota Dumai pada tahun 2024 yang mengakibatkan beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024 tidak terealisasi keuangannya sehingga mengalami tunda bayar (akan dibayarkan pada tahun 2025 setelah direview oleh Inspektorat Kota Dumai).

Tabel 2.33 Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Dinas Kesehatan dari Tahun 2020 s/d 2024

Sumber Anggaran	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Capaian					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggara	Realisa
APBD Kota Dumai	136.464.408.226,00	152.526.037.994,00	138.682.633.959,00	157.052.544.027,00	239.318.135.031,00	124.743.432.145,00	136.932.958.418,78	127.193.095.752,90	144.396.026.375,59	194.847.903.820,00	91,41	89,78	91,72	91,94	81,42	17,08	88,36

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual yang dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif terhadap masyarakat dan daerah.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Secara Nasional, permasalahan kesehatan di Indonesia masih difokuskan pada kematian ibu (tingkat kematian ibu hamil tertinggi ke 2 di Asia Tenggara) dan anak (angka kematian balita tertinggi ke 3 di Asia Tenggara), penyakit menular seperti tuberculosis (prevalensi tuberculosis tertinggi ke 2 di dunia), HIV, malaria, demam berdarah, kusta (insidens kusta tertinggi ke 3 di dunia), stunting, penyakit tidak menular (diabetes, penyakit jantung, kanker), kesehatan mental, kesenjangan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar (fasilitas pelayanan kesehatan yang belum merata dan rendahnya kualitas sumber daya manusia kesehatan).

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan kesehatan dan mengacu pada permasalahan pada Rancangan Awal RPJMD Kota

Dumai 2025-2029 urusan kesehatan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh Kota Dumai, terutama di wilayah kerja puskesmas yang memiliki daerah sulit dijangkau karena kondisi geografis, terbatasnya transportasi dan infrastruktur (jalan, jembatan dan listrik serta jaringan komunikasi) terutama di Kecamatan Sungai Sembilan, Kelurahan Batu Teritip.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai masih belum memenuhi standar sesuai peraturan yang berlaku.
3. Belum optimalnya rasio tenaga kesehatan dan sebaran yang tidak merata
4. Belum optimalnya pencapaian Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Neonatal (AKN), serta tingginya prevalensi kasus penyakit tidak menular seperti Hipertensi, Diabetes Mellitus, Penyakit Jantung dan Stroke.
5. Belum optimalnya pencapaian cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai
6. Meningkatnya jumlah kasus HIV/AIDS dan DBD
7. Belum optimalnya pencapaian prevalensi kekurangan gizi (underweight) stunting dan wasting pada anak balita

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan diklasifikasikan menjadi permasalahan pokok dan permasalahan, serta akar penyebab masalahnya. Perumusan masalah dalam rancangan Awal RPJMD Kota Dumai Tahun 2025–2029 meramu dari evaluasi capaian kinerja urusan pemerintahan hingga tahun 2024 yang kemudian digabungkan dengan telaah visi-misi kepala daerah terpilih. Mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029, permasalahan pokok daerah Kota Dumai yang diprioritaskan terkait urusan kesehatan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menghambat daya saing Kota Dumai.

Berdasarkan Laporan KLHS RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 permasalahan utama terkait ketidakmerataan pertumbuhan penduduk yang mengancam keberlanjutan pembangunan di Kota Dumai urusan kesehatan adalah ketimpangan akses layanan kesehatan antar wilayah dengan akar masalah: 1)

terbatasnya fasilitas kesehatan di wilayah terpencil, 2) kekurangan tenaga medis dan peralatan di puskesmas dan 3) belum optimalnya program BPJS kesehatan.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai selama periode 5 tahun terakhir (tahun 2020-2024) bahwa angka kematian (morbiditas) yang ditunjukkan melalui pencapaian indikator Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Ibu di Kota Dumai berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan. Penyebab utama kematian bayi khususnya neonatal sangat erat kaitannya dengan permasalahan selama masa kehamilan, pada saat persalinan, serta perawatan bayi baru lahir terutama pada usia satu bulan pertama kehidupan. Tantangan ke depan adalah mempersiapkan calon ibu agar benar-benar siap untuk hamil dan melahirkan dan menjaga agar terjamin kesehatan lingkungan yang mampu melindungi bayi dari infeksi. Penyebab lain kematian neonatal, bayi dan balita di Kota Dumai adalah infeksi khususnya pnemonia dan diare. Ini berkaitan erat dengan perilaku hidup sehat ibu dan juga kondisi lingkungan setempat. Adanya kasus Kematian Ibu, kondisi ini kemungkinan disebabkan antara lain kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan faktor determinan lainnya. Penyebab utama kematian ibu di Kota Dumai yaitu Perdarahan, Hypertensi/preeklamsi dan Gangguan Sistem Peredaran Darah. Kematian ibu pada umumnya banyak terjadi pada kelompok ibu nifas dan pada kelompok umur 20-35 tahun. Mayoritas kasus kematian ibu merupakan rujukan kasus maternal resti dan komplikasi dari praktek bidan swasta dan bidan desa ke RSUD Kota Dumai. Penyebab kematian ibu ini dapat diminimalisir apabila kualitas *Antenatal Care* dilaksanakan dengan baik. Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan kondisi ibu hamil tidak sehat antara lain adalah penanganan komplikasi, anemia, ibu hamil yang menderita diabetes, hipertensi, malaria, dan empat terlalu (terlalu muda <20 tahun, terlalu tua > 35 tahun, terlalu dekat jaraknya 2 tahun dan terlalu banyak anaknya > 3 tahun). Potensi dan tantangan dalam penurunan kematian ibu dan anak adalah jumlah tenaga kesehatan yang menangani kesehatan ibu khususnya bidan sudah relatif tersebar ke seluruh wilayah Kota Dumai, namun kompetensi masih belum memadai. Puskesmas perawatan yang merupakan puskesmas PONED pelayanannya belum optimal, sedangkan Rumah Sakit

PONEK sudah ada yakni RSUD Kota Dumai. Namun kualitas pelayanan di RSUD Kota Dumai belum optimal karena terbatasnya kuantitas dan kualitas/kompetensi serta terbatasnya kapasitas tempat tidur ruang kebidanan sehingga tidak semua rujukan kasus maternal resti dan komplikasi dapat ditangani. Pada umumnya kasus kematian bayi, kematian balita dan kematian ibu merupakan kasus kematian dengan rujukan ke rumah sakit. Dengan ditetapkannya RSUD Kota Dumai menjadi rumah sakit rujukan regional oleh Pemerintah Pusat, maka pasien yang berobat ke RSUD Kota Dumai tidak hanya pasien yang berasal dari Kota Dumai namun juga pasien yang berasal dari Kabupaten/Kota lain di Provinsi Riau dan juga dari luar Provinsi Riau.

Untuk penyakit menular, prioritas masih tertuju pada penyakit HIV/AIDS, Tuberculosis, dan Demam Berdarah. Kecenderungan prevalensi kasus HIV pada penduduk usia produktif meningkat. Penyakit Demam Berdarah (DBD) masih merupakan penyakit endemis di Kota Dumai. Kasus DBD mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023 (Insidens Rate DBD = 198,03 per 100.000 penduduk) dan 2024. Meskipun berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai, namun kasus DBD belum bisa ditekan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan perubahan cuaca yang ekstrim yang berakibat adanya banjir, tingkat mobilitas penduduk masih tinggi dan $\pm 80\%$ penduduk Kota Dumai masih menggunakan bak/drum sebagai tempat penampungan air, serta rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk. Disamping itu penyakit *neglected diseases* seperti kusta dan filariasis masih terus dilakukan pengendalian dan pencegahan. Angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti polio, campak, difteri, pertusis, hepatitis B dan tetanus baik pada maternal maupun neonatal kembali ditemukan lagi seperti difteri dan campak.

Selama lima tahun terakhir ini, telah terjadi transisi epidemiologis yang signifikan, penyakit tidak menular telah menjadi beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat juga. Kota Dumai saat ini sedang mengalami *triple burden* penyakit, yaitu penyakit tidak menular dan penyakit menular sekaligus serta munculnya new emerging diseases. Penyakit-penyakit tidak menular (PTM)

mulai mendominasi pola penyakit rawat jalan terbesar baik di rumah sakit maupun puskesmas seperti penyakit Hipertensi, Diabetes Mellitus, Gastritis, dan penyakit jantung. Berdasarkan penyebab kematian di Kota Dumai selama tahun 2020-2024, pada umumnya penyebab kematian didominasi oleh penyakit tidak menular (PTM) seperti penyakit jantung, Diabetes Militus, Stroke, Hypertensi dan Gagal Ginjal. Penyakit tidak menular (PTM) umumnya dipengaruhi oleh keadaan demografi, sosial ekonomi dan sosial budaya seperti meningkatnya umur harapan hidup, adanya kondisi lingkungan yang merugikan kesehatan seperti pencemaran udara dan rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat serta makin tingginya paparan faktor resiko seperti merokok, pola aktifitas fisik (kurang olah raga), pola makan yang tinggi lemak dan rendah serat. Sebagian besar penderita tidak mengetahui bahwa dirinya menderita penyakit tidak menular. Sedangkan penyakit infeksi emerging yang tetap menjadi perhatian seperti Avian Influenza A(H5N1), Covid 19, Mpox dan penyakit virus Marburg dan Ebola.

Selama tahun 2020 s/d 2024 pencapaian status gizi balita di Kota Dumai khususnya persentase balita dengan gizi kurang dan balita dengan gizi buruk berfluktuasi dan cenderung meningkat. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dalam rangka percepatan pencapaian ***Sustainable Development Goals (SDG's)*** terutama tujuan ***kedua*** yakni ***Mengakhiri Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Meningkatkan Gizi, serta Mendorong Pertanian yang Berkelanjutan*** yang salah satu indikator kinerjanya adalah menurunnya prevalensi balita gizi kurang (*underweight*), prevalensi balita kurus (*wasting*) dan prevalensi balita pendek (*stunting*).

Persentase rumah tangga yang mempraktikkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meningkat, namun pencapaiannya masih jauh dari target yang ditetapkan. Salah satu indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang pencapaiannya rendah adalah perilaku merokok. Konsumsi rokok meningkat secara pesat dari tahun ke tahun dan saat ini Indonesia merupakan negara nomor 3 (tiga) dengan jumlah perokok tertinggi di dunia setelah Cina dan India. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dari pengolahan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2024 di Propinsi Riau, pada komoditi makanan, rata-rata konsumsi atau pengeluaran per kapita seminggu untuk rokok

dan tembakau menempati urutan ke dua tertinggi setelah pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi. Ini menunjukkan bahwa konsumsi rokok telah sampai pada situasi yang mengkhawatirkan dan merupakan epidemi yang mengancam terutama di bidang kesehatan karena menyebabkan penyakit jantung dan kanker yang dapat berujung pada kematian. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan kesehatan perokok dan orang lain yang terpapar asap rokok, tetapi mengancam ekonomi keluarga masyarakat miskin. Ironisnya, pelaku konsumsi rokok tidak hanya pada orang dewasa, namun juga pada remaja dan anak sekolah. Hal ini sebagai dampak dari maraknya iklan di media penyiaran dan media luar ruang serta pemberian sponsor oleh industri tembakau. Berbagai upaya untuk pengendalian dampak konsumsi rokok bagi kesehatan di Kota Dumai telah dilakukan salah satunya melalui penetapan Peraturan Walikota Dumai Nomor 11 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Dumai, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Meskipun Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 tentang Pedoman

Nomor 7 Tahun 2011

pelaksanaan kawasan tanpa rokok telah ditetapkan, namun masih banyak dijumpai orang yang merokok di angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang lainnya yang notabene telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Ini menunjukkan kebijakan pengendalian dampak konsumsi rokok belum didukung oleh semua pihak. Oleh sebab itu, upaya pengendalian dampak konsumsi rokok harus dilaksanakan secara komprehensif sebagai tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat. Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) lainnya yang pencapaiannya juga rendah adalah perilaku memberantas jentik di rumah sekali seminggu. Salah satu penyebab masih tingginya angka kesakitan malaria dan DBD adalah karena masih rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk. Padahal upaya yang paling efektif untuk mencegah timbulnya penyakit DBD dan Malaria adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat secara terus menerus.

Walaupun ketersediaan obat dan vaksin cukup baik, tetapi pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan pada umumnya masih belum sesuai

standar. Penggunaan obat generik sudah cukup tinggi, tetapi penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan belum optimal. Hal ini terutama disebabkan oleh masih rendahnya penerapan formularium dan pedoman penggunaan obat secara rasional. Di lain pihak, penduduk yang mengetahui tentang seluk-beluk dan manfaat obat generik, masih sangat sedikit. Pengetahuan masyarakat tentang obat secara umum juga masih belum baik. Sementara itu, mutu sarana produksi makanan umumnya masih belum baik, akibat kurang efektifnya pengawasan dan pembinaan. Masih ada ditemukan IRTP dan jajanan anak sekolah yang masih menggunakan bahan-bahan berbahaya dalam proses pengolahan makanan dan minumannya seperti formalin, boraks dan bahan pewarna berbahaya. Lebih lanjut, hasil koordinasi & kolaborasi pengawasan dan pembinaan antara Dinas Kesehatan dan Loka POM Kota Dumai ada beberapa sarana seperti Industri Rumah Tangga Pangan/IRTP, Toko Obat, Toko Makanan dan Minuman, Toko Kosmetik, Apotek, dan Depot Jamu yang belum melaksanakan pengelolaan pangan dan pemakaian bahan berbahaya sesuai standar. Pada umumnya hasil temuan adalah produk (kosmetik dan makanan minuman) tanpa izin edar, produk jamu/obat tradisional mengandung bahan kimia obat (BKO), obat daftar G, pangan rusak, pangan kadaluarsa, pengelolaan IRTP yang tidak sesuai standar, pengelolaan obat yang tidak sesuai standar.

Pertumbuhan penduduk Kota Dumai ditandai dengan adanya *window opportunity* di mana rasio ketergantungannya positif, yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari pada yang usia non-produktif. Jumlah penduduk Kota Dumai pada tahun 2024 adalah 343.597 orang. Dengan laju pertumbuhan sebesar 3,31% per tahun berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024, maka jumlah penduduk Kota Dumai diperkirakan akan meningkat pada tahun selanjutnya. Jumlah wanita usia subur juga diperkirakan akan meningkat pada tahun berikutnya. Dari jumlah tersebut, diperkirakan ada hampir 10.000 ibu hamil setiap tahun. Angka ini merupakan estimasi jumlah persalinan dan jumlah bayi lahir, yang juga menjadi petunjuk beban pelayanan ANC, persalinan, dan neonatus/bayi.

Program Jaminan Kesehatan Kota (Jamkesko) Kota Dumai dimulai sejak tahun 2009 dan terus berkembang sampai sekarang. Dimulainya Jamkesko di

Kota Dumai dikuatkan melalui Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembebasan Biaya Perawatan dikelas III bagi Penduduk Kota Dumai dan telah beberapa kali diperbaharui terakhir melalui Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Kota Bagi Masyarakat Kota Dumai. Meskipun capaian cakupan Jaminan Kesehatan Kota Dumai telah mencapai target Nasional sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, namun masih ada penduduk Kota Dumai yang belum memiliki jaminan kesehatan, terutama penduduk pendatang yang tidak memiliki KTP Kota Dumai.

Permasalahan penduduk pendatang atau yang tidak memiliki dokumen kependudukan Kota Dumai merupakan permasalahan terbesar dalam pelaksanaan program kesehatan di Kota Dumai. Apabila permasalahan penduduk pendatang tersebut tidak ditangani secara serius oleh Pemerintah Kota Dumai, maka dapat berdampak pada kegagalan pencapaian pelaksanaan program kesehatan yang diukur melalui indikator angka kematian (kematian bayi, balita dan ibu melahirkan), angka kesakitan, serta persentase balita dengan gizi buruk dan gizi kurang. Pada umumnya permasalahan kesehatan yang ada banyak merupakan kontribusi dari penduduk pendatang pendatang tersebut. Para penduduk pendatang pada umumnya jarang mengakses pelayanan kesehatan dasar karena status mereka yang ilegal yang otomatis tidak mempunyai kartu identitas seperti KTP. Tingginya angka pendapatan perkapita di Kota Dumai diindikasikan menjadi daya tarik bagi penduduk pendatang yang berasal dari kabupaten/kota di Provinsi Riau maupun terhadap Provinsi tetangga untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di Kota Dumai.

Tabel 2.34 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kesehatan Kota Dumai

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat	Belum merata, bermutu dan terjangkau akses pelayanan kesehatan	Adanya daerah sulit dijangkau karena kondisi geografis Terbatasnya transportasi dan infrastruktur (jalan, jembatan, jaringan komunikasi dan listrik) Penduduk di daerah sulit tinggal tidak terkonsentrasi di satu wilayah tetapi menyebar di beberapa kantong wilayah
		Ketersedian sarana dan prasarana kesehatan belum sesuai standar	Bangunan fasilitas kesehatan sudah banyak yang rusak Belum semua fasilitas kesehatan memiliki fasilitas sarana air bersih Belum semua fasilitas kesehatan memiliki sarana pengamanan (pagar dan pos satpam) Belum semua puskesmas memiliki rumah dinas tenaga kesehatan Belum semua fasilitas kesehatan memiliki fasilitas IPAL sesuai standar Belum semua fasilitas kesehatan memiliki kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 yang layak Belum lengkapnya ketersediaan peralatan kesehatan dan non kesehatan di fasilitas kesehatan
		Ketersedian sumber daya manusia kesehatan belum sesuai standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan dengan status PNS lebih sedikit dari TKS Belum semua fasilitas kesehatan memiliki sumber daya manusia kesehatan sesuai jenis ketenagaan Penyebaran sumber daya manusia kesehatan masih belum merata Mutu sumber daya manusia kesehatan masih belum optimal

		Masih belum terkendalinya angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan (morbiditas)	Jumlah kasus kematian bayi dan balita cenderung meningkat, sementara jumlah kasus kematian ibu berfluktuasi Jumlah kasus DBD dan HIV/AIDS meningkat, serta cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV masih rendah Jumlah kesembuhan penderita TB Paru menurun dan cakupan pelayanan orang terduga Tuberkulosis masih rendah Munculnya penyakit PD3I pasca pandemic covid 19 yang sampai saat ini masih belum teratasi secara optimal Jumlah kasus kematian akibat penyakit tidak menular meningkat (penyakit jantung, Stroke, Hipertensi dan Diabetes Mellitus dll) Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap belum optimal dan jumlah baduta yang mendapat imunisasi lanjutan masih rendah
		Adanya penurunan status gizi balita	Jumlah kasus balita dengan gizi kurang dan gizi buruk meningkat Jumlah kasus balita stunting meningkat Cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif masih di bawah target.
		Belum optimalnya penggunaan obat rasional dan pengawasan obat dan makanan	Pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan masih belum sesuai standar Pengetahuan penduduk tentang obat masih rendah Pengawasan dan pembinaan terhadap sarana produksi makanan minuman dan kefarmasian masih kurang efektif

		Masih rendahnya peran serta aktif masyarakat (PHBS)	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan PHBS masih rendah Implementasi Peraturan Walikota Dumai Nomor 11 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Dumai belum optimal Cakupan penimbangan balita di posyandu masih rendah pasca pandemic COVID 19
		Belum semua penduduk Kota Dumai terjamin pembiayaan asuransi kesehatan	Masih ada penduduk Kota Dumai yang belum menjadi peserta JKN Mobilitas penduduk pendatang atau yang tidak memiliki dokumen kependudukan Kota Dumai cukup tinggi Ketersediaan dana untuk pembiayaan asuransi kesehatan masih terbatas Data kependudukan yang tidak valid (punya KTP Dumai tetapi NIK tidak terbaca di aplikasi P-Care)

2.2.2 Isu Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan daerah, internasional, kebijakan nasional dan provinsi. Hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut. Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar dan signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik.
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.

6. Janji politik dalam penyampaian Visi dan Misi serta Program Unggulan Walikota Terpilih yang perlu diwujudkan selama proses pilkada Kota Dumai Tahun 2024.

Mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029, secara Nasional isu strategis terkait sektor kesehatan adalah:

- Angka Kematian Ibu masih tinggi (189/100.000 Kelahiran Hidup)
- Stunting masih tinggi (21,50%)
- Prevalensi obesitas terus meningkat (23,4%)
- Wasting masih tinggi (8,5%)
- Kasus baru tuberkulosis peringkat ke 2 dunia (387 per 100.000 penduduk)
- Kasus baru kusta peringkat ke 3 dunia (10.976 kasus baru)
- Masih terdapat 39,96% puskesmas tidak tersedia 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar
- Masih terdapat 27,9 persen Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C belum memiliki 7 dokter spesialis dasar dan penunjang
- Rumah sakit terakreditasi paripurna masih belum optimal (37,0%)
- Puskesmas terakreditasi paripurna masih belum optimal (28,0%)

Mempedomani RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029, isu strategis Kota Dumai terkait urusan kesehatan adalah isu demografi yakni:

- a) Ketersediaan sumber daya manusia kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai masih belum optimal secara kualitas dan kuantitas, masih didominasi oleh tenaga Non ASN serta penyebarannya belum merata masih terkonsentrasi di perkotaan.
- b) Belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat.
- c) Belum optimalnya pemerataan akses layanan kesehatan di seluruh wilayah, terutama di daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau di Kota Dumai;
- d) Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah Kota Dumai masih belum memenuhi standar sesuai peraturan yang berlaku. Masih ada 5 kelurahan dari 36 kelurahan atau sebesar 13,89% yang belum memiliki fasilitas pelayanan kesehatan (ILP) karena ketidaktersediaan lahan atau karena dampak pemekaran kelurahan.

- e) Belum optimalnya penanganan penyakit tidak menular di Kota Dumai;
- f) Belum optimalnya upaya pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang menyeluruh di Kota Dumai;
- g) Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan.

Adapun isu strategis yang diangkat dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria yaitu memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah dan nasional; merupakan tugas dan tanggung jawab PD Dinas Kesehatan; mempunyai dampak yang luas terhadap daerah dan masyarakat; memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan kesehatan; dan kemudahannya untuk dikelola. Berdasarkan telaahan permasalahan kesehatan maka dapat disimpulkan isu-isu strategis Dinas Kesehatan yang perlu ditangani sebagai berikut:

1. Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh Kota Dumai, terutama di wilayah kerja puskesmas yang memiliki daerah sulit dijangkau karena kondisi geografis, terbatasnya transportasi dan infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, jaringan komunikasi) seperti wilayah kerja Puskesmas Sungai Sembilan, Bukit Kapur, Bukit Kayu Kapur dan Medang Kampai.
2. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta pelayanan medis yang bermutu dan merata di setiap puskesmas. Sarana dan prasarana kesehatan yang ada belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
3. Pelayanan kesehatan ibu dan anak belum optimal yang ditunjukkan dengan pencapaian Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita yang cenderung mengalami peningkatan dan Angka Kematian Ibu yang berfluktuasi selama periode lima (lima) tahun terakhir.
4. Adanya tripple burden penyakit akibat adanya transisi epidemiologi penyakit yang signifikan dimana penyakit tidak menular telah menjadi beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat juga seperti Malaria, TB Paru, HIV/AIDS dan DBD serta munculnya kembali penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) pasca pandemic COVID 19 seperti Difteri dan Campak

5. Masih belum terkendalinya status gizi balita dimana jumlah kasus balita dengan gizi kurang, gizi buruk dan balita stunting cenderung mengalami peningkatan selama periode 5 (lima) tahun terakhir.
6. Penggunaan Obat Rasional dan Pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.
7. Masih rendahnya peran serta aktif masyarakat (PHBS) dalam pembangunan kesehatan.
8. Masih belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM kesehatan sesuai kompetensi serta ketersediaan SDM Kesehatan belum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat



B A B III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029

Kesehatan yang holistik dan komprehensif mencakup kesehatan secara fisik, mental, sosial dan spiritual dengan pendekatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Derajat kesehatan masyarakat yang holistik dan komprehensif merupakan tujuan utama dari pembangunan kesehatan di Kota Dumai, dengan sasaran kesehatan secara ***Continuum of Care*** (dari lahir hingga lansia).

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 bahwa Visi Indonesia Emas 2045 yakni “Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” guna mencapai Tujuan Bersama Bangsa. Ada 5 (lima) sasaran utama Visi Indonesia Emas 2025, khusus urusan kesehatan termasuk di dalam Sasaran Visi Nomor 4 Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat dengan indikator Indeks Modal Manusia (indeks). Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan melalui 8 (delapan) misi Pembangunan (Asta Cita), salah satunya Misi Pertama yakni Transformasi Sosial, dimana urusan kesehatan termasuk di dalam Misi Pertama: Transformasi Sosial. Transformasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil dan kohesif, dengan salah satu arah kebijakannya adalah Kesehatan Untuk Semua. Kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan upaya kesehatan dan memperkuat sistem kesehatan. Lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, bahwa Tahapan Transformasi Sosial Tahap 1 pada tahun 2025-2029 adalah Penguatan Transformasi melalui Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlindungan Sosial.

Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 menyatakan ada 17 Program Prioritas RPJMN 2025-2029, khusus urusan kesehatan adalah pada program prioritas ke 7 (tujuh) yakni “Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat Untuk Rakyat”. Mengacu pada Asta Cita 2025-2029 dalam rangka

mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, maka Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) terkait kesehatan adalah program kedua “Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Menuntaskan Kasus TBC, Dan Membangun Rumah Sakit Lengkap Berkualitas Di Kabupaten/Kota”.

Mempedomani RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029, Visi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2025-2029 adalah **“Kota Industri Yang Unggul, Sejahtera Dan Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu Tahun 2029.”** Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kota Dumai tersebut di atas maka didukung oleh 4 (empat) misi, dengan misi terkait kesehatan yakni **Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Yang Berdaya Saing.** Tujuan Pembangunan Kota Dumai dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 terkait kesehatan adalah Tujuan 1: Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar penduduk yang sejalan dengan penambahan penduduk dan arus urbanisasi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2029 maka dirumuskan tujuan yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah (PD). Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan yang merupakan bagian dari sasaran dalam RPJMD Kota Dumai 2025-2029 yaitu “Kesehatan untuk Semua” yang tertuang dalam Misi 1 RPJMD Kota Dumai (Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Yang Berdaya Saing), akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Dumai. Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka tujuan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” dengan indikator tujuan adalah Umur Harapan Hidup (UHH).

3.2 Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029

Mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-

2029, bahwa isu strategis Transformasi Sosial khusus kesehatan adalah pembangunan kesehatan dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, peningkatan kapasitas ketahanan kesehatan dan pemerataan kapasitas dan responsiveness system kesehatan di seluruh wilayah. Sasaran pembangunan Transformasi Sosial: Kesehatan Untuk Semua dengan target indikator yang akan dicapai pada tahun 2029 adalah:

1. Usia Harapan Hidup (tahun): 75,4 tahun
2. Kesehatan Ibu dan Anak:
 - a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup): 77
 - b. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%): 11
3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk): 190
4. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%): 98

Ada sebanyak 7 (tujuh) highlight intervensi sasaran pembangunan Transformasi Sosial: Kesehatan Untuk Semua antara lain: 1) Investasi pelayanan kesehatan primer, 2) Penurunan kematian ibu, 3) Penurunan stunting, 4) pengendalian penyakit menular, 5) Pengendalian penyakit tidak menular (PTM), 6) Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional dan 7) Produksi dan pendayagunaan SDM Kesehatan.

Mengacu pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029, sasaran pembangunan daerah terkait kesehatan dari Tujuan 1: Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar penduduk yang sejalan dengan penambahan penduduk dan arus urbanisasi adalah Kesehatan Untuk Semua.

Mempedomani surat Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK 2025-2029 dalam RPJMD Renstra-PD 2025-2029, maka indikator sasaran terkait kesehatan sesuai Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Umur Harapan Hidup (UHH) (tahun)
2. Jumlah kelahiran hidup
3. Jumlah kematian balita absolut

4. Jumlah kematian ibu absolut
5. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
6. Penanganan Tuberkulosis:
 - a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)
 - b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)
7. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)
8. Cakupan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap
9. Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029 adalah meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. Penjabaran tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.35 Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN											
- 1.1.1.1. Kesehatan untuk Semua	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	73,5	73,66	73,81	73,97	74,13	74,28	74,44	
			Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	81,12	82	83	84	85	86	87	
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	58,33	58,33	58,33	58,33	66,67	66,67	66,67	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	92	92,5	93	93	93,5	94	94	
			Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	0	75	76	77	78	80	83	
			Cakupan penemuan kasus TB (%)	79,28	80	83	85	87	90	92	
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	0	12,4	12	12	11	10	10	
			Prevalensi obesitas > 18 tahun (%)	6,97	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	
			Prevalensi depresi pada usia > 15 tahun (%)	0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
			Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Per 1000)	4,73	4,8	4,85	4,9	4,95	5	5	
			Persentase puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	60	60	70	80	90	100	100	
			Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	54,45	55	60	65	70	80	90	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	67,69	69,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	0	50	50	50	58,33	66,67	75	
			Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	42,5	80,5	80,5	81,5	81,5	82,5	83,5	

3.3 Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang langkah/upaya komprehensif berisikan langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya optimalisasi sumber daya, tahapan, locus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD

Strategi di dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 terkait Sasaran: Kesehatan Untuk Semua adalah peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dan berkualitas. Sedangkan strategi di dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029 ada 4 (empat) yakni:

1. Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai standar
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sesuai standar
3. Meningkatkan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan gerakan masyarakat hidup sehat serta pembangunan berwawasan kesehatan

Adapun penahapan Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.36 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyediaan dan peningkatan kapasitas layanan kesehatan primer (puskesmas dan jaringannya) dan layanan kesehatan rujukan (RSUD)	Penyediaan dan peningkatan kapasitas layanan kesehatan primer (puskesmas dan jaringannya) dan layanan kesehatan rujukan (RSUD)	Penyediaan dan peningkatan kapasitas layanan kesehatan primer (puskesmas dan jaringannya) dan layanan kesehatan rujukan (RSUD)	Penguatan sarana dan prasarana dan layanan kesehatan primer (puskesmas dan jaringannya) dan layanan kesehatan rujukan (RSUD)	Penguatan sarana dan prasarana dan layanan kesehatan primer (puskesmas dan jaringannya) dan layanan kesehatan rujukan (RSUD)
Pengintegrasian pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup di puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	Pengintegrasian pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup di puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	Pengintegrasian pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup di puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	Penguatan integrasi pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup di puskesmas dan fasilitas kesehatan	Penguatan integrasi pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup di puskesmas dan fasilitas kesehatan

3.4 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasional NSPK sesuai tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Rumusan arah kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029 adalah seperti tabel berikut:

Tabel 3.37
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kesehatan Untuk Semua	1. Penguatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan 2. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal 3. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan 4. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya 5. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan 6. Pemenuhan jumlah, peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan serta pemberian insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang ditugaskan di kecamatan perbatasan 7. Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting 8. Percepatan eliminasi penyakit menular, tidak menular dan penyakit tropis terabaikan	1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 2. Penyediaan layanan kesehatan menggunakan siklus hidup (continuum of care) 3. Peningkatan kualitas, kuantitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan 4. Peningkatan pengendalian dan pengawasan perizinan dan penerbitan sertifikat sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman 5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui kemitraan dan partisipasi lintas sektor, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, swasta dan pemangku kepentingan terkait lainnya	

Penjabaran tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.38
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029

VISI : Kota Industri Yang Unggul, Sejahtera Dan Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu Tahun 2029			
MISI I : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Yang Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai standar	1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 2. Penyediaan layanan kesehatan menggunakan siklus hidup (continuum of care)
		2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	3. Peningkatan kualitas, kuantitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan
		3. Meningkatkan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	4. Peningkatan pengendalian dan pengawasan perizinan dan penerbitan sertifikat sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
		4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan gerakan masyarakat hidup sehat serta pembangunan berwawasan kesehatan	5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui kemitraan dan partisipasi lintas sektor, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, swasta dan pemangku kepentingan terkait lainnya



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KESEHATAN



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KESEHATAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Kota Dumai pada tahun 2029 serta memperhatikan pencapaian hasil pembangunan bidang kesehatan di Kota Dumai tahun 2020-2024, maka pada tahun 2025-2029 akan dilaksanakan strategi dengan fokus pada prioritas pembangunan bidang kesehatan Kota Dumai yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Kota Dumai.

Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan juga mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single kode base untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029 terdiri dari: Non Urusan dan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari **5 program, 24 kegiatan dan 111 sub kegiatan** dengan perincian: ***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** sebanyak 1 program, 9 kegiatan dan 46 Sub Kegiatan; dan ***Program Urusan Wajib*** terdiri dari 4 program, 15 kegiatan dan 65 Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4.39
Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan
Kota Dumai Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025

No	Nomor Rekening Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
I.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1)	1.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
3	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
4	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan penyusunan dokume DPA-SKPD
5	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
6	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah
2)	1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
9	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
10	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKP
11	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3)	1.02.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
12	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD
13	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
4)	1.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
14	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
15	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
16	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
17	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
5)	1.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
18	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
19	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
20	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga
21	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor
22	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
23	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
24	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
25	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
26	1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

No	Nomor Rekening Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
6)	1.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
27	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan mebel
28	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
7)	1.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
29	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
30	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
31	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
8)	1.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
32	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
33	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
34	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
9)	1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
35	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Dumai Kota
36	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Dumai Barat
37	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Bukit Kapur
38	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Sungai Sembilan
39	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Medang Kampai
40	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Bumi Ayu
41	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Bukit Timah
42	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Jaya Mukti
43	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Purnama
44	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Bukit Kayu Kapur
45	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Laboratorium kesehatan pemeriksaan kualitas air kelas A
46	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD RSUD Dumai
II.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
10)	1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
47	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
48	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas
49	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya
50	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
51	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan puskesmas
52	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya
53	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
54	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas

No	Nomor Rekening Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
55	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya
56	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehatan
57	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan
58	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi
59	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
60	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
61	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
11)	1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
62	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil
63	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin
64	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
65	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita
66	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
67	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif
68	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut
69	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi
70	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
71	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
72	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
73	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV
74	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)
75	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
76	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga
77	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
78	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan
79	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan surveilans kesehatan
80	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
81	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
82	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat
83	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat
84	1.02.02.2.02.0032	Operasional pelayanan rumah sakit
85	1.02.02.2.02.0033	Operasional pelayanan Puskesmas
86	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
87	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
88	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
89	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis

No	Nomor Rekening Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
90	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)
91	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
92	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Upaya Kesehatan Reproduksi
93	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
94	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi
12)	1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
95	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi kesehatan
13)	1.02.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
96	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
97	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota
98	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan
99	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan
III.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
14)	1.02.03.2.01	Kegiatan Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di wilayah kabupaten Kota
100	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan
15)	1.02.03.2.02	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
101	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
102	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan
16)	1.02.03.2.03	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
103	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
IV.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
17)	1.02.04.2.01	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
104	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)
18)	1.02.04.2.03	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

No	Nomor Rekening Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
105	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga
19)	1.02.04.2.04	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
106	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penertiban sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)
20)	1.02.04.2.05	Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
107	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penertiban striker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan
21)	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
108	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan
V.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
22)	1.02.05.2.01	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
109	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat
23)	1.02.05.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
110	1.02.05.2.02.0002	Pertumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
24)	1.02.05.2.03	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
111	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)

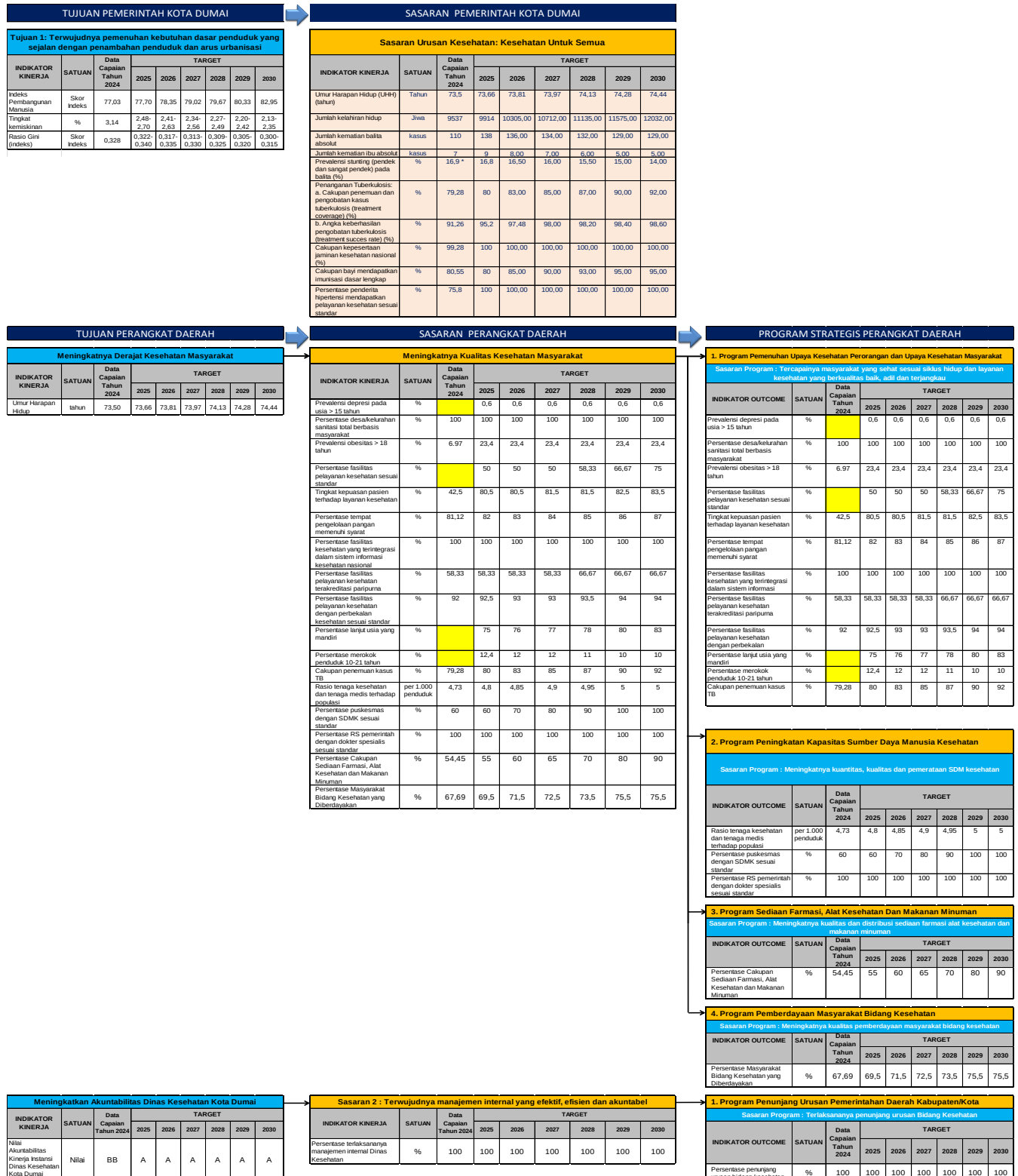
Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Cascading Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Gambar 4.6
Cascading Pemerintah Kota Dumai dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029

Cascading Pemerintah Kota Dumai

Visi : "Kota Industri Yang Unggul, Sejahtera Dan Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu Tahun 2029"

MISI I : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS YANG BERDAYA SAING



Mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, bahwa periode Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah Tahun 2025-2029. Namun demikian dalam penyusunan daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Hal tersebut karena program tahun 20230 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2030 terdiri dari Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Dumai dan 13 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan yakni 1) Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Puskesmas Dumai Kota, 2) Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Puskesmas Dumai Barat, 3) Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Puskesmas Bukit Kapur, 4) Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Puskesmas Sungai Sembilan, 5) Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Puskesmas Medang Kampai, 6) Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Puskesmas Bumi Ayu, 7) Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Puskesmas Bukit Timah, 8) Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Puskesmas Jaya Mukti, 9) Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Puskesmas Purnama, 10) Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Puskesmas Bukit Kayu Kapur, 11) Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Instalasi Farmasi Kelas A, 12) Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A, dan 13) Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RSUD Dumai.

Tabel 4.40 Program Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					492.144.319.898,00		513.184.311.398,00		523.184.311.398,00		471.169.799.010,00		461.169.799.010,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					357.992.454.910,00		369.769.964.680,00		368.772.994.905,00		371.148.995.224,00		365.461.276.412,00	
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	100	219.891.990.605,00	100	219.623.586.655,00	100	218.711.174.905,00	100	218.952.410.224,00	100	212.796.886.412,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (RSUD)	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (RSUD) (%)	100	100	100	117.725.693.025,00	100	128.504.348.025,00	100	127.818.620.000,00	100	129.495.135.000,00	100	129.495.210.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Dumai Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	100	2.550.000.000,00	100	2.600.000.000,00	100	2.650.000.000,00	100	2.650.000.000,00	100	2.650.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Dumai Barat	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	100	1.800.000.000,00	100	1.900.000.000,00	100	1.910.000.000,00	100	1.915.000.000,00	100	1.920.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Bukit kapur	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	100	1.796.500.000,00	100	1.950.000.000,00	100	2.050.000.000,00	100	2.100.000.000,00	100	2.150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Sungai Sembilan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	100	3.109.295.000,00	100	3.171.480.000,00	100	3.234.900.000,00	100	3.299.590.000,00	100	3.365.580.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Medang Kampai	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	100	1.501.099.000,00	100	1.577.000.000,00	100	1.655.000.000,00	100	1.738.000.000,00	100	1.825.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Bumi Ayu	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	100	1.550.000.000,00	100	1.580.000.000,00	100	1.610.000.000,00	100	1.640.000.000,00	100	1.670.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Bukit Timah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	100	966.000.000,00	100	1.235.000.000,00	100	1.297.000.000,00	100	1.362.000.000,00	100	1.430.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Jaya Mukti	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	100	3.255.000.000,00	100	3.628.000.000,00	100	3.670.000.000,00	100	3.680.000.000,00	100	3.685.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Purnama	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	100	1.750.000.000,00	100	1.780.000.000,00	100	1.810.000.000,00	100	1.830.000.000,00	100	1.850.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Bukit Kayu Kapur	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	100	1.861.450.000,00	100	1.954.550.000,00	100	2.052.300.000,00	100	2.154.860.000,00	100	2.262.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan Pada Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Air Kelas A	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	100	235.427.280,00	100	266.000.000,00	100	304.000.000,00	100	332.000.000,00	100	361.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					131.087.057.638,00		139.363.233.368,00		150.154.203.143,00		95.757.690.436,00		92.539.409.248,00	
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	6.97	23.4	23.4		23.4		23.4		23.4		23.4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	81.12	82	84		85		85		86		87		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	79.28	80	83		85		87		90		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	58.33	58.33	58.33		58.33		66.67		66.67		66.67		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	92	92.5	93		93		93.5		94		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	0	50	50		50		58.33		66.67		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	0	12.4	12		12		11		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	0	75	76		77		78		80		83		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada RSUD	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	85	85	85	72.681.576.018,00	87	71.420.622.018,00	87	71.906.350.043,00	89	28.215.322.655,00	91	29.315.247.655,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Dumai Kota	Cakupan penemuan kasus TB (%)	79.28	80	83	711.363.750,00	85	711.363.750,00	87	711.363.750,00	90	711.363.750,00	92	711.363.750,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	0	76	76		76		76		76		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Dumai Barat	Cakupan penemuan kasus TB (%)	79.28	80	83	474.684.650,00	85	474.684.650,00	87	474.684.650,00	90	474.684.650,00	92	474.684.650,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	76	76	76		76		76		76		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Bukit kapur	Cakupan penemuan kasus TB (%)	79.28	80	83	451.238.000,00	85	451.238.000,00	87	451.238.000,00	90	451.238.000,00	92	451.238.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100				
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	76	76	76		76		76		76				
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Sungai Sembilan	Cakupan penemuan kasus TB (%)	79.28	80	83	832.237.800,00	85	832.237.800,00	87	832.237.800,00	90	832.237.800,00	92	832.237.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100				
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	76	76	76		76		76		76				
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Medang Kampai	Cakupan penemuan kasus TB (%)	79.28	80	83	418.337.950,00	85	418.337.950,00	87	418.337.950,00	90	418.337.950,00	92	418.337.950,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100				
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	76	76	76		76		76		76				
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Bumi Ayu	Cakupan penemuan kasus TB (%)	79.28	80	83	687.183.500,00	85	687.183.500,00	87	687.183.500,00	90	687.183.500,00	92	687.183.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100				
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	76	76	76		76		76		76				
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Bukit Timah	Cakupan penemuan kasus TB (%)	79.28	80	83	476.384.500,00	85	476.384.500,00	87	476.384.500,00	90	476.384.500,00	92	476.384.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100				
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	76	76	76		76		76		76				
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Purnama	Cakupan penemuan kasus TB (%)	79.28	80	83	511.932.000,00	85	511.932.000,00	87	511.932.000,00	90	511.932.000,00	92	511.932.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	76	76	76		76		76		76		76		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Jaya Mukti	Cakupan penemuan kasus TB (%)	79.28	80	83	660.035.000,00	85	660.035.000,00	87	660.035.000,00	90	660.035.000,00	92	660.035.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	76	76	76		76		76		76		76		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Bukit Kayu Kapur	Cakupan penemuan kasus TB (%)	79.28	80	83	582.941.500,00	85	582.941.500,00	87	582.941.500,00	90	582.941.500,00	92	582.941.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	76	76	76		76		76		76		76		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					2.147.681.000,00		2.949.987.000,00		3.151.987.000,00		3.153.987.000,00		2.055.987.000,00	
Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan pada Dinas Kesehatan	Persentase puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	60	60	70	1.147.681.000,00	80	1.149.987.000,00	90	1.151.987.000,00	100	1.153.987.000,00	100	1.155.987.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Per 1000 Penduduk)	4.73	4.80	4.85		4.90		4.95		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan pada RSUD	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	100	100	100	1.000.000.000,00	100	1.800.000.000,00	100	2.000.000.000,00	100	2.000.000.000,00	100	900.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					548.887.000,00		663.887.000,00		663.887.000,00		663.887.000,00		663.887.000,00	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman pada Dinas Kesehatan	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	54.45	55	60	548.887.000,00	65	663.887.000,00	70	663.887.000,00	80	663.887.000,00	90	663.887.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					368.239.350,00		437.239.350,00		441.239.350,00		445.239.350,00		449.239.350,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.pada Dinas Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	67.69	69.5	71.5	310.174.000,00	72.5	379.174.000,00	73.5	383.174.000,00	75.5	387.174.000,00	75.5	391.174.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Dumai Kota	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	67.69	59.5	71.5	7.390.000,00	72.5	7.390.000,00	73.5	7.390.000,00	75.5	7.390.000,00	75.5	7.390.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Dumai Barat	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	67.69	69.5	71.5	2.987.350,00	72.5	2.987.350,00	73.5	2.987.350,00	75.5	2.987.350,00	75.5	2.987.350,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Bukit Kapur	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	67.69	69.5	71.5	5.940.000,00	72.5	5.940.000,00	73.5	5.940.000,00	75.5	5.940.000,00	75.5	5.940.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Sungai Sembilan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	67.69	69.5	71.5	9.495.500,00	72.5	9.495.500,00	73.5	9.495.500,00	75.5	9.495.500,00	75.5	9.495.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Medang Kampai	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	67.69	69.5	71.5	190.000,00	72.5	190.000,00	73.5	190.000,00	75.5	190.000,00	75.5	190.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Bumi Ayu	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	67.69	69.5	71.5	2.915.000,00	72.5	2.915.000,00	73.5	2.915.000,00	75.5	2.915.000,00	75.5	2.915.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Bukit Timah	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	67.69	69.5	71.5	9.160.000,00	72.5	9.160.000,00	73.5	9.160.000,00	75.5	9.160.000,00	75.5	9.160.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Jaya Mukti	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	67.69	69.5	71.5	7.650.000,00	72.5	7.650.000,00	73.5	7.650.000,00	75.5	7.650.000,00	75.5	7.650.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Purnama	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	67.69	69.5	71.5	3.046.500,00	72.5	3.046.500,00	73.5	3.046.500,00	75.5	3.046.500,00	75.5	3.046.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Bukit Kayu Kapur	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	67.69	69.5	71.5	9.291.000,00	72.5	9.291.000,00	73.5	9.291.000,00	75.5	9.291.000,00	75.5	9.291.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
TOTAL KESELURUHAN					492.144.319.898,00		513.184.311.398,00		523.184.311.398,00		471.169.799.010,00		461.169.799.010,00	

TABEL 4.41 TEKNIS MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)			
1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN										
- 1.1.1. Kesehatan untuk Semua	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas kesehatan Masyarakat			Usia Harapan Hidup (UHH)					
					Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat					
					Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat					
					Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional					
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna					
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar					
					Persentase lanjut usia yang mandiri					
					Cakupan penemuan kasus TB					
					Persentase merokok penduduk 10-21 tahun					
					Prevalensi obesitas > 18 tahun					
					Prevalensi depresi pada usia > 15 tahun					
					Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi					
					Persentase puskesmas dengan SDM sesuai standar					
					Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar					
					Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman					
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar					
					Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan					
					Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan					
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Dinas Kesehatan			Prevalensi depresi pada usia > 15 tahun	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
						Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
						Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
						Cakupan penemuan kasus TB	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
						Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
						Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
						Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
						Presentase lanjut usia yang mandiri	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
						Terlaksananya Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah untuk UKM dan UKP Sesuai Standar		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
								Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1.02.02.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
					Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1.02.02.2.01.0007 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.01.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1.02.02.2.01.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	1.02.02.2.01.0015 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
					Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
					Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi	
				Tersedianya sarana fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
				Terlaksananya Peningkatan Mutu di sarana Rumah Sakit, Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinan	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1.02.02.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1.02.02.2.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1.02.02.2.04.0004 - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
				Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.pada Dinas Kesehatan		1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				Terlaksananya kelurahan siaga aktif	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
				Terlaksananya rumah tangga yang melaksanakan PHBS	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1.02.05.2.02.0002 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan pada Dinas Kesehatan	Terlaksananya posyandu mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
					Persentase puskesmas dengan SDM sesuai standar	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
					Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
					Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Terlaksananya tempat praktek tenaga kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1.02.03.2.01.0001 - Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
				Terlaksananya tenaga kesehatan Teregistrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Kota Dumai	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman pada Dinas Kesehatan	Terlaksananya apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, dan UMOT yang memenuhi persyaratan perizinan	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
				Terlaksananya industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air minum dan air bersih, pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
				Tersedianya dokumen pelaksanaan penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1.02.04.2.05 - Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1.02.04.2.05.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
				Tersedianya dokumen pelaksanaan pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
					Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
1.02.0.00.0.00.01.0013 - RSUD							
- 1.1.1. Kesehatan untuk Semua	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (RSUD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (RSUD)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya dokumen/laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.02.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
				Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada RSUD	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	
					Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1.02.02.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1.02.02.2.01.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
					Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	1.02.02.2.01.0015 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas	1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit		
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		
				Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit		
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		
				Tersedianya sarana fasilitas pelaya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
				Terlaksananya Peningkatan Mutu di sarana Rumah Sakit, Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rujukan		
					Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1.02.02.2.04.0004 - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		
				Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan pada RSUD		Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
					Terlaksananya tenaga kesehatan Terregistrasi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
					Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Kota Dumai	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.02.0.00.0.00.01.0014 - Puskesmas Dumai Kota							
- 1.1.1.1. Kesehatan untuk Semua	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Dumai Kota		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				Terlaksananya posyandu mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
			Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Dumai Kota		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Dumai Kota		Cakupan penemuan kasus TB	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi	
1.02.0.00.0.00.01.0015 - Puskesmas Dumai Barat							
- 1.1.1. Kesehatan untuk Semua	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Dumai Barat		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				Jumlah posyandu mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
			Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Dumai Barat		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Dumai Barat		Cakupan penemuan kasus TB	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)					
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan						
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas						
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi						
					1.02.0.00.0.00.01.0016 - Puskesmas Bukit Kapur							
					- 1.1.1. Kesehatan untuk Semua	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Bukit Kapur		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
Terlaksananya posyandu mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)										
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Bukit kapur		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
		Tersedianya peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD								
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Bukit kapur		Cakupan penemuan kasus TB	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
			Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
			Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
			Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi	
1.02.0.00.0.00.01.0017 - Puskesmas Medang kampai							
- 1.1.1. Kesehatan untuk Semua	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Medang Kampai		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				Terlaksananya posyandu mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
			Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Medang Kampai		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Medang Kampai		Cakupan penemuan kasus TB	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi	
					1.02.0.00.0.00.01.0018 - Puskesmas Bumi Ayu		
- 1.1.1.1. Kesehatan untuk Semua	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Bumi Ayu		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
				Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Bumi Ayu		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan (DINKES)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Tersedianya peningkatan pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Bumi Ayu		Cakupan penemuan kasus TB	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas		
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi		
1.02.0.00.0.00.01.0019 - Puskesmas Bukit Timah								
- 1.1.1. Kesehatan untuk Semua	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Bukit Timah		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
				Terlaksananya posyandu mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
				Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Bukit Timah		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Tersedianya peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Bukit Timah		Cakupan penemuan kasus TB	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
					Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
					Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
				Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi	
1.02.0.00.0.00.01.0020 - Puskesmas Purnama							
- 1.1.1. Kesehatan untuk Semua	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas kesehatan Masyarakat	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Purnama		Cakupan penemuan kasus TB	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)		
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas			
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak			
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi			
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Purnama		Terlaksananya posyandu mandiri	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
				Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Purnama		Tersedianya peningkatan pelayanan BLUD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
1.02.0.00.0.00.01.0021 - Puskesmas Jaya Mukti									
				Terlaksananya posyandu mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Jaya Mukti		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Jaya Mukti		Cakupan penemuan kasus TB	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas		
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi		
1.02.0.00.0.00.01.0022 - Puskesmas Bukit Kayu Kapur								
- 1.1.1. Kesehatan untuk Semua	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Bukit Kayu Kapur		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
				Terlaksananya posyandu mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
				Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Bukit Kayu Kapur		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Tersedianya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Bukit Kayu Kapur		Cakupan penemuan kasus TB	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
					Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
					Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
				Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi	
1.02.0.00.0.00.01.0023 - UPT Laboratorium Kesehatan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A							
- 1.1.1. Kesehatan untuk Semua	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas kesehatan Masyarakat	Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan bidang kesehatan pada Pemeriksaan Air Kelas A		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
1.02.0.00.0.00.01.0024 - Puskesmas Sungai Sembilan							
- 1.1.1. Kesehatan untuk Semua	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Sungai Sembilan			1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				Terlaksananya posyandu mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehat Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
			Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Sungai Sembilan		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Sungai Sembilan		Cakupan penemuan kasus TB	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi	

**TABEL 4.42 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN RENSTRA
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				492.144.319.898		513.184.311.398		523.184.311.398		471.169.799.010		461.169.799.010		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				357.992.454.910		369.769.964.680		368.772.994.905		371.148.995.224		365.461.276.412		
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	219.891.990.605	100	219.623.586.655	100	218.711.174.905	100	218.952.410.224	100	212.796.886.412	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				125.336.500		316.200.000		322.700.000		329.200.000		335.700.000		
tersusunnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	125.336.500	2	316.200.000	2	322.700.000	2	329.200.000	2	335.700.000		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	9	9		9		9		9		9			
1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				77.900.000		137.000.000		139.000.000		141.000.000		143.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	77.900.000	7	137.000.000	7	139.000.000	7	141.000.000	7	143.000.000		
1.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				11.486.000		38.500.000		39.500.000		40.500.000		41.500.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	11.486.000	2	38.500.000	2	39.500.000	2	40.500.000	2	41.500.000		
1.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.570.500		20.500.000		21.000.000		21.500.000		22.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2.570.500	2	20.500.000	2	21.000.000	2	21.500.000	2	22.000.000		
1.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				890.000		17.500.000		18.000.000		18.500.000		19.000.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	890.000	2	17.500.000	2	18.000.000	2	18.500.000	2	19.000.000		
1.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				890.000		17.500.000		18.000.000		18.500.000		19.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	890.000	2	17.500.000	2	18.000.000	2	18.500.000	2	19.000.000		
1.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9.850.000		30.700.000		31.700.000		32.700.000		33.700.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	9.850.000	4	30.700.000	4	31.700.000	4	32.700.000	4	33.700.000		
1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21.750.000		54.500.000		55.500.000		56.500.000		57.500.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	9	9	21.750.000	9	54.500.000	9	55.500.000	9	56.500.000	9	57.500.000		
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				215.250.859.040		212.176.526.595		210.969.516.905		211.148.813.224		204.710.844.412		
tersedianya dokumen/laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	215.250.859.040	2	212.176.526.595	2	210.969.516.905	2	211.148.813.224	2	204.710.844.412		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.370	1.880		1.880		1.880		1.880					
1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				215.225.859.040		212.126.526.595		210.919.516.905		211.098.813.224		204.660.844.412		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.370	1.880	215.225.859.040	1.880	212.126.526.595	1.880	210.919.516.905	1.880	211.098.813.224	1.880	204.660.844.412		
1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	25.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000		
1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				14.200.000		14.413.000		29.258.000		29.697.000		30.142.000		
Tersedia Dokuman/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	14.200.000	2	14.413.000	2	29.258.000	2	29.697.000	2	30.142.000		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				6.700.000		6.800.500		13.805.000		14.012.000		14.222.000		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	6.700.000	2	6.800.500	2	13.805.000	2	14.012.000	2	14.222.000		
1.02.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				7.500.000		7.612.500		15.453.000		15.685.000		15.920.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	7.500.000	2	7.612.500	2	15.453.000	2	15.685.000	2	15.920.000		
1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				69.992.500		322.000.000		322.000.000		322.000.000		322.000.000		
Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	9	9	69.992.500	9	322.000.000	9	322.000.000	9	322.000.000	9	322.000.000		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				69.992.500		162.000.000		162.000.000		162.000.000		162.000.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	69.992.500	1	162.000.000	1	162.000.000	1	162.000.000	1	162.000.000		
1.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	9	9	0	9	160.000.000	9	160.000.000	9	160.000.000	9	160.000.000		
1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				433.554.645		735.583.140		992.500.000		1.047.500.000		1.323.000.000		
tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	433.554.645	3	735.583.140	3	992.500.000	3	1.047.500.000	3	1.323.000.000		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				20.252.200		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	20.252.200	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000		
1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				96.382.445		97.583.140		304.500.000		304.500.000		500.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	96.382.445	3	97.583.140	3	304.500.000	3	304.500.000	3	500.000.000		
1.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.740.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	3	13.740.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	40.000.000		
1.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				27.500.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		65.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	27.500.000	3	55.000.000	3	55.000.000	3	55.000.000	3	65.000.000		
1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.000.000		60.000.000		60.000.000		65.000.000		75.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	30.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	3	65.000.000	3	75.000.000		
1.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000		
1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				215.180.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000		550.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	215.180.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	1	550.000.000		
1.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				27.500.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	27.500.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000		
1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		
tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	46	0	0	20	700.000.000	20	700.000.000	20	700.000.000	20	700.000.000		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	0		25		25		25		25			
1.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	0	0	25	200.000.000	25	200.000.000	25	200.000.000	25	200.000.000		
1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	46	0	0	20	500.000.000	20	500.000.000	20	500.000.000	20	500.000.000		
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.640.263.920		4.008.863.920		4.025.200.000		4.025.200.000		4.025.200.000		
Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	3.640.263.920	1	4.008.863.920	1	4.025.200.000	1	4.025.200.000	1	4.025.200.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1					
1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				462.424.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	462.424.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000		
1.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				168.976.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	168.976.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000		
1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.008.863.920		3.008.863.920		3.025.200.000		3.025.200.000		3.025.200.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	3.008.863.920	1	3.008.863.920	1	3.025.200.000	1	3.025.200.000	1	3.025.200.000		
1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				357.784.000		1.350.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30	22	357.784.000	22	1.350.000.000	22	1.350.000.000	22	1.350.000.000	22	1.350.000.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0		1		1		1		1			
1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				357.784.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30	22	357.784.000	22	750.000.000	22	750.000.000	22	750.000.000	22	750.000.000		
1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	0	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000		
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan Pada Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Air Kelas A	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	235.427.280	100	266.000.000	100	304.000.000	100	332.000.000	100	361.000.000	1.02.0.00.0.00.01.00 23 - UPT Laboratorium Kesehatan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				235.427.280		266.000.000		304.000.000		332.000.000		361.000.000		
Tersedianya peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	235.427.280	1	266.000.000	1	304.000.000	1	332.000.000	1	361.000.000		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				235.427.280		266.000.000		304.000.000		332.000.000		361.000.000		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	235.427.280	1	266.000.000	1	304.000.000	1	332.000.000	1	361.000.000		
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Bukit kapur	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	1.796.500.000	100	1.950.000.000	100	2.050.000.000	100	2.100.000.000	100	2.150.000.000	1.02.0.00.0.00.01.00 16 - Puskesmas Bukit Kapur	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.796.500.000		1.950.000.000		2.050.000.000		2.100.000.000		2.150.000.000		
Tersedianya peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.796.500.000	1	1.950.000.000	1	2.050.000.000	1	2.100.000.000	1	2.150.000.000		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.796.500.000		1.950.000.000		2.050.000.000		2.100.000.000		2.150.000.000		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.796.500.000	1	1.950.000.000	1	2.050.000.000	1	2.100.000.000	1	2.150.000.000		
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Bukit Kayu Kapur	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	1.861.450.000	100	1.954.550.000	100	2.052.300.000	100	2.154.860.000	100	2.262.600.000	1.02.0.00.0.00.01.00 22 - Puskesmas Bukit Kayu Kapur	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.861.450.000		1.954.550.000		2.052.300.000		2.154.860.000		2.262.600.000		
Tersedianya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.861.450.000	1	1.954.550.000	1	2.052.300.000	1	2.154.860.000	1	2.262.600.000		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.861.450.000		1.954.550.000		2.052.300.000		2.154.860.000		2.262.600.000		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.861.450.000	1	1.954.550.000	1	2.052.300.000	1	2.154.860.000	1	2.262.600.000		
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Bukit Timah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	966.000.000	100	1.235.000.000	100	1.297.000.000	100	1.362.000.000	100	1.430.000.000	1.02.0.00.0.00.01.00 19 - Puskesmas Bukit Timah	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				966.000.000		1.235.000.000		1.297.000.000		1.362.000.000		1.430.000.000		
Tersedianya peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	966.000.000	1	1.235.000.000	1	1.297.000.000	1	1.362.000.000	1	1.430.000.000		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				966.000.000		1.235.000.000		1.297.000.000		1.362.000.000		1.430.000.000		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	966.000.000	1	1.235.000.000	1	1.297.000.000	1	1.362.000.000	1	1.430.000.000		
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Bumi Ayu	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	1.550.000.000	100	1.580.000.000	100	1.610.000.000	100	1.640.000.000	100	1.670.000.000	1.02.0.00.0.00.01.00 18 - Puskesmas Bumi Ayu	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.550.000.000		1.580.000.000		1.610.000.000		1.640.000.000		1.670.000.000		
Tersedianya peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.550.000.000	1	1.580.000.000	1	1.610.000.000	1	1.640.000.000	1	1.670.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.550.000.000		1.580.000.000		1.610.000.000		1.640.000.000		1.670.000.000		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.550.000.000	1	1.580.000.000	1	1.610.000.000	1	1.640.000.000	1	1.670.000.000		
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Dumai Barat	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	1.800.000.000	100	1.900.000.000	100	1.910.000.000	100	1.915.000.000	100	1.920.000.000	1.02.0.00.0.00.01.00 15 - Puskesmas Dumai Barat	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.800.000.000		1.900.000.000		1.910.000.000		1.915.000.000		1.920.000.000		
Tersedianya peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.800.000.000	1	1.900.000.000	1	1.910.000.000	1	1.915.000.000	1	1.920.000.000		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.800.000.000		1.900.000.000		1.910.000.000		1.915.000.000		1.920.000.000		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.800.000.000	1	1.900.000.000	1	1.910.000.000	1	1.915.000.000	1	1.920.000.000		
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Dumai Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	2.550.000.000	100	2.600.000.000	100	2.650.000.000	100	2.650.000.000	100	2.650.000.000	1.02.0.00.0.00.01.00 14 - Puskesmas Dumai Kota	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				2.550.000.000		2.600.000.000		2.650.000.000		2.650.000.000		2.650.000.000		
Tersedianya peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	2.550.000.000	1	2.600.000.000	1	2.650.000.000	1	2.650.000.000	1	2.650.000.000		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2.550.000.000		2.600.000.000		2.650.000.000		2.650.000.000		2.650.000.000		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	2.550.000.000	1	2.600.000.000	1	2.650.000.000	1	2.650.000.000	1	2.650.000.000		
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Jaya Mukti	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	3.255.000.000	100	3.628.000.000	100	3.670.000.000	100	3.680.000.000	100	3.685.000.000	1.02.0.00.0.00.01.00 21 - Puskesmas Jaya Mukti	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				3.255.000.000		3.628.000.000		3.670.000.000		3.680.000.000		3.685.000.000		
Tersedianya peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	3.255.000.000	1	3.628.000.000	1	3.670.000.000	1	3.680.000.000	1	3.685.000.000		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				3.255.000.000		3.628.000.000		3.670.000.000		3.680.000.000		3.685.000.000		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	3.255.000.000	1	3.628.000.000	1	3.670.000.000	1	3.680.000.000	1	3.685.000.000		
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Medang Kampai	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	1.501.099.000	100	1.577.000.000	100	1.655.000.000	100	1.738.000.000	100	1.825.000.000	1.02.0.00.0.00.01.00 17 - Puskesmas Medang kampai	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.501.099.000		1.577.000.000		1.655.000.000		1.738.000.000		1.825.000.000		
Tersedianya peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.501.099.000	1	1.577.000.000	1	1.655.000.000	1	1.738.000.000	1	1.825.000.000		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.501.099.000		1.577.000.000		1.655.000.000		1.738.000.000		1.825.000.000		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.501.099.000	1	1.577.000.000	1	1.655.000.000	1	1.738.000.000	1	1.825.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Purnama	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	1.750.000.000	100	1.780.000.000	100	1.810.000.000	100	1.830.000.000	100	1.850.000.000	1.02.0.00.0.00.01.00 20 - Puskesmas Purnama	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.750.000.000		1.780.000.000		1.810.000.000		1.830.000.000		1.850.000.000		
Tersedianya peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.750.000.000	1	1.780.000.000	1	1.810.000.000	1	1.830.000.000	1	1.850.000.000		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.750.000.000		1.780.000.000		1.810.000.000		1.830.000.000		1.850.000.000		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.750.000.000	1	1.780.000.000	1	1.810.000.000	1	1.830.000.000	1	1.850.000.000		
Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Sungai Sembilan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES) (%)	100	100	3.109.295.000	100	3.171.480.000	100	3.234.900.000	100	3.299.590.000	100	3.365.580.000	1.02.0.00.0.00.01.00 24 - Puskesmas Sungai Sembilan	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				3.109.295.000		3.171.480.000		3.234.900.000		3.299.590.000		3.365.580.000		
Tersedianya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	3.109.295.000	1	3.171.480.000	1	3.234.900.000	1	3.299.590.000	1	3.365.580.000		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				3.109.295.000		3.171.480.000		3.234.900.000		3.299.590.000		3.365.580.000		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	3.109.295.000	1	3.171.480.000	1	3.234.900.000	1	3.299.590.000	1	3.365.580.000		
Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (RSUD)	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (RSUD) (%)	100	100	117.725.693.025	100	128.504.348.025	100	127.818.620.000	100	129.495.135.000	100	129.495.210.000	1.02.0.00.0.00.01.00 13 - RSUD	
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				55.000.000		110.000.000		114.000.000		128.000.000		128.000.000		
Tersedianya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		1	55.000.000	1	110.000.000	1	114.000.000	1	128.000.000	1	128.000.000		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)													
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)													
1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				55.000.000		110.000.000		114.000.000		128.000.000		128.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		1	55.000.000	1	110.000.000	1	114.000.000	1	128.000.000	1	128.000.000		
1.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		0		0		0		0		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			0		0		0		0		0		
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.925.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		83.325.000		
Tersedianya dokumen/laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		1	13.925.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	83.325.000		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)				1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		1		1		1		1		1			
1.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				10.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		22.220.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		1	10.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	22.220.000		
1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.925.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		27.775.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		1	3.925.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	27.775.000		
1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0		30.000.000		30.000.000		30.000.000		33.330.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)			0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	33.330.000		
1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25.000.000		99.000.000		99.000.000		110.000.000		110.000.000		
Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		1	25.000.000	1	99.000.000	1	99.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000		
1.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				25.000.000		99.000.000		99.000.000		110.000.000		110.000.000		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		1	25.000.000	1	99.000.000	1	99.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000		
1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10.000.000		259.000.000		259.000.000		259.000.000		259.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)		1	10.000.000	1	259.000.000	1	259.000.000	1	259.000.000	1	259.000.000		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)				2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				1		1		1		1			
1.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		199.000.000		199.000.000		199.000.000		199.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)			0	2	199.000.000	2	199.000.000	2	199.000.000	2	199.000.000		
1.02.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				10.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)		1	10.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
1.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)			0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				25.000.000		2.515.000.000		2.505.000.000		2.505.000.000		2.505.000.000		
Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		1	25.000.000	1	2.515.000.000	1	2.505.000.000	1	2.505.000.000	1	2.505.000.000		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)				1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)				1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				6		6		6		6			
1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		1.510.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)			0	6	1.510.000.000	6	1.500.000.000	6	1.500.000.000	6	1.500.000.000		
1.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)			0	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000		
1.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				25.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)		1	25.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			0	1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000		
1.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)			0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		5.133.100.000		3.133.100.000		4.216.350.000		3.133.100.000		
Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)			0	14	5.133.100.000	14	3.133.100.000	14	4.216.350.000	14	3.133.100.000		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			1	1		1		1					
1.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		133.100.000		133.100.000		133.100.000		133.100.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)			0	14	133.100.000	14	133.100.000	14	133.100.000	14	133.100.000		
1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		5.000.000.000		3.000.000.000		4.083.250.000		3.000.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			0	1	5.000.000.000	1	3.000.000.000	1	4.083.250.000	1	3.000.000.000		
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				13.571.286.000		14.888.800.000		15.281.800.000		15.281.800.000		15.356.800.000		
Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		1	13.571.286.000	1	14.888.800.000	1	15.281.800.000	1	15.281.800.000	1	15.356.800.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		1		1		1		1					
1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				5.167.000.000		5.400.000.000		5.400.000.000		5.400.000.000		5.400.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		1	5.167.000.000	1	5.400.000.000	1	5.400.000.000	1	5.400.000.000	1	5.400.000.000		
1.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		1	25.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				8.379.286.000		9.388.800.000		9.781.800.000		9.781.800.000		9.856.800.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		1	8.379.286.000	1	9.388.800.000	1	9.781.800.000	1	9.781.800.000	1	9.856.800.000		
1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				212.500.000		525.000.000		525.000.000		525.000.000		525.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)			212.500.000	1	525.000.000	1	525.000.000	1	525.000.000	1	525.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		3		2		2		2		2			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		5		5		5		5					
1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				60.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		3	60.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000		
1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				152.500.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		5	152.500.000	5	350.000.000	5	350.000.000	5	350.000.000	5	350.000.000		
1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)			0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				103.812.982.025		104.899.448.025		105.826.720.000		106.394.985.000		107.394.985.000		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		1	103.812.982.025	1	104.899.448.025	1	105.826.720.000	1	106.394.985.000	1	107.394.985.000		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				103.812.982.025		104.899.448.025		105.826.720.000		106.394.985.000		107.394.985.000		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		1	103.812.982.025	1	104.899.448.025	1	105.826.720.000	1	106.394.985.000	1	107.394.985.000		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				131.087.057.638		139.363.233.368		150.154.203.143		95.757.690.436		92.539.409.248		
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Dinas Kesehatan	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0	0,6	52.599.142.970	0,6	62.136.272.700	0,6	72.441.514.450	0,6	61.736.029.131	0,6	57.417.822.943	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS KESEHATAN	
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	6,97	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4			
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	81,12	84		85		85		86		87			
	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100		100		100		100		100			
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	79,28	83		85		87		90		92			
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100		100		100		100		100			100

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN							
			2026		2027		2028		2029		2030										
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU									
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)							
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	58,33	58,33		58,33		66,67		66,67		66,67										
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	92	93		93		93,5		94		94										
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	0	50		50		58,33		66,67		75										
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	0	76		77		78		80		83										
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	0	12		12		11		10		10										
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				6.226.582.870		15.506.000.000		25.473.000.000		11.929.000.000		6.281.000.000									
Terlaksananya Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah untuk UKM dan UKP Sesuai Standar	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)	400	290	6.226.582.870	290	15.506.000.000	470	25.473.000.000	495	11.929.000.000	495	6.281.000.000									
	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)		1		0		1		1		0										
	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	1	0		1		1		1		1										
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	1	0		1		1		1		1										
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	45	1		1		1		1		0										
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1	0		1		1		1		1										
	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	10	10		10		10		10		10										
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	83	10		5		150		100		20										
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	4	10		10		30		30		30										
	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1	1		1		1		1		0										

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	1	1		1		1		0		0			
	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	1	0		0		1		1		0			
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas				1.200.000.000		10.500.000.000		15.000.000.000		0		0		
Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	1	1	1.200.000.000	1	10.500.000.000	1	15.000.000.000	0	0	0	0		
1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		0		
Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	0		
1.02.02.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				0		0		50.000.000		50.000.000		0		
Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	1	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	0	0		
1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas				136.582.870		50.000.000		2.050.000.000		5.000.000.000		0		
Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1	1	136.582.870	1	50.000.000	1	2.050.000.000	1	5.000.000.000	0	0		
1.02.02.2.01.0007 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				130.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		0		
Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	45	1	130.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	0	0		
1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	1	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.02.02.2.01.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	1	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.02.02.2.01.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				0		0		50.000.000		50.000.000		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)		1	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	0	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				500.000.000		250.000.000		3.500.000.000		1.000.000.000		500.000.000		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	83	10	500.000.000	5	250.000.000	150	3.500.000.000	100	1.000.000.000	20	500.000.000		
1.02.02.2.01.0015 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi				100.000.000		100.000.000		167.000.000		173.000.000		175.000.000		
Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)	400	290	100.000.000	290	100.000.000	470	167.000.000	495	173.000.000	495	175.000.000		
1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				100.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000		
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	4	10	100.000.000	10	100.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000	30	200.000.000		
1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				4.000.000.000		4.206.000.000		4.206.000.000		5.206.000.000		5.206.000.000		
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	4	4	4.000.000.000	4	4.206.000.000	4	4.206.000.000	4	5.206.000.000	4	5.206.000.000		
1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan				60.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	10	10	60.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				44.590.269.600		44.509.982.200		44.840.223.950		47.670.738.631		48.992.532.443		
Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Sesuai Standar	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	585	585	44.590.269.600	590	44.509.982.200	595	44.840.223.950	600	47.670.738.631	605	48.992.532.443		
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	63.533	65.121		66.749		68.418		70.129		71.882			
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	31.586	32.376		33.185		34.015		34.862		35.737			
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9.239	9.470		9.707		9.949		10.198		10.453			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	0	1		1				1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	0		0		0		1		1			
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9.609	9.849		10.095		10.348		10.607		10.872			
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9.609	9.849		10.095		10.348		10.607		10.872			
	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.329	1.326		1.323		1.320		1.317		1.314			
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	12.710	13.028		13.353		13.687		14.026		14.380			
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	6.458	6.619		6.785		6.955		7.128		7.307			
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	8	8		8		8		8		8			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	613	628		644		660		677		694			
	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5.237	5.368		5.502		5.640		5.781		5.925			
	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	60.353	61.862		63.408		64.994		66.618		68.284			
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	28.943	29.667		30.408		31.168		31.948		32.746			
	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	230.342	236.101		242.003		248.053		254.254		260.611			
	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						100.000.000				162.400.000			
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9.609	9.849	100.000.000	10.095	162.400.000	10.348	164.836.000	10.607	167.308.000	10.872	160.817.000		
1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				120.000.000		304.500.000		309.067.000		313.703.000		318.408.000		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9.609	9.849	120.000.000	10.095	304.500.000	10.348	309.067.000	10.607	313.703.000	10.872	318.408.000		
1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				93.200.000		94.598.000		96.017.000		97.457.000		98.919.000		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9.239	9.470	93.200.000	9.707	94.598.000	9.949	96.017.000	10.198	97.457.000	10.453	98.919.000		
1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				80.000.000		116.725.000		118.476.000		120.253.000		122.057.000		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	31.586	32.376	80.000.000	33.185	116.725.000	34.015	118.476.000	34.862	120.253.000	35.737	122.057.000		
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				80.000.000		81.200.000		82.418.000		83.654.000		84.909.000		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	63.533	65.121	80.000.000	66.749	81.200.000	68.418	82.418.000	70.129	83.654.000	71.882	84.909.000		
1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				60.000.000		101.500.000		103.022.000		104.567.000		106.136.000		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	230.342	236.101	60.000.000	242.003	101.500.000	248.053	103.022.000	254.254	104.567.000	260.611	106.136.000		
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				59.000.000		60.000.000		61.000.000		62.000.000		63.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	28.943	29.667	59.000.000	30.408	60.000.000	31.168	61.000.000	31.948	62.000.000	32.746	63.000.000		
1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				70.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	60.353	61.862	70.000.000	63.408	100.000.000	64.994	100.000.000	66.618	100.000.000	68.284	100.000.000		
1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				55.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5.237	5.368	55.000.000	5.502	100.000.000	5.640	100.000.000	5.781	100.000.000	5.925	100.000.000		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				50.000.000		86.500.000		87.500.000		88.500.000		89.500.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	613	628	50.000.000	644	86.500.000	660	87.500.000	677	88.500.000	694	89.500.000		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				60.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	6.458	6.619	60.000.000	6.785	100.000.000	6.955	100.000.000	7.128	100.000.000	7.307	100.000.000		
1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				1.398.267.400		1.398.267.400		1.398.267.400		1.398.267.400		1.398.267.400		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	12.710	13.028	1.398.267.400	13.353	1.398.267.400	13.687	1.398.267.400	14.026	1.398.267.400	14.380	1.398.267.400		
1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				250.000.000		302.000.000		304.000.000		306.000.000		308.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1	1	250.000.000	1	302.000.000	1	304.000.000	1	306.000.000	1	308.000.000		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				150.000.000		355.000.000		360.000.000		365.000.000		370.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1	150.000.000	1	355.000.000	1	360.000.000	1	365.000.000	1	370.000.000		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				24.216.800		24.216.000		24.216.000		24.216.000		24.216.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1	24.216.800	1	24.216.000	1	24.216.000	1	24.216.000	1	24.216.000		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				80.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	4	4	80.000.000	4	180.000.000	4	180.000.000	4	180.000.000	4	180.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				249.222.200		255.000.000		256.000.000		257.000.000		258.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	2	2	249.222.200	2	255.000.000	2	256.000.000	2	257.000.000	2	258.000.000		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				155.675.000		157.000.000		158.000.000		159.000.000		160.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1	155.675.000	1	157.000.000	1	158.000.000	1	159.000.000	1	160.000.000		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				175.000.000		355.250.000		360.578.750		365.987.431		371.477.243		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1	175.000.000	1	355.250.000	1	360.578.750	1	365.987.431	1	371.477.243		
1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				39.075.737.400		38.000.000.000		38.300.000.000		38.600.000.000		38.900.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	1	39.075.737.400	1	38.000.000.000	1	38.300.000.000	1	38.600.000.000	1	38.900.000.000		
1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				20.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1	1	20.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				0		0		0		2.500.000.000		3.500.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0	1	2.500.000.000	1	3.500.000.000		
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				80.767.000		80.767.000		80.767.000		80.767.000		80.767.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1	80.767.000	1	80.767.000	1	80.767.000	1	80.767.000	1	80.767.000		
1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		
Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000		
1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				80.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.329	1.326	80.000.000	1.323	100.000.000	1.320	100.000.000	1.317	100.000.000	1.314	100.000.000		
1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				1.038.028.800		1.038.028.800		1.038.028.800		1.038.028.800		1.038.028.800		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	585	585	1.038.028.800	590	1.038.028.800	595	1.038.028.800	600	1.038.028.800	605	1.038.028.800		
1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	8	8	22.000.000	8	22.000.000	8	22.000.000	8	22.000.000	8	22.000.000		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				173.030.000		113.030.000		113.030.000		113.030.000		113.030.000		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1	173.030.000	1	113.030.000	1	113.030.000	1	113.030.000	1	113.030.000		
1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi				91.125.000		92.000.000		93.000.000		94.000.000		95.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	0	1	91.125.000	1	92.000.000		93.000.000	1	94.000.000	1	95.000.000		
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				100.000.000		182.000.000		184.000.000		186.000.000		188.000.000		
Tersedianya sarana fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	8	8	100.000.000	8	182.000.000	8	184.000.000	8	186.000.000	8	188.000.000		
1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				100.000.000		182.000.000		184.000.000		186.000.000		188.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	8	8	100.000.000	8	182.000.000	8	184.000.000	8	186.000.000	8	188.000.000		
1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.682.290.500		1.938.290.500		1.944.290.500		1.950.290.500		1.956.290.500		
Terlaksananya Peningkatan Mutu di sarana Rumah Sakit, Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	75	75	1.682.290.500	75	1.938.290.500	75	1.944.290.500	75	1.950.290.500	75	1.956.290.500		
	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	18	18		18		18		18		18			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	11	11		11		12		13		13			
1.02.02.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya				50.000.000		52.000.000		54.000.000		56.000.000		58.000.000		
Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	18	18	50.000.000	18	52.000.000	18	54.000.000	18	56.000.000	18	58.000.000		
1.02.02.2.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				60.000.000		62.000.000		64.000.000		66.000.000		68.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	75	75	60.000.000	75	62.000.000	75	64.000.000	75	66.000.000	75	68.000.000		
1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				850.000.000		1.102.000.000		1.104.000.000		1.106.000.000		1.108.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	11	11	850.000.000	11	1.102.000.000	12	1.104.000.000	13	1.106.000.000	13	1.108.000.000		
1.02.02.2.04.0004 - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				722.290.500		722.290.500		722.290.500		722.290.500		722.290.500		
Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	2	2	722.290.500	2	722.290.500	2	722.290.500	2	722.290.500	2	722.290.500		
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Bukit kapur	Cakupan penemuan kasus TB (%)	79,28	83	451.238.000	85	451.238.000	87	451.238.000	90	451.238.000	92	451.238.000	1.02.0.00.0.00.01.00 16 - Puskesmas Bukit Kapur	
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	76	76		76		76		76		76			
	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				451.238.000		451.238.000		451.238.000		451.238.000		451.238.000		
Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1	451.238.000	1	451.238.000	1	451.238.000	1	451.238.000	1	451.238.000		
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.643	1.643		1.643		1.643		1.643		1.643			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	51	51		51		51		51		51			
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	430	430		430		430		430		430			
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	17.167	17.167		17.167		17.167		17.167		17.167			
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	781	781		781		781		781		781			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5.219	5.219		5.219		5.219		5.219		5.219			
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				23.400.000		23.400.000		23.400.000		23.400.000		23.400.000		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	781	781	23.400.000	781	23.400.000	781	23.400.000	781	23.400.000	781	23.400.000		
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				16.200.000		16.200.000		16.200.000		16.200.000		16.200.000		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5.219	5.219	16.200.000	5.219	16.200.000	5.219	16.200.000	5.219	16.200.000	5.219	16.200.000		
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.643	1.643	21.000.000	1.643	21.000.000	1.643	21.000.000	1.643	21.000.000	1.643	21.000.000		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	51	51	7.500.000	51	7.500.000	51	7.500.000	51	7.500.000	51	7.500.000		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				4.600.000		4.600.000		4.600.000		4.600.000		4.600.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	430	430	4.600.000	430	4.600.000	430	4.600.000	430	4.600.000	430	4.600.000		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				144.732.000		144.732.000		144.732.000		144.732.000		144.732.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1	144.732.000	1	144.732.000	1	144.732.000	1	144.732.000	1	144.732.000		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1	1.800.000	1	1.800.000	1	1.800.000	1	1.800.000	1	1.800.000		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10.700.000		10.700.000		10.700.000		10.700.000		10.700.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1	10.700.000	1	10.700.000	1	10.700.000	1	10.700.000	1	10.700.000		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				21.665.000		21.665.000		21.665.000		21.665.000		21.665.000		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1	21.665.000	1	21.665.000	1	21.665.000	1	21.665.000	1	21.665.000		
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	17.167	17.167	3.400.000	17.167	3.400.000	17.167	3.400.000	17.167	3.400.000	17.167	3.400.000		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				15.200.000		15.200.000		15.200.000		15.200.000		15.200.000		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1	15.200.000	1	15.200.000	1	15.200.000	1	15.200.000	1	15.200.000		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				115.141.000		115.141.000		115.141.000		115.141.000		115.141.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	115.141.000	1	115.141.000	1	115.141.000	1	115.141.000	1	115.141.000		
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				5.700.000		5.700.000		5.700.000		5.700.000		5.700.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1	5.700.000	1	5.700.000	1	5.700.000	1	5.700.000	1	5.700.000		
1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				900.000		900.000		900.000		900.000		900.000		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1	1	900.000	1	900.000	1	900.000	1	900.000	1	900.000		
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	1	4.800.000	1	4.800.000	1	4.800.000	1	4.800.000	1	4.800.000		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000		
1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi				50.500.000		50.500.000		50.500.000		50.500.000		50.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1	1	50.500.000	1	50.500.000	1	50.500.000	1	50.500.000	1	50.500.000		
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Bukit Kayu Kapur	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100	582.941.500	100	582.941.500	100	582.941.500	100	582.941.500	100	582.941.500	1.02.0.00.0.00.01.00 22 - Puskesmas Bukit Kayu Kapur	
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	79,28	83		85		87		90		92			
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	76	76		76		76		76		76			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				582.941.500		582.941.500		582.941.500		582.941.500		582.941.500		
Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1	582.941.500	1	582.941.500	1	582.941.500	1	582.941.500	1	582.941.500		
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	868	868		868		868		868		868			
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	19.496	19.496		19.496		19.496		19.496		19.496			
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	407	407		407		407		407		407			
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	46	46		46		46		46		46			
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2.132	2.132		2.132		2.132		2.132		2.132			
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5.989	5.989		5.989		5.989		5.989		5.989			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1					
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				34.800.000		34.800.000		34.800.000		34.800.000		34.800.000		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	868	868	34.800.000	868	34.800.000	868	34.800.000	868	34.800.000	868	34.800.000		
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				13.500.000		13.500.000		13.500.000		13.500.000		13.500.000		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5.989	5.989	13.500.000	5.989	13.500.000	5.989	13.500.000	5.989	13.500.000	5.989	13.500.000		
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				19.200.000		19.200.000		19.200.000		19.200.000		19.200.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2.132	2.132	19.200.000	2.132	19.200.000	2.132	19.200.000	2.132	19.200.000	2.132	19.200.000		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	46	46	9.000.000	46	9.000.000	46	9.000.000	46	9.000.000	46	9.000.000		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				6.450.000		6.450.000		6.450.000		6.450.000		6.450.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	407	407	6.450.000	407	6.450.000	407	6.450.000	407	6.450.000	407	6.450.000		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				221.785.000		221.785.000		221.785.000		221.785.000		221.785.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1	221.785.000	1	221.785.000	1	221.785.000	1	221.785.000		221.785.000		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				3.750.000		3.750.000		3.750.000		3.750.000		3.750.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1	3.750.000	1	3.750.000	1	3.750.000	1	3.750.000	1	3.750.000		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10.950.000		10.950.000		10.950.000		10.950.000		10.950.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1	10.950.000	1	10.950.000	1	10.950.000	1	10.950.000	1	10.950.000		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				21.295.500		21.295.500		21.295.500		21.295.500		21.295.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1	21.295.500	1	21.295.500	1	21.295.500	1	21.295.500	1	21.295.500		
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				7.800.000		7.800.000		7.800.000		7.800.000		7.800.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	19.496	19.496	7.800.000	19.496	7.800.000	19.496	7.800.000	19.496	7.800.000	19.496	7.800.000		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				32.580.000		32.580.000		32.580.000		32.580.000		32.580.000		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1	32.580.000	1	32.580.000	1	32.580.000	1	32.580.000	1	32.580.000		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				149.856.000		149.856.000		149.856.000		149.856.000		149.856.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	149.856.000	1	149.856.000	1	149.856.000	1	149.856.000	1	149.856.000		
1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				225.000		225.000		225.000		225.000		225.000		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1	1	225.000	1	225.000	1	225.000	1	225.000	1	225.000		
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				10.050.000		10.050.000		10.050.000		10.050.000		10.050.000		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	1	10.050.000	1	10.050.000	1	10.050.000	1	10.050.000	1	10.050.000		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				3.900.000		3.900.000		3.900.000		3.900.000		3.900.000		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1	3.900.000	1	3.900.000	1	3.900.000	1	3.900.000	1	3.900.000		
1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi				37.800.000		37.800.000		37.800.000		37.800.000		37.800.000		
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1	1	37.800.000	1	37.800.000	1	37.800.000	1	37.800.000	1	37.800.000		
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Bukit Timah	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	76	76	476.384.500	76	476.384.500	76	476.384.500	76	476.384.500	76	476.384.500	1.02.0.00.0.00.01.00 19 - Puskesmas Bukit Timah	
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	79,28	83		85		87		90		92			
	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				476.384.500		476.384.500		476.384.500		476.384.500		476.384.500		
Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.616	1.616	476.384.500	1.616	476.384.500	1.616	476.384.500	1.616	476.384.500	1.616	476.384.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3.010	3.010		3.010		3.010		3.010		3.010			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	502	502		502		502		502		502			
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	11.132	11.132		11.132		11.132		11.132		11.132			
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	378	378		378		378		378		378			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	30	30		30		30		30		30			
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	502	502	18.000.000	502	18.000.000	502	18.000.000	502	18.000.000	502	18.000.000		
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3.010	3.010	24.000.000	3.010	24.000.000	3.010	24.000.000	3.010	24.000.000	3.010	24.000.000		
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.616	1.616	6.000.000	1.616	6.000.000	1.616	6.000.000	1.616	6.000.000	1.616	6.000.000		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	30	30	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				6.900.000		6.900.000		6.900.000		6.900.000		6.900.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	378	378	6.900.000	378	6.900.000	378	6.900.000	378	6.900.000	378	6.900.000		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				161.022.000		161.022.000		161.022.000		161.022.000		161.022.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1	161.022.000	1	161.022.000	1	161.022.000	1	161.022.000	1	161.022.000		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1	3.600.000	1	3.600.000	1	3.600.000	1	3.600.000	1	3.600.000		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				13.950.000		13.950.000		13.950.000		13.950.000		13.950.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1	13.950.000	1	13.950.000	1	13.950.000	1	13.950.000	1	13.950.000		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				14.302.500		14.302.500		14.302.500		14.302.500		14.302.500		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1	14.302.500	1	14.302.500	1	14.302.500	1	14.302.500	1	14.302.500		
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				8.400.000		8.400.000		8.400.000		8.400.000		8.400.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	11.132	11.132	8.400.000	11.132	8.400.000	11.132	8.400.000	11.132	8.400.000	11.132	8.400.000		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				26.130.000		26.130.000		26.130.000		26.130.000		26.130.000		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1	26.130.000	1	26.130.000	1	26.130.000	1	26.130.000	1	26.130.000		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				125.380.000		125.380.000		125.380.000		125.380.000		125.380.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	125.380.000	1	125.380.000	1	125.380.000	1	125.380.000	1	125.380.000		
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				18.600.000		18.600.000		18.600.000		18.600.000		18.600.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	1	18.600.000	1	18.600.000	1	18.600.000	1	18.600.000	1	18.600.000		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				4.200.000		4.200.000		4.200.000		4.200.000		4.200.000		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1	4.200.000	1	4.200.000	1	4.200.000	1	4.200.000	1	4.200.000		
1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi				30.900.000		30.900.000		30.900.000		30.900.000		30.900.000		
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1	1	30.900.000	1	30.900.000	1	30.900.000	1	30.900.000	1	30.900.000		
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Bumi Ayu	Cakupan penemuan kasus TB (%)	79,28	83	687.183.500	85	687.183.500	87	687.183.500	90	687.183.500	92	687.183.500	1.02.0.00.0.00.01.00 18 - Puskesmas Bumi Ayu	
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	76	76		76		76		76		76			
	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				687.183.500		687.183.500		687.183.500		687.183.500		687.183.500		
Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1	687.183.500	1	687.183.500	1	687.183.500	1	687.183.500	1	687.183.500		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.101	1.101		1.101		1.101		1.101		1.101			
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6.740	6.740		6.740		6.740		6.740		6.740			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1	1		1				1		1			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3.887	3.887		3.887		3.887		3.887		3.887			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	70	70		70		70		70		70			
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	869	869		869		869		869		869			
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	25.642	25.642		25.642				25.642		25.642			
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				7.800.000		7.800.000		7.800.000		7.800.000		7.800.000		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.101	1.101	7.800.000	1.101	7.800.000	1.101	7.800.000	1.101	7.800.000	1.101	7.800.000		
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				30.600.000		30.600.000		30.600.000		30.600.000		30.600.000		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6.740	6.740	30.600.000	6.740	30.600.000	6.740	30.600.000	6.740	30.600.000	6.740	30.600.000		
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3.887	3.887	9.000.000	3.887	9.000.000	3.887	9.000.000	3.887	9.000.000	3.887	9.000.000		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				9.300.000		9.300.000		9.300.000		9.300.000		9.300.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	70	70	9.300.000	70	9.300.000	70	9.300.000	70	9.300.000	70	9.300.000		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				9.700.000		9.700.000		9.700.000		9.700.000		9.700.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	869	869	9.700.000	869	9.700.000	869	9.700.000	869	9.700.000	869	9.700.000		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				311.160.000		311.160.000		311.160.000		311.160.000		311.160.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1	311.160.000	1	311.160.000	1	311.160.000	1	311.160.000	1	311.160.000		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				6.050.000		6.050.000		6.050.000		6.050.000		6.050.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1	6.050.000	1	6.050.000	1	6.050.000	1	6.050.000	1	6.050.000		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				17.500.000		17.500.000		17.500.000		17.500.000		17.500.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1	17.500.000	1	17.500.000	1	17.500.000	1	17.500.000	1	17.500.000		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				28.329.500		28.329.500		28.329.500		28.329.500		28.329.500		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1	28.329.500	1	28.329.500	1	28.329.500	1	28.329.500	1	28.329.500		
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				1.900.000		1.900.000		1.900.000		1.900.000		1.900.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	25.642	25.642	1.900.000	25.642	1.900.000		1.900.000	25.642	1.900.000	25.642	1.900.000		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				59.200.000		59.200.000		59.200.000		59.200.000		59.200.000		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1	59.200.000	1	59.200.000	1	59.200.000	1	59.200.000	1	59.200.000		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				139.327.000		139.327.000		139.327.000		139.327.000		139.327.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	139.327.000	1	139.327.000	1	139.327.000	1	139.327.000	1	139.327.000		
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				4.817.000		4.817.000		4.817.000		4.817.000		4.817.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1	4.817.000	1	4.817.000	1	4.817.000	1	4.817.000	1	4.817.000		
1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000		
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				5.800.000		5.800.000		5.800.000		5.800.000		5.800.000		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	1	5.800.000	1	5.800.000	1	5.800.000	1	5.800.000	1	5.800.000		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				900.000		900.000		900.000		900.000		900.000		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1	900.000	1	900.000	1	900.000	1	900.000	1	900.000		
1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi				45.650.000		45.650.000		45.650.000		45.650.000		45.650.000		
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1	1	45.650.000	1	45.650.000		45.650.000	1	45.650.000	1	45.650.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Dumai Barat	Cakupan penemuan kasus TB (%)	79,28	83	474.684.650	85	474.684.650	87	474.684.650	90	474.684.650	92	474.684.650	1.02.0.00.0.00.01.00 15 - Puskesmas Dumai Barat	
	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100		100		100		100					
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	76	76		76		76		76					
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				474.684.650		474.684.650		474.684.650		474.684.650		474.684.650		
Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	474.684.650	1	474.684.650	1	474.684.650	1	474.684.650	1	474.684.650		
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2.141	2.141		2.141		2.141		2.141					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	45	45		45		45		45					
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	588	588		588		588		588					
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	13.580	13.580		13.580		13.580		13.580					
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	555	555		555		555		555					
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1		1		1		1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3.505	3.505			3.505			3.505			3.505		
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				7.400.000		7.400.000		7.400.000		7.400.000		7.400.000		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	555	555	7.400.000	555	7.400.000	555	7.400.000	555	7.400.000	555	7.400.000		
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				18.200.000		18.200.000		18.200.000		18.200.000		18.200.000		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3.505	3.505	18.200.000	3.505	18.200.000	3.505	18.200.000	3.505	18.200.000	3.505	18.200.000		
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				7.400.000		7.400.000		7.400.000		7.400.000		7.400.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2.141	2.141	7.400.000	2.141	7.400.000	2.141	7.400.000	2.141	7.400.000	2.141	7.400.000		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	45	45	15.000.000	45	15.000.000	45	15.000.000	45	15.000.000	45	15.000.000		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	588	588	8.000.000	588	8.000.000	588	8.000.000	588	8.000.000	588	8.000.000		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				194.552.000		194.552.000		194.552.000		194.552.000		194.552.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1	194.552.000	1	194.552.000	1	194.552.000	1	194.552.000	1	194.552.000		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				950.000		950.000		950.000		950.000		950.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1	950.000	1	950.000	1	950.000	1	950.000	1	950.000		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				15.800.000		15.800.000		15.800.000		15.800.000		15.800.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1	15.800.000	1	15.800.000	1	15.800.000	1	15.800.000	1	15.800.000		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				18.800.000		18.800.000		18.800.000		18.800.000		18.800.000		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1	18.800.000	1	18.800.000	1	18.800.000	1	18.800.000	1	18.800.000		
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	13.580	13.580	1.800.000	13.580	1.800.000	13.580	1.800.000	13.580	1.800.000	13.580	1.800.000		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				50.520.000		50.520.000		50.520.000		50.520.000		50.520.000		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1	50.520.000	1	50.520.000	1	50.520.000	1	50.520.000	1	50.520.000		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				107.162.650		107.162.650		107.162.650		107.162.650		107.162.650		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	107.162.650	1	107.162.650	1	107.162.650	1	107.162.650	1	107.162.650		
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				7.800.000		7.800.000		7.800.000		7.800.000		7.800.000		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	1	7.800.000	1	7.800.000	1	7.800.000	1	7.800.000	1	7.800.000		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				700.000		700.000		700.000		700.000		700.000		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1	700.000	1	700.000	1	700.000	1	700.000	1	700.000		
1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi				20.600.000		20.600.000		20.600.000		20.600.000		20.600.000		
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1	1	20.600.000	1	20.600.000	1	20.600.000	1	20.600.000	1	20.600.000		
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Dumai Kota	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100	711.363.750	100	711.363.750	100	711.363.750	100	711.363.750	100	711.363.750	1.02.0.00.0.00.01.00 14 - Puskesmas Dumai Kota	
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	79,28	83		85		87		90		92			
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	0	76		76		76		76		76			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				711.363.750		711.363.750		711.363.750		711.363.750		711.363.750		
Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1	711.363.750	1	711.363.750	1	711.363.750	1	711.363.750	1	711.363.750		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	962	962		962		962		962		962			
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	2.639	2.639		2.639		2.639		2.639		2.639			
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	995	995		995		995		995		995			
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	88	88		88		88		88		88			
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4.462	4.462		4.462		4.462		4.462		4.462			
	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6.763	6.763		6.763		6.763		6.763		6.763			
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				42.900.000		42.900.000		42.900.000		42.900.000		42.900.000		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	962	962	42.900.000	962	42.900.000	962	42.900.000	962	42.900.000	962	42.900.000		
1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				27.200.000		27.200.000		27.200.000		27.200.000		27.200.000		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6.763	6.763	27.200.000	6.763	27.200.000	6.763	27.200.000	6.763	27.200.000	6.763	27.200.000		
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				37.800.000		37.800.000		37.800.000		37.800.000		37.800.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4.462	4.462	37.800.000	4.462	37.800.000	4.462	37.800.000	4.462	37.800.000	4.462	37.800.000		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				8.800.000		8.800.000		8.800.000		8.800.000		8.800.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	88	88	8.800.000	88	8.800.000	88	8.800.000	88	8.800.000	88	8.800.000		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	995	995	15.000.000	995	15.000.000	995	15.000.000	995	15.000.000	995	15.000.000		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				209.890.000		209.890.000		209.890.000		209.890.000		209.890.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1	209.890.000	1	209.890.000	1	209.890.000	1	209.890.000	1	209.890.000		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.250.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1	4.250.000	1	4.250.000	1	4.250.000	1	4.250.000	1	4.250.000		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				32.773.750		32.773.750		32.773.750		32.773.750		32.773.750		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1	32.773.750	1	32.773.750	1	32.773.750	1	32.773.750	1	32.773.750		
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				4.400.000		4.400.000		4.400.000		4.400.000		4.400.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	2.639	2.639	4.400.000	2.639	4.400.000	2.639	4.400.000	2.639	4.400.000	2.639	4.400.000		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				66.050.000		66.050.000		66.050.000		66.050.000		66.050.000		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1	66.050.000	1	66.050.000	1	66.050.000	1	66.050.000	1	66.050.000		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				170.550.000		170.550.000		170.550.000		170.550.000		170.550.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	170.550.000	1	170.550.000	1	170.550.000	1	170.550.000	1	170.550.000		
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				11.550.000		11.550.000		11.550.000		11.550.000		11.550.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1	11.550.000	1	11.550.000	1	11.550.000	1	11.550.000	1	11.550.000		
1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				7.800.000		7.800.000		7.800.000		7.800.000		7.800.000		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	1	7.800.000	1	7.800.000	1	7.800.000	1	7.800.000	1	7.800.000		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000		
1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi				55.500.000		55.500.000		55.500.000		55.500.000		55.500.000		
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1	1	55.500.000	1	55.500.000	1	55.500.000	1	55.500.000	1	55.500.000		
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Jaya Mukti	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100	660.035.000	100	660.035.000	100	660.035.000	100	660.035.000	100	660.035.000	1.02.0.00.0.00.01.00 21 - Puskesmas Jaya Mukti	
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	79,28	83		85		87		90		92			
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	76	76		76		76		76		76			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				660.035.000		660.035.000		660.035.000		660.035.000		660.035.000		
Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1	660.035.000	1	660.035.000	1	660.035.000	1	660.035.000	1	660.035.000		
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	13.566	13.566		13.566		13.566		13.566		13.566			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	125	125		125		125		125		125			
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.500	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500			
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	48.478	48.478		48.478		48.478		48.478		48.478			
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.968	1.968		1.968		1.968		1.968		1.968			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6.269	6.269		6.269		6.269		6.269		6.269			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				39.000.000		39.000.000		39.000.000		39.000.000		39.000.000		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.968	1.968	39.000.000	1.968	39.000.000	1.968	39.000.000	1.968	39.000.000	1.968	39.000.000		
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				24.700.000		24.700.000		24.700.000		24.700.000		24.700.000		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	13.566	13.566	24.700.000	13.566	24.700.000	13.566	24.700.000	13.566	24.700.000	13.566	24.700.000		
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6.269	6.269	36.000.000	6.269	36.000.000	6.269	36.000.000	6.269	36.000.000	6.269	36.000.000		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	125	125	21.000.000	125	21.000.000	125	21.000.000	125	21.000.000	125	21.000.000		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				5.800.000		5.800.000		5.800.000		5.800.000		5.800.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.500	1.500	5.800.000	1.500	5.800.000	1.500	5.800.000	1.500	5.800.000	1.500	5.800.000		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				140.560.000		140.560.000		140.560.000		140.560.000		140.560.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1	140.560.000	1	140.560.000	1	140.560.000	1	140.560.000	1	140.560.000		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				57.725.000		57.725.000		57.725.000		57.725.000		57.725.000		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1	57.725.000	1	57.725.000	1	57.725.000	1	57.725.000	1	57.725.000		
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	48.478	48.478	7.000.000	48.478	7.000.000	48.478	7.000.000	48.478	7.000.000	48.478	7.000.000		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				74.800.000		74.800.000		74.800.000		74.800.000		74.800.000		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1	74.800.000	1	74.800.000	1	74.800.000	1	74.800.000	1	74.800.000		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				167.690.000		167.690.000		167.690.000		167.690.000		167.690.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	167.690.000	1	167.690.000	1	167.690.000	1	167.690.000	1	167.690.000		
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				6.810.000		6.810.000		6.810.000		6.810.000		6.810.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1	6.810.000	1	6.810.000	1	6.810.000	1	6.810.000	1	6.810.000		
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	1	5.500.000	1	5.500.000	1	5.500.000	1	5.500.000	1	5.500.000		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				2.700.000		2.700.000		2.700.000		2.700.000		2.700.000		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1	2.700.000	1	2.700.000	1	2.700.000	1	2.700.000	1	2.700.000		
1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi				60.450.000		60.450.000		60.450.000		60.450.000		60.450.000		
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1	1	60.450.000	1	60.450.000	1	60.450.000	1	60.450.000	1	60.450.000		
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Medang Kampai	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	76	76	418.337.950	76	418.337.950	76	418.337.950	76	418.337.950	76	418.337.950	1.02.0.00.0.00.01.00 17 - Puskesmas Medang kampai	
	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100		100		100		100					
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	79,28	83		85		87		90		92			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN				
			2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				418.337.950		418.337.950		418.337.950		418.337.950		418.337.950						
Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	418.337.950	1	418.337.950	1	418.337.950	1	418.337.950	1	418.337.950						
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4.123	4.123				4.123				4.123				4.123			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1				1				1				1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1	1				1				1				1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1				1				1				1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1				1				1				1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1				1				1				1			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	1				1				1				1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1				1				1				1			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1				1				1				1			
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	28.943	28.943				28.943				28.943				28.943		28.943	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	35	35				35				35				35		35	
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	330	330				330				330				330		330	
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	13.111	13.111				13.111				13.111				13.111		13.111	
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	619	619				619				619				619		619	
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				37.800.000		37.800.000		37.800.000		37.800.000		37.800.000						
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	619	619	37.800.000	619	37.800.000	619	37.800.000	619	37.800.000	619	37.800.000						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				11.550.000		11.550.000		11.550.000		11.550.000		11.550.000		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4.123	4.123	11.550.000	4.123	11.550.000	4.123	11.550.000	4.123	11.550.000	4.123	11.550.000		
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				13.500.000		13.500.000		13.500.000		13.500.000		13.500.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	28.943	28.943	13.500.000	28.943	13.500.000	28.943	13.500.000	28.943	13.500.000	28.943	13.500.000		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				15.029.000		15.029.000		15.029.000		15.029.000		15.029.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	35	35	15.029.000	35	15.029.000	35	15.029.000	35	15.029.000	35	15.029.000		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				600.000		600.000		600.000		600.000		600.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	330	330	600.000	330	600.000	330	600.000	330	600.000	330	600.000		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				103.260.000		103.260.000		103.260.000		103.260.000		103.260.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1	103.260.000	1	103.260.000	1	103.260.000	1	103.260.000	1	103.260.000		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1.050.000		1.050.000		1.050.000		1.050.000		1.050.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1	1.050.000	1	1.050.000	1	1.050.000	1	1.050.000	1	1.050.000		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5.250.000		5.250.000		5.250.000		5.250.000		5.250.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1	5.250.000	1	5.250.000	1	5.250.000	1	5.250.000	1	5.250.000		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				7.153.950		7.153.950		7.153.950		7.153.950		7.153.950		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1	7.153.950	1	7.153.950	1	7.153.950	1	7.153.950	1	7.153.950		
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				6.900.000		6.900.000		6.900.000		6.900.000		6.900.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	13.111	13.111	6.900.000	13.111	6.900.000	13.111	6.900.000	13.111	6.900.000	13.111	6.900.000		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				34.575.000		34.575.000		34.575.000		34.575.000		34.575.000		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1	34.575.000	1	34.575.000	1	34.575.000	1	34.575.000	1	34.575.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				144.770.000		144.770.000		144.770.000		144.770.000		144.770.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	144.770.000	1	144.770.000	1	144.770.000	1	144.770.000	1	144.770.000		
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				5.550.000		5.550.000		5.550.000		5.550.000		5.550.000		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1	5.550.000	1	5.550.000	1	5.550.000	1	5.550.000	1	5.550.000		
1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi				28.350.000		28.350.000		28.350.000		28.350.000		28.350.000		
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1	1	28.350.000	1	28.350.000	1	28.350.000	1	28.350.000	1	28.350.000		
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Purnama	Cakupan penemuan kasus TB (%)	79,28	83	511.932.000	85	511.932.000	87	511.932.000	90	511.932.000	92	511.932.000	1.02.0.00.0.00.01.00 20 - Puskesmas Purnama	
	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100		100		100		100		100			
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	76	76		76		76		76		76			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				511.932.000		511.932.000		511.932.000		511.932.000		511.932.000		
Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4.811	4.811	511.932.000	4.811	511.932.000	4.811	511.932.000	4.811	511.932.000	4.811	511.932.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	781	781		781		781		781		781			
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	16.890	16.890		16.890		16.890		16.890		16.890			
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2.017	2.017		2.017		2.017		2.017		2.017			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	47	47		47		47		47		47			
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	389	389		389		389		389		389			
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				10.450.000		10.450.000		10.450.000		10.450.000		10.450.000		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	781	781	10.450.000	781	10.450.000	781	10.450.000	781	10.450.000	781	10.450.000		
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				14.150.000		14.150.000		14.150.000		14.150.000		14.150.000		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4.811	4.811	14.150.000	4.811	14.150.000	4.811	14.150.000	4.811	14.150.000	4.811	14.150.000		
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2.017	2.017	18.000.000	2.017	18.000.000	2.017	18.000.000	2.017	18.000.000	2.017	18.000.000		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	47	47	7.200.000	47	7.200.000	47	7.200.000	47	7.200.000	47	7.200.000		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				8.200.000		8.200.000		8.200.000		8.200.000		8.200.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	389	389	8.200.000	389	8.200.000	389	8.200.000	389	8.200.000	389	8.200.000		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				187.620.000		187.620.000		187.620.000		187.620.000		187.620.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1	187.620.000	1	187.620.000	1	187.620.000	1	187.620.000	1	187.620.000		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1.300.000		1.300.000		1.300.000		1.300.000		1.300.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1	1.300.000	1	1.300.000	1	1.300.000	1	1.300.000	1	1.300.000		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				8.400.000		8.400.000		8.400.000		8.400.000		8.400.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1	8.400.000	1	8.400.000	1	8.400.000	1	8.400.000	1	8.400.000		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				63.319.250		63.319.250		63.319.250		63.319.250		63.319.250		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1	63.319.250	1	63.319.250	1	63.319.250	1	63.319.250	1	63.319.250		
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	16.890	16.890	6.000.000	16.890	6.000.000	16.890	6.000.000	16.890	6.000.000	16.890	6.000.000		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				30.472.250		30.472.250		30.472.250		30.472.250		30.472.250		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1	30.472.250	1	30.472.250	1	30.472.250	1	30.472.250	1	30.472.250		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				117.540.500		117.540.500		117.540.500		117.540.500		117.540.500		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	117.540.500	1	117.540.500	1	117.540.500	1	117.540.500	1	117.540.500		
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				5.580.000		5.580.000		5.580.000		5.580.000		5.580.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1	5.580.000	1	5.580.000	1	5.580.000	1	5.580.000	1	5.580.000		
1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000		
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				4.200.000		4.200.000		4.200.000		4.200.000		4.200.000		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1	4.200.000	1	4.200.000	1	4.200.000	1	4.200.000	1	4.200.000		
1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi				20.400.000		20.400.000		20.400.000		20.400.000		20.400.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1	1	20.400.000	1	20.400.000	1	20.400.000	1	20.400.000	1	20.400.000		
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Sungai Sembilan	Cakupan penemuan kasus TB (%)	79,28	83	832.237.800	85	832.237.800	87	832.237.800	90	832.237.800	92	832.237.800	1.02.0.00.0.00.01.00 24 - Puskesmas Sungai Sembilan	
	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100		100		100		100					
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	76	76		76		76		76					
	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				832.237.800		832.237.800		832.237.800		832.237.800			
Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	572	572	832.237.800	572	832.237.800	572	832.237.800	572	832.237.800	572	832.237.800		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9.807	9.807		9.807		9.807		9.807					
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.472	1.472		1.472		1.472		1.472					
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	31.872	31.872		31.872		31.872		31.872					
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1	1		1		1		1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	76	76		76		76		76		76			
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3.629	3.629		3.629		3.629		3.629		3.629			
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				108.000.000		108.000.000		108.000.000		108.000.000		108.000.000		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.472	1.472	108.000.000	1.472	108.000.000	1.472	108.000.000	1.472	108.000.000	1.472	108.000.000		
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				82.800.000		82.800.000		82.800.000		82.800.000		82.800.000		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9.807	9.807	82.800.000	9.807	82.800.000	9.807	82.800.000	9.807	82.800.000	9.807	82.800.000		
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3.629	3.629	9.000.000	3.629	9.000.000	3.629	9.000.000	3.629	9.000.000	3.629	9.000.000		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				16.200.000		16.200.000		16.200.000		16.200.000		16.200.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	76	76	16.200.000	76	16.200.000	76	16.200.000	76	16.200.000	76	16.200.000		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				10.950.000		10.950.000		10.950.000		10.950.000		10.950.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	572	572	10.950.000	572	10.950.000	572	10.950.000	572	10.950.000	572	10.950.000		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				249.210.000		249.210.000		249.210.000		249.210.000		249.210.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1	249.210.000	1	249.210.000	1	249.210.000	1	249.210.000	1	249.210.000		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				3.450.000		3.450.000		3.450.000		3.450.000		3.450.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1	3.450.000	1	3.450.000	1	3.450.000	1	3.450.000	1	3.450.000		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				11.250.000		11.250.000		11.250.000		11.250.000		11.250.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1	11.250.000	1	11.250.000	1	11.250.000	1	11.250.000	1	11.250.000		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				32.017.500		32.017.500		32.017.500		32.017.500		32.017.500		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1	32.017.500	1	32.017.500	1	32.017.500	1	32.017.500	1	32.017.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				4.050.000		4.050.000		4.050.000		4.050.000		4.050.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	31.872	31.872	4.050.000	31.872	4.050.000	31.872	4.050.000	31.872	4.050.000	31.872	4.050.000		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				19.930.000		19.930.000		19.930.000		19.930.000		19.930.000		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1	19.930.000	1	19.930.000	1	19.930.000	1	19.930.000	1	19.930.000		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				163.935.500		163.935.500		163.935.500		163.935.500		163.935.500		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	163.935.500	1	163.935.500	1	163.935.500	1	163.935.500	1	163.935.500		
1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria				319.800		319.800		319.800		319.800		319.800		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1	1	319.800	1	319.800	1	319.800	1	319.800	1	319.800		
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				17.100.000		17.100.000		17.100.000		17.100.000		17.100.000		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	1	17.100.000	1	17.100.000	1	17.100.000	1	17.100.000	1	17.100.000		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				5.400.000		5.400.000		5.400.000		5.400.000		5.400.000		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1	5.400.000	1	5.400.000	1	5.400.000	1	5.400.000	1	5.400.000		
1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi				98.625.000		98.625.000		98.625.000		98.625.000		98.625.000		
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1	1	98.625.000	1	98.625.000	1	98.625.000	1	98.625.000	1	98.625.000		
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada RSUD	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	85	85	72.681.576.018	87	71.420.622.018	87	71.906.350.043	89	28.215.322.655	91	29.315.247.655	1.02.0.00.0.00.01.00 13 - RSUD	
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				71.081.576.018		69.052.622.018		69.838.350.043		26.117.322.655		27.707.247.655		
Terlaksananya Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah untuk UKM dan UKP Sesuai Standar	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)		10	71.081.576.018	10	69.052.622.018	10	69.838.350.043	10	26.117.322.655	20	27.707.247.655		
	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)		1		0		0		0					
	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)				1		1							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)		35		50		50		50		50			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)		20		70		40		10		10			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)		1		8		8		8		8			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)				1		1		1		1			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)		40		50		80		20		40			
	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)				1		1		1		1			
1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya				47.281.576.018		0		0		0		0		
Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)		1	47.281.576.018	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.02.02.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				0		200.000.000		200.000.000		0		0		
Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)			0	1	200.000.000	1	200.000.000		0		0		
1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				3.500.000.000		3.902.622.018		5.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)		1	3.500.000.000	8	3.902.622.018	8	5.000.000.000	8	1.000.000.000	8	1.000.000.000		
1.02.02.2.01.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				0		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)			0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				4.200.000.000		15.000.000.000		14.688.350.043		5.000.000.000		4.000.000.000		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)		20	4.200.000.000	70	15.000.000.000	40	14.688.350.043	10	5.000.000.000	10	4.000.000.000		
1.02.02.2.01.0015 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi				500.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		
Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)		35	500.000.000	50	750.000.000	50	750.000.000	50	750.000.000	50	750.000.000		
1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				600.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		500.000.000		500.000.000		
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)		40	600.000.000	50	1.000.000.000	80	1.000.000.000	20	500.000.000	40	500.000.000		
1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit				0		23.000.000.000		23.000.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)			0	1	23.000.000.000	1	23.000.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				15.000.000.000		25.000.000.000		25.000.000.000		18.617.322.655		21.207.247.655		
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)		10	15.000.000.000	10	25.000.000.000	10	25.000.000.000	10	18.617.322.655	20	21.207.247.655		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				750.000.000		1.018.000.000		1.018.000.000		1.048.000.000		1.058.000.000		
Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)		1	750.000.000	1	1.018.000.000	1	1.018.000.000	1	1.048.000.000	1	1.058.000.000		
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)		1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				50.000.000		20.000.000		20.000.000		50.000.000		60.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		1	50.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000		
1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)		1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000		
1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit				50.000.000		198.000.000		198.000.000		198.000.000		198.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)		1	50.000.000	1	198.000.000	1	198.000.000	1	198.000.000	1	198.000.000		
1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				150.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)		1	150.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				800.000.000		1.300.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		500.000.000		
Tersedianya sarana fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)		1	800.000.000	1	1.300.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	500.000.000		
1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				800.000.000		1.300.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		500.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)		1	800.000.000	1	1.300.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	500.000.000		
1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Mutu di sarana Rumah Sakit, Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.02.02.2.04.0004 - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				2.147.681.000		2.949.987.000		3.151.987.000		3.153.987.000		2.055.987.000		
Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan pada Dinas Kesehatan	Persentase puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	60	70	1.147.681.000	80	1.149.987.000	90	1.151.987.000	100	1.153.987.000	100	1.155.987.000	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS KESEHATAN	
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Per 1000 Penduduk)	4,73	4,85		4,9		4,95		5		5			
	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				25.000.000		26.000.000		27.000.000		28.000.000		29.000.000		
Terlaksananya tempat praktek tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1	1	25.000.000	1	26.000.000	1	27.000.000	1	28.000.000	1	29.000.000		
1.02.03.2.01.0001 - Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				25.000.000		26.000.000		27.000.000		28.000.000		29.000.000		
Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1	1	25.000.000	1	26.000.000	1	27.000.000	1	28.000.000	1	29.000.000		
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				634.694.000		636.000.000		637.000.000		638.000.000		639.000.000		
Terlaksananya tenaga kesehatan Teregistrasi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	78	12	634.694.000	12	636.000.000	12	637.000.000	12	638.000.000	12	639.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	2	2				2				2			
1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				504.000.000		504.000.000		504.000.000		504.000.000		504.000.000		
Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	78	12	504.000.000	12	504.000.000	12	504.000.000	12	504.000.000	12	504.000.000		
1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				130.694.000		132.000.000		133.000.000		134.000.000		135.000.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	2	2	130.694.000	2	132.000.000	2	133.000.000	2	134.000.000	2	135.000.000		
1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				487.987.000		487.987.000		487.987.000		487.987.000		487.987.000		
Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Kota Dumai	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	150	150	487.987.000	150	487.987.000	150	487.987.000	150	487.987.000	150	487.987.000		
1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				487.987.000		487.987.000		487.987.000		487.987.000		487.987.000		
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	150	150	487.987.000	150	487.987.000	150	487.987.000	150	487.987.000	150	487.987.000		
Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan pada RSUD	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	100	100	1.000.000.000	100	1.800.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	900.000.000	1.02.0.00.0.00.01.00 13 - RSUD	
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				500.000.000		800.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		400.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya tenaga kesehatan Terregistrasi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		50	500.000.000	74	800.000.000	50	1.000.000.000	50	1.000.000.000	5	400.000.000		
1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				500.000.000		800.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		400.000.000		
Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		50	500.000.000	74	800.000.000	50	1.000.000.000	50	1.000.000.000	5	400.000.000		
1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				500.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		500.000.000		
Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Kota Dumai	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)		50	500.000.000	75	1.000.000.000	75	1.000.000.000	75	1.000.000.000	50	500.000.000		
1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				500.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		500.000.000		
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)		50	500.000.000	75	1.000.000.000	75	1.000.000.000	75	1.000.000.000	50	500.000.000		
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				548.887.000		663.887.000		663.887.000		663.887.000		663.887.000		
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman pada Dinas Kesehatan	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	54,45	60	548.887.000	65	663.887.000	70	663.887.000	80	663.887.000	90	663.887.000	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS KESEHATAN	
1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		
Terlaksananya apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, dan UMOT yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	3	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000		
1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	3	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				194.737.000		234.737.000		234.737.000		234.737.000		234.737.000		
Terlaksananya industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1	1	194.737.000	1	234.737.000	1	234.737.000	1	234.737.000	1	234.737.000		
1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				194.737.000		234.737.000		234.737.000		234.737.000		234.737.000		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1	1	194.737.000	1	234.737.000	1	234.737.000	1	234.737.000	1	234.737.000		
1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				75.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air minum dan air bersih, pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	4	4	75.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		
1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				75.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	4	4	75.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.04.2.05 - Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				60.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya dokumen pelaksanaan penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	1	1	60.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
1.02.04.2.05.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				60.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	1	1	60.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				174.150.000		184.150.000		184.150.000		184.150.000		184.150.000		
Tersedianya dokumen pelaksanaan pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	30	30	174.150.000	30	184.150.000	30	184.150.000	30	184.150.000	30	184.150.000		
1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				174.150.000		184.150.000		184.150.000		184.150.000		184.150.000		
Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	30	30	174.150.000	30	184.150.000	30	184.150.000	30	184.150.000	30	184.150.000		
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				368.239.350		437.239.350		441.239.350		445.239.350		449.239.350		
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.pada Dinas Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	67,69	71,5	310.174.000	72,5	379.174.000	73,5	383.174.000	75,5	387.174.000	75,5	391.174.000	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS KESEHATAN	
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		102.000.000		104.000.000		106.000.000		108.000.000		
Terlaksananya kelurahan siaga aktif	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	6	6	50.000.000	6	102.000.000	6	104.000.000	6	106.000.000	6	108.000.000		
1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				50.000.000		102.000.000		104.000.000		106.000.000		108.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	6	6	50.000.000	6	102.000.000	6	104.000.000	6	106.000.000	6	108.000.000				
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		52.000.000		54.000.000		56.000.000		58.000.000				
Terlaksananya rumah tangga yang melaksanakan PHBS	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat (Keluarga)	42.157	42.579	50.000.000	43.218	52.000.000	43.866	54.000.000	44.524	56.000.000	45.192	58.000.000				
1.02.05.2.02.0002 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				50.000.000		52.000.000		54.000.000		56.000.000		58.000.000				
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat (Keluarga)	42.157	42.579	50.000.000	43.218	52.000.000	43.866	54.000.000	44.524	56.000.000	45.192	58.000.000				
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				210.174.000		225.174.000		225.174.000		225.174.000		225.174.000				
Terlaksananya posyandu mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	3	3	210.174.000	3	225.174.000	3	225.174.000	3	225.174.000	3	225.174.000				
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				210.174.000		225.174.000		225.174.000		225.174.000		225.174.000				
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	3	3	210.174.000	3	225.174.000	3	225.174.000	3	225.174.000	3	225.174.000				
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Bukit Kapur	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	67,69	71,5	5.940.000	72,5	5.940.000	73,5	5.940.000	75,5	5.940.000	75,5	5.940.000	1.02.0.00.0.00.01.00 16 - Puskesmas Bukit Kapur			
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5.940.000		5.940.000		5.940.000		5.940.000		5.940.000				
Terlaksananya posyandu mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	1	5.940.000	1	5.940.000	1	5.940.000	1	5.940.000	1	5.940.000				
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				5.940.000		5.940.000		5.940.000		5.940.000		5.940.000				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	1	5.940.000	1	5.940.000	1	5.940.000	1	5.940.000	1	5.940.000	1.02.0.00.0.00.01.00 22 - Puskesmas Bukit Kayu Kapur	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Bukit Kayu Kapur	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	67,69	71,5	9.291.000	72,5	9.291.000	73,5	9.291.000	75,5	9.291.000	75,5	9.291.000		
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				9.291.000		9.291.000		9.291.000		9.291.000		9.291.000		
Terlaksananya posyandu mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	1	9.291.000	1	9.291.000	1	9.291.000	1	9.291.000	1	9.291.000		
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				9.291.000		9.291.000		9.291.000		9.291.000		9.291.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	1	9.291.000	1	9.291.000	1	9.291.000	1	9.291.000	1	9.291.000	1.02.0.00.0.00.01.00 19 - Puskesmas Bukit Timah	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Bukit Timah	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	67,69	71,5	9.160.000	72,5	9.160.000	73,5	9.160.000	75,5	9.160.000	75,5	9.160.000		
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				9.160.000		9.160.000		9.160.000		9.160.000		9.160.000		
Terlaksananya posyandu mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	1	9.160.000	1	9.160.000	1	9.160.000	1	9.160.000	1	9.160.000		
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				9.160.000		9.160.000		9.160.000		9.160.000		9.160.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	1	9.160.000	1	9.160.000	1	9.160.000	1	9.160.000	1	9.160.000	1.02.0.00.0.00.01.00 18 - Puskesmas Bumi Ayu	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Bumi Ayu	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	67,69	71,5	2.915.000	72,5	2.915.000	73,5	2.915.000	75,5	2.915.000	75,5	2.915.000		
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.915.000		2.915.000		2.915.000		2.915.000		2.915.000		
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	1	2.915.000	1	2.915.000	1	2.915.000	1	2.915.000	1	2.915.000		
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2.915.000		2.915.000		2.915.000		2.915.000		2.915.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	1	2.915.000	1	2.915.000	1	2.915.000	1	2.915.000	1	2.915.000		
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Dumai Barat	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	67,69	71,5	2.987.350	72,5	2.987.350	73,5	2.987.350	75,5	2.987.350	75,5	2.987.350	1.02.0.00.0.00.01.00 15 - Puskesmas Dumai Barat	
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.987.350		2.987.350		2.987.350		2.987.350		2.987.350		
Jumlah posyandu mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	1	2.987.350	1	2.987.350	1	2.987.350	1	2.987.350	1	2.987.350		
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2.987.350		2.987.350		2.987.350		2.987.350		2.987.350		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	1	2.987.350	1	2.987.350	1	2.987.350	1	2.987.350	1	2.987.350		
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Dumai Kota	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	67,69	71,5	7.390.000	72,5	7.390.000	73,5	7.390.000	75,5	7.390.000	75,5	7.390.000	1.02.0.00.0.00.01.00 14 - Puskesmas Dumai Kota	
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				7.390.000		7.390.000		7.390.000		7.390.000		7.390.000		
Terlaksananya posyandu mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	1	7.390.000	1	7.390.000	1	7.390.000	1	7.390.000	1	7.390.000		
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				7.390.000		7.390.000		7.390.000		7.390.000		7.390.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	1	7.390.000	1	7.390.000	1	7.390.000	1	7.390.000	1	7.390.000		
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Jaya Mukti	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	67,69	71,5	7.650.000	72,5	7.650.000	73,5	7.650.000	75,5	7.650.000	75,5	7.650.000	1.02.0.00.0.00.01.00 21 - Puskesmas Jaya Mukti	
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				7.650.000		7.650.000		7.650.000		7.650.000		7.650.000		
Terlaksananya posyandu mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	1	7.650.000	1	7.650.000	1	7.650.000	1	7.650.000	1	7.650.000		
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				7.650.000		7.650.000		7.650.000		7.650.000		7.650.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	1	7.650.000	1	7.650.000	1	7.650.000	1	7.650.000	1	7.650.000	1.02.0.00.0.00.01.00 17 - Puskesmas Medang kampai	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Medang Kampai	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	67,69	71,5	190.000	72,5	190.000	73,5	190.000	75,5	190.000	75,5	190.000		
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				190.000		190.000		190.000		190.000		190.000		
Terlaksananya posyandu mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	1	190.000	1	190.000	1	190.000	1	190.000	1	190.000		
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				190.000		190.000		190.000		190.000		190.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	1	190.000	1	190.000	1	190.000	1	190.000	1	190.000	1.02.0.00.0.00.01.00 20 - Puskesmas Purnama	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Purnama	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	67,69	71,5	3.046.500	72,5	3.046.500	73,5	3.046.500	75,5	3.046.500	75,5	3.046.500		
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				3.046.500		3.046.500		3.046.500		3.046.500		3.046.500		
Terlaksananya posyandu mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	1	3.046.500	1	3.046.500	1	3.046.500	1	3.046.500	1	3.046.500		
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3.046.500		3.046.500		3.046.500		3.046.500		3.046.500		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	1	3.046.500	1	3.046.500	1	3.046.500	1	3.046.500	1	3.046.500	1.02.0.00.0.00.01.00 24 - Puskesmas Sungai Sembilan	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Sungai Sembilan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	67,69	71,5	9.495.500	72,5	9.495.500	73,5	9.495.500	75,5	9.495.500	75,5	9.495.500		
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				9.495.500		9.495.500		9.495.500		9.495.500		9.495.500		
Terlaksananya posyandu mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	1	9.495.500	1	9.495.500	1	9.495.500	1	9.495.500	1	9.495.500		
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				9.495.500		9.495.500		9.495.500		9.495.500		9.495.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	1	9.495.500	1	9.495.500	1	9.495.500	1	9.495.500	1	9.495.500		

Tabel 4.43 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN				
1	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
1.02.0.00.0.00.01.0013 - RSUD				
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada RSUD	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 1.02.02.2.01.0015 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.04.0004 - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja perangkat daerah adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Indikator kinerja perangkat daerah berfungsi untuk mengukur kinerja output, outcome, dan dampak dari kegiatan, program, dan sasaran perangkat daerah. Indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penjabaran indikator kinerja daerah pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.44 Indikator Kinerja Daerah pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN										
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	0	50	50	50	58.33	66.67	75	
2	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	42.5	80.5	80.5	81.5	81.5	82.5	83.5	
3	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15	%	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
4	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	%	6.97	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	
5	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	81.12	82	84	85	85	86	87	
6	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Cakupan penemuan kasus TB	%	79.28	80	83	85	87	90	92	
8	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	58.33	58.33	58.33	58.33	66.67	66.67	66.67	
10	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	92	92.5	93	93	93.5	94	94	
11	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	67.69	69.5	71.5	72.5	73.5	75.5	75.5	
12	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	%	54.45	55	60	65	70	80	90	
13	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Per 1000 Penduduk	4.73	4.80	4.85	4.90	4.95	5	5	
14	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
15	Persentase puskesmas dengan SDMK	%	60	60	70	80	90	100	100	
16	Presentase lanjut usia yang mandiri	%	0	75	76	77	78	80	83	
17	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	%	0	12.4	12	12	11	10	10	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.02.0.00.0.00.01.0013 - RSUD										
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	85	85	85	87	87	89	91	
1.02.0.00.0.00.01.0014 - Puskesmas Dumai Kota										
III	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	67.69	59.5	71.5	72.5	73.5	75.5	75.5	
2	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Cakupan penemuan kasus TB	%	79.28	80	83	85	87	90	92	
4	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	0	76	76	76	76	76	76	
1.02.0.00.0.00.01.0015 - Puskesmas Dumai Barat										
IV	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	67.69	69.5	71.5	72.5	73.5	75.5	75.5	
2	Cakupan penemuan kasus TB	%	79.28	80	83	85	87	90	92	
3	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76	76	76	76	76	76	76	
4	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.02.0.00.0.00.01.0016 - Puskesmas Bukit Kapur										
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	67.69	69.5	71.5	72.5	73.5	75.5	75.5	
2	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Cakupan penemuan kasus TB	%	79.28	80	83	85	87	90	92	
4	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76	76	76	76	76	76	76	
1.02.0.00.0.00.01.0017 - Puskesmas Medang kampai										
VI	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	67.69	69.5	71.5	72.5	73.5	75.5	75.5	
2	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76	76	76	76	76	76	76	
3	Cakupan penemuan kasus TB	%	79.28	80	83	85	87	90	92	
4	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.02.0.00.0.00.01.0018 - Puskesmas Bumi Ayu										
VII	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	67.69	69.5	71.5	72.5	73.5	75.5	75.5	
2	Cakupan penemuan kasus TB	%	79.28	80	83	85	87	90	92	
3	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76	76	76	76	76	76	76	
4	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.02.0.00.0.00.01.0019 - Puskesmas Bukit Timah										
VIII	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	67.69	69.5	71.5	72.5	73.5	75.5	75.5	
2	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76	76	76	76	76	76	76	
3	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Cakupan penemuan kasus TB	%	79.28	80	83	85	87	90	92	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.02.0.00.0.00.01.0020 - Puskesmas Purnama										
IX	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	67.69	69.5	71.5	72.5	73.5	75.5	75.5	
2	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76	76	76	76	76	76	76	
4	Cakupan penemuan kasus TB	%	79.28	80	83	85	87	90	92	
1.02.0.00.0.00.01.0021 - Puskesmas Jaya Mukti										
X	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	67.69	69.5	71.5	72.5	73.5	75.5	75.5	
2	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Cakupan penemuan kasus TB	%	79.28	80	83	85	87	90	92	
4	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76	76	76	76	76	76	76	
1.02.0.00.0.00.01.0022 - Puskesmas Bukit Kayu Kapur										
XI	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	67.69	69.5	71.5	72.5	73.5	75.5	75.5	
2	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76	76	76	76	76	76	76	
3	Cakupan penemuan kasus TB	%	79.28	80	83	85	87	90	92	
4	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.02.0.00.0.00.01.0024 - Puskesmas Sungai Sembilan										
XII	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	67.69	69.5	71.5	72.5	73.5	75.5	75.5	
2	Cakupan penemuan kasus TB	%	79.28	80	83	85	87	90	92	
3	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76	76	76	76	76	76	76	
4	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan bagian dari Indikator kinerja perangkat daerah yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD. Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. Ada 18 (delapan belas) indikator yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai yang harus dicapai mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4.45 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN									
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	73,5	73,66	73,81	73,97	74,13	74,28	74,44	
2	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	81,12	82	83	84	85	86	87	
4	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	58,33	58,33	58,33	58,33	66,67	66,67	66,67	
6	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	92	92,5	93	93	93,5	94	94	
7	Persentase lanjut usia yang mandiri	%	0	75	76	77	78	80	83	
8	Cakupan penemuan kasus TB	%	79,28	80	83	85	87	90	92	
9	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	%	0	12,4	12	12	11	10	10	
10	Prevalensi obesitas > 18 tahun	%	6,97	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	
11	Prevalensi depresi pada usia > 15 tahun	%	0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
12	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Per 1000 Penduduk	4,73	4,8	4,85	4,9	4,95	5	5	
13	Persentase puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%	60	60	70	80	90	100	100	
14	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
15	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	%	54,45	55	60	65	70	80	90	
16	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	0	50	50	50	58,33	66,67	75	
17	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	67,69	69,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	
18	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	42,5	80,5	80,5	81,5	81,5	82,5	83,5	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan bagian dari Indikator kinerja perangkat daerah yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan urusan PD. Ada 26 (dua puluh enam) indikator yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan Kota Dumai yang harus dicapai mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4.46 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	%	0	50	50	50	58,33	66,67	75	
2	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	positif	%	42,5	80,5	80,5	81,5	81,5	82,5	83,5	
3	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	positif	%	67,69	69,5	71,5	72,5	73,5	75,5	75,5	
5	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	positif	%	67,69	69,5	71,5	72,5	73,5	75,5	75,5	
6	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15	positif	%	0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
7	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	positif	%	67,69	69,5	71,5	72,5	73,5	75,5	75,5	
8	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	positif	%	6,97	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	
9	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	positif	%	81,12	82	84	85	85	86	87	
10	Cakupan penemuan kasus TB	positif	%	79,28	80	83	85	87	90	92	
11	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	positif	%	58,33	58,33	58,33	58,33	66,67	66,67	66,67	
14	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan persediaan kesehatan sesuai standar	positif	%	92	92,5	93	93	93,5	94	94	
15	Persentase lanjut usia yang mandiri	positif	%	0	75	76	77	78	80	83	
16	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
18	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	positif	Per 1000 Penduduk	4,73	4,8	4,85	4,9	4,95	5	5	
19	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	positif	%	54,45	55	60	65	70	80	90	
20	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	positif	%	0	76	76	76	76	76	76	
21	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	positif	%	76	76	76	76	76	76	76	
22	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	positif	%	85	85	85	87	87	89	91	
23	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	positif	%	67,69	59,5	71,5	72,5	73,5	75,5	75,5	
24	Cakupan penemuan kasus TB	positif	%	79,28	80	83	85	87	90	92	
25	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	positif	%	0	12,4	12	12	11	10	10	
26	Persentase puskesmas dengan SDMK sesuai standar	positif	%	60	60	70	80	90	100	100	

Selain Indikator tersebut di atas, ada beberapa indikator kinerja yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti **Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Layanan Urusan Wajib Dasar)** berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang meliputi indikator aspek kesejahteraan masyarakat; **Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)** berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 yang terdiri dari 12 indikator pelayanan kesehatan; **Indikator Sustainable Development Goals (SDG's)** bidang kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 yang terdiri dari indikator (a) tujuan 1 yakni mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun; (b) tujuan 2 yakni menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; (c) tujuan 3 yakni menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; dan (d) tujuan 6 yakni menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; **Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 Urusan Kesehatan** berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025. Uraian indikator kinerja tersebut di atas tertuang pada lampiran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029; **Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)** Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta **Indikator Kinerja Program** berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan Surat Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK 2025-2029 dalam RPJMD Renstra PD 2025-2029.



B A B V

PENUTUP



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029 disusun mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029 ini menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan yang dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Dinas Kesehatan Kota Dumai sampai dengan Tahun 2030. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai tahun 2025-2029 ini disusun mengacu pada Visi dan Misi Walikota Kota Dumai terpilih untuk periode 2025-2029 dan disusun dengan tujuan agar dapat menjawab dan memfokuskan upaya Dinas Kesehatan Kota Dumai menghadapi tantangan pembangunan kesehatan di Kota Dumai yang semakin kompleks.

Rencana Strategis Dinas kesehatan Kota Dumai Tahun 2025-2029 merupakan pedoman perencanaan bagi Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam menyusun program dan kegiatan dalam pembangunan kesehatan dan juga dijadikan acuan dalam pelaksanaan dan penilaian kegiatan Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam 5 tahun ke depan. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai berisikan Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta penganggaran untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Untuk menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran telah ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui upaya penetapan kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai ang lebih terarah dan terukur diharapkan hasil pembangunan kesehatan lebih bermakna dan bermanfaat.

Keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai tergantung pada faktor-faktor kunci keberhasilan dan dukungan partisipasi masyarakat, sektor swasta dan lembaga pemerintah lain dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan.

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA
RENSTRA DINAS KESEHATAN
KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

**TARGET INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI TAHUN 2025 S/D 2030**

NO	URAIAN INDIKATOR KINERJA	Satuan	Baseline 2024	Target Indikator Kinerja Kota Dumai						Target Nasional Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025		Bidang Pelaksana dan Penanggung Jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	INDIKATOR SASARAN RPJMD KOTA DUMAI (KESEHATAN) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2025											
1	Umur Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tahun	73,5	73,66	73,81	73,97	74,13	74,28	74,44	74,43	75,40	BPS
2	Jumlah kelahiran hidup	Jiwa	9.537	9.914	10.305	10.712	11.135	11.575	12.032			Kesehatan Masyarakat
3	Jumlah kematian balita absolut	kasus	110	138	136	134	132	129	129			Kesehatan Masyarakat
4	Jumlah kematian ibu absolut	kasus	7	9	8	7	6	5	5			Kesehatan Masyarakat
5	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	16,9 *	16,8	16,5	16	15,5	15	14	18,80	14,20	Kesehatan Masyarakat
6	Penanganan Tuberkulosis: a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	79,28	80	83	85	87	90	92	90	90	P2P
	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment succes rate) (%)	%	91,26	95,2	97,48	98	98,2	98,4	98,6			P2P
7	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	%	99,28	100	100	100	100	100	100	98,6	99	Pelayanan Kesehatan
8	Cakupan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap	%	80,55	80,00	85,00	90,00	93	95	95	80	95	P2P
9	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	75,80	100	100	100	100	100	100	5	38	P2P
	Indikator Kinerja Program berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan Surat Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025											
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat											
1	Prevalensi depresi pada usia ≥ 15 tahun	%		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1,4	1,4	P2P
2	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100			Kesehatan Masyarakat
3	Prevalensi obesitas > 18 tahun	%	6,97	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	P2P
4	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	0	50	50	50	58,33	66,67	75			Pelayanan Kesehatan
5	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	42,5	80,5	80,5	81,5	81,5	82,5	83,5			Pelayanan Kesehatan
	a. Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (Puskesmas)	%		≥ 76	≥ 76	≥ 76	≥ 76	≥ 76	≥ 76			Puskesmas
	b. Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (RSUD Dumai)	%	85	85	85	87	87	89	91			RSUD Dumai
6	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	81,12	82	83	84	85	86	87			Kesehatan Masyarakat
7	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	100	100	100	100	100	100	100			Pelayanan Kesehatan
8	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	58,33	58,33	58,33	58,33	66,67	66,67	66,67			Pelayanan Kesehatan
9	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	92	92,5	93	93	93,5	94	94			Sumber Daya Kesehatan
10	Persentase lanjut usia yang mandiri	%		75	76	77	78	80	83	75	83	Kesehatan Masyarakat
11	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	%		12,4	12	12	11	10	10	12,4	8,4	P2P
12	Cakupan penemuan kasus TB	%	79,28	80	83	85	87	90	92	90	90	P2P
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan											
1	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	per 1.000 penduduk	4,73	4,8	4,85	4,9	4,95	5	5			Sumber Daya Kesehatan
2	Persentase puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%	60	60	70	80	90	100	100	17	50	Sumber Daya Kesehatan
3	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	67	86	Pelayanan Kesehatan/RSUD Dumai
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman											
1	Persentase cakupan sediaan farmasi,alat kesehatan dan makanan minuman	%	54,45	55	60	65	70	80	90			Sumber Daya Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan											
1	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	%	67,69	69,5	71,5	72,5	73,5	75,5	75,5			Kesehatan Masyarakat
	A. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Layanan Urusan Wajib Dasar) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017											
	Tingkat Sasaran											
1	Angka usia harapan hidup	Tahun	73,5	73,66	73,81	73,97	74,13	74,28	74,44	74,43	75,40	BPS
2	Persentase balita gizi buruk	%	0,10	1	1	1	1	1	1			Kesehatan Masyarakat
3	Persentase balita gizi kurang	%	1,62	2	2	2	2	2	2			Kesehatan Masyarakat
4	Cakupan desa siaga aktif	%	100	100	100	100	100	100	100			Kesehatan Masyarakat
	Tingkat Outcome											
1	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	per 1.000 K H	9,33	11	10	9,5	9,3	9	8,5			Kesehatan Masyarakat
2	Angka kelangsungan hidup bayi	per 1.000 K H	90,67	89	90	90,5	90,7	91	91,5			Kesehatan Masyarakat
3	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	per 1.000 K H	11,53	15	14,7	14,5	14,3	14	13,9	15	11,90	Kesehatan Masyarakat
4	Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	per 1.000 K H	7,76	9,5	9,3	9,1	8,9	8,8	8,6			Kesehatan Masyarakat
5	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100.000 KH	73,40	94,7	91,2	88,5	81,6	79,9	79,7	122	77	Kesehatan Masyarakat
6	Rasio posyandu per satuan balita	per 1.000 balita	5,66	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68			Kesehatan Masyarakat
7	Rasio puskesmas, poliklinik,ustu per satuan penduduk	per 1.000 pddk	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12			Sumber Daya Kesehatan
8	Rasio Rumah Sakit Per satuan Penduduk	per 1.000 pddk	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02			Pelayanan Kesehatan
9	Rasio dokter per satuan penduduk	per 1.000 pddk	0,93	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6			Sumber Daya Kesehatan
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	per 1.000 pddk	1,36	1,42	1,43	1,44	1,45	1,46	1,47			Sumber Daya Kesehatan
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	82,09	84	86	88	90	90,3	90,5			Kesehatan Masyarakat
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	89,18	89,2	89,5	90	91	92	95	88	95	Kesehatan Masyarakat

NO	URAIAN INDIKATOR KINERJA	Satuan	Baseline 2024	Target Indikator Kinerja Kota Dumai						Target Nasional		Bidang Pelaksana dan Penanggung Jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025		
										2025	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	55,56	60	65	70	75	80	80			P2P
14	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100			Kesehatan Masyarakat
15	Persentase anak usia < 1 tahun yang di imunisasi campak	%	83,61	85	88	91	93	95	95			P2P
16	Non Polio AFP Rate penduduk < 15 tahun	per100.000 pddk	5,09	5	5	5	5	5	5			P2P
17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100			P2P
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	90	90	90	90	90	90	90			P2P
19	Tingkat prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk	per 100.000 pddk	307,34	305	295	251	224	204	204	329	190	P2P
20	Tingkat kematian karena Tuberkulosis per 100.000 penduduk	per 100.000 pddk	11,06	10,5	10	9,5	9	8,5	8			P2P
21	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	79,28	90	90	90	90	90	90			P2P
22	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	71,57	75	80	85	90	95	95			P2P
23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	%	100	100	100	100	100	100	100			P2P
24	Penderita Diare yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100			P2P
25	Angka Kejadian Malaria (API)	per 100.000 pddk	2,62	2,5	2,25	2	1,75	1,5	1,25			P2P
26	Tingkat kematian akibat Malaria	per 1.000 pddk	0	0	0	0	0	0	0			P2P
27	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu	%	0	0	0	0	0	0	0			P2P
28	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	0	0	0	0	0	0	0			P2P
29	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,12	<1	<1	<1	<1	<1	<1			P2P
30	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%		30	35	40	45	50	50			P2P
31	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	66,38	100	100	100	100	100	100			Pelayanan Kesehatan
32	Cakupan kunjungan bayi	%	63,29	90	91	92	93	94	95			Kesehatan Masyarakat
33	Cakupan Puskesmas	%	144,86	144,86	144,86	157,14	157,14	157,14	157,14			Sumber Daya Kesehatan
34	Cakupan Pembantu Puskesmas	%	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33			Sumber Daya Kesehatan
35	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%	89,82	90	91	92	93	94	95			Kesehatan Masyarakat
36	Cakupan pelayanan nifas	%	83,37	84	85	86	87	88	89			Kesehatan Masyarakat
37	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	%	22,58	22,6	22,7	22,8	22,9	23	23,1			Kesehatan Masyarakat
38	Cakupan pelayanan anak balita	%	99,33	80	80	80	80	80	80			Kesehatan Masyarakat
39	Cakupan pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	%										Kesehatan Masyarakat
40	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD Kelas 1 dan setingkat	%	93,77	94	94,1	94,2	94,3	94,4	94,5			Kesehatan Masyarakat
41	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat	%	66,38	100	100	100	100	100	100			Pelayanan Kesehatan
42	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100			Pelayanan Kesehatan
43	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100			P2P
B	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024											
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	%	89,55	100	100	100	100	100	100			Kesehatan Masyarakat
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	%	89,55	100	100	100	100	100	100			Kesehatan Masyarakat
3	Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	%	92,99	100	100	100	100	100	100			Kesehatan Masyarakat
4	Pelayanan Kesehatan Balita	%	99,33	100	100	100	100	100	100			Kesehatan Masyarakat
5	Pelayanan Kesehatan Pada usia pendidikan Dasar	%	83,98	100	100	100	100	100	100			Kesehatan Masyarakat
6	Pelayanan Kesehatan Pada usia produktif	%	90,26	100	100	100	100	100	100			P2P
7	Pelayanan Kesehatan Pada usia lanjut	%	100	100	100	100	100	100	100			Kesehatan Masyarakat
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	75,80	100	100	100	100	100	100			P2P
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	%	100	100	100	100	100	100	100			P2P
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	%	100	100	100	100	100	100	100			P2P
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan terduga Tubekulosis	%	100	100	100	100	100	100	100			P2P
12	Pelayanan Kesehatan orang beresiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%	83,66	100	100	100	100	100	100			P2P
C	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG's Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017											
1	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%	89,18	89,2	89,5	90	91	92	95	88	95	Kesehatan Masyarakat
2	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	%	42	45	50	55	60	65	70			P2P
3	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	%	2	2	2	2	2	2	2			Kesehatan Masyarakat
4	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. Prevalensi balita stunting (Hasil Survei)	%	16,9 *	16,8	16,5	16	15,5	15	14	18,80	14,20	Kesehatan Masyarakat
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. Prevalensi balita stunting (data e-PPGBM)	%	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,82	0,81			Kesehatan Masyarakat
5	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	%	0,4	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34			Kesehatan Masyarakat
6	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe (wasting).	%	1,72	1,71	1,7	1,69	1,68	1,67	1,66	8	5	Kesehatan Masyarakat
7	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	%	4,95	4,95	4,94	4,93	4,92	4,91	4,9	26	20	Kesehatan Masyarakat
8	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	%	60,98	69	69	70	70	71	71	73	85	Kesehatan Masyarakat
9	Angka Kematian Ibu (AKI).	per 100.000 Kelahiran Hidup	73,40	94,7	91,2	88,5	81,6	79,9	79,7	122	77	Kesehatan Masyarakat

NO	URAIAN INDIKATOR KINERJA	Satuan	Baseline 2024	Target Indikator Kinerja Kota Dumai						Target Nasional		Bidang Pelaksana dan Penanggung Jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025		
										2025	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	%	89,18	89,2	89,5	90	91	92	95	88	95	Kesehatan Masyarakat
11	Cakupan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap	%	80,55	80	85	90	93	95	95	80	95	P2P
12	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	per 1.000 Kelahiran Hidup	11,53	15	14,7	14,5	14,3	14	13,9	15	11,90	Kesehatan Masyarakat
13	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	per 1.000 Kelahiran Hidup	7,76	9,5	9,3	9,1	8,9	8,8	8,6			Kesehatan Masyarakat
14	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	per 1.000 Kelahiran Hidup	9,33	11	10	9,5	9,3	9	8,5			Kesehatan Masyarakat
15	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	%	100	100	100	100	100	100	100			P2P
16	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	%	0,19	<1	<1	<1	<1	<1	<1			P2P
17	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	per 100.000 penduduk	307,34	305	295	286	251	224	204	329	190	P2P
18	Kejadian Malaria per 1000 orang.	per 1.000 penduduk	0,026	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			P2P
19	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	1			P2P
20	Persentase orang yang terbebas dari penyakit filariasis	%	0	0	0	0	0	0	0			P2P
21	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Orang	13	12	12	12	11	11	10			P2P
22	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	1			P2P
23	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	%		7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4			P2P
24	Prevalensi tekanan darah tinggi.	%		30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8			P2P
25	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	%		23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4			P2P
26	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	%	0,09	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22			P2P
27	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	1			P2P
28	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	99,28	100	100	100	100	100	100	98,6	99	Pelayanan Kesehatan
29	Cakupan penerima Jamkesmas dan Jamkesda/BPJS orang miskin/KIS	%	100	100	100	100	100	100	100			Pelayanan Kesehatan
30	Proporsi kematian akibat keracunan.	%	0,09	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17			Pelayanan Kesehatan
31	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	%										P2P
32	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	%	100	100	100	100	100	100	100			IFK
33	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	per 1000 penduduk	4,73	4,80	4,85	4,90	4,95	5	5			Sumber Daya Kesehatan
34	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Kelurahan	36	36	36	36	36	36	36			Kesehatan Masyarakat
35	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBTS).	Kelurahan	36	36	36	36	36	36	36			Kesehatan Masyarakat
D	Indikator Kinerja RPJMN Tahun 2025-2029 (Kesehatan) Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025											
1	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	73,40	94,7	91,2	88,5	81,6	79,9	79,7	122	77	Kesehatan Masyarakat
2	Angka Kematian Balita	per 1.000 KH	11,53	15	14,7	14,5	14,3	14	13,9	15	11,90	Kesehatan Masyarakat
3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)	%	16,9 *	16,8	16,5	16	15,5	15	14	18,80	14,20	Kesehatan Masyarakat
4	Prevalensi remaja putri anemia	%	9,03	9,03	9,02	9,01	9,00	8,99	8,98	25	15	Kesehatan Masyarakat
5	Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	%		10	20	30	40	45	50	10	50	Kesehatan Masyarakat
6	Persentase lanjut usia yang mandiri	%		75	76	77	78	80	83	75	83	Kesehatan Masyarakat
7	Cakupan penerima pemeriksaan gratis	%		30	35	40	45	50	50	36	70	P2P
8	Persentase persalinan di fasyankes	%	89,18	89,2	89,5	90	91	92	95	88	95	Kesehatan Masyarakat
9	Persentase Kab/kota dengan RS PONEK sesuai standar	%		Kewenangan	Dinas Kesehatan Provinsi Riau					20	80	Pelayanan Kesehatan
10	Persentase Kab/kota dengan CFR direct obstrectic (eklampsi & perdarahan post partum) < 1%	%		Kewenangan	Dinas Kesehatan Provinsi Riau					25	80	Kesehatan Masyarakat
11	Persentase Antenatal Care (ANC) 6 kali (K6)	%	87,86	87,86	87,90	87,92	88	89	90	80	90	Kesehatan Masyarakat
12	Cakupan Antenatal Care (ANC) sesuai standar (12T)	%		63	65	67	70	72	75	63	75	Kesehatan Masyarakat
13	Persentase anemia pada ibu hamil	%	4,95	4,94	4,93	4,92	4,91	4,9	4,89	26	20	Kesehatan Masyarakat
14	Persentase calon pengantin yang mendapat skrining	%	76,27	76,28	76,29	76,30	76,35	76,40	76,50	50	70	Kesehatan Masyarakat
15	Cakupan KF lengkap sesuai standar	%	83,37	84	85	86	87	88	89	88	89	Kesehatan Masyarakat
16	Persentase KB Pasca Persalinan	%	82,42	82	82	83	83	84	84	57	75	Kesehatan Masyarakat
17	Cakupan kunjungan neonatal (KN) lengkap sesuai standar	%	89,20	90	91	92	93	94	95	91	95	Kesehatan Masyarakat
18	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	80,55	82,5	85	90	93	95	95	80	95	P2P
19	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	%	1,72	1,71	1,7	1,69	1,68	1,67	1,66	8	5	Kesehatan Masyarakat
20	Persentase bayi lahir premature (<37 minggu)	%	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	11	9	Kesehatan Masyarakat
21	Perentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK)	%	4,67	6	6	5	4	3	2	15	10	Kesehatan Masyarakat
22	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	%	60,98	69	69	70	70	71	71	73	85	Kesehatan Masyarakat
23	Persentase bayi usia 6 bulan mendapat ASI eksklusif	%	45,11	61	63	65	70	71	73	61	73	Kesehatan Masyarakat
24	Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI	%	85	85,10	85,20	85,30	85,40	85,50	85,60	73	85	Kesehatan Masyarakat
25	Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan	%	72,67	72,69	72,71	72,72	72,73	72,74	72,75	50	70	Kesehatan Masyarakat
26	Persentase remaja putri yang mengonsumsi TTD	%	96,66	96,67	96,68	96,69	96,70	96,71	96,72	65	80	Kesehatan Masyarakat
27	Persentase tempat kerja formal melaksanakan kesehatan	%		25	35	45	55	60	70	25	70	Kesehatan Masyarakat
28	Jumlah Pos upaya kesehatan kerja (Pos UKK) yang terbentuk di tempat kerja informal	pos	16	17	17	17	17	17	17	15.000	60.000	Kesehatan Masyarakat
29	Persentase fasyankes melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja	%		10	20	30	40	45	50	10	50	Kesehatan Masyarakat
30	Persentase lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	87,84	87,85	87,86	87,86	87,87	87,88	87,89	50	70	Kesehatan Masyarakat
31	Persentase puskesmas santun lansia	%	100	100	100	100	100	100	100	70	90	Kesehatan Masyarakat
32	Persentase RS yang memberikan layanan geriatri terpadu	%		16,67	16,67	16,67	16,67	33	33	20	50	Pelayanan Kesehatan
33	Persentase lanjut usia dengan ketergantungan sedang, berat dan total mendapatkan perawatan jangka panjang (PJP)	%		10	20	30	40	45	50	10	50	Kesehatan Masyarakat
34	Persentase puskesmas mampu pelayanan KB MKJP	%	100	100	100	100	100	100	100	30	50	Kesehatan Masyarakat

NO	URAIAN INDIKATOR KINERJA	Satuan	Baseline 2024	Target Indikator Kinerja Kota Dumai						Target Nasional Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025		Bidang Pelaksana dan Penanggung Jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2029	
										11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	Persentase kab/kota dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis >80%	%	Kewenangan		Dinas Kesehatan Provinsi Riau					40	90	P2P
36	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia bayi baru lahir	%		40	45	50	60	70	80	65	80	P2P
37	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia balita dan anak usia prasekolah	%		40	45	50	55	60	70	50	70	P2P
38	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja	%		40	45	50	55	60	70	20	70	P2P
39	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa	%		40	45	50	55	60	70	35	70	P2P
40	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia	%		40	45	50	55	60	70	50	70	P2P
41	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	307,34	305	295	286	251	224	204	329	190	P2P
42	Kab/kota dengan eliminasi kusta	kab/kota	Kewenangan		Dinas Kesehatan Provinsi Riau					11	42	P2P
43	Desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi	desa	Tidak ada		kasus schistosomiasis					18	28	P2P
44	Kabupaten/kota dengan eliminasi malaria	kab/kota	Kewenangan		Dinas Kesehatan Provinsi Riau					425	500	P2P
45	Persentase diabetes dalam pengendalian	%		15	17	20	22	25	25	15	25	P2P
46	Persentase hipertensi dalam pengendalian	%		20	22	30	35	40	40	20	40	P2P
47	Kab/kota yang mencapai target pra eliminasi kanker leher rahim	kab/kota	Kewenangan		Dinas Kesehatan Provinsi Riau					30	125	P2P
48	Prevalensi depresi di umur ≥ 15 tahun	%		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1,4	1,4	P2P
49	Kabupaten/kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	kab/kota	Kewenangan		Dinas Kesehatan Provinsi Riau					50	250	Kesehatan Masyarakat
50	Prevalensi obesitas > 18 tahun	%	6,97	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	P2P
51	Perentase merokok pada penduduk 10 -21 tahun	%		12,4	12	12	11	10	10	12,4	8,4	P2P
52	Cakupan penemuan kasus TBC (Notifikasi Kasus TBC)	%	79,28	80	83	85	87	90	92	90	90	P2P
53	Angka keberhasilan pengobatan TBC (TB Succes Rate)	%	91,26	92	92,5	93	93,5	94	95	90	90	P2P
54	Cakupan Pemberian Terapi Pencegahan pada Orang Kontak Serumah	%	68	72	89	80	80	80	80	72	80	P2P
55	Persentase pasien TBC yang memulai pengobatan (Enrollment TBC)	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	P2P
56	Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas	%	84,62	86	86,5	87	87,5	88	89	86	89	P2P
57	Persentase penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	%	58,33	65	70	75	80	85	90	90	90	P2P
58	Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru	%	15,38	13	11	9	7	5	5	< 5	< 5	P2P
59	Cakupan pemberian obat pencegahan massal (POPM) untuk schistosomiasis	%	Tidak ada		kasus schistosomiasis					87,2	100	P2P
60	ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan	%	100	100	100	100	100	100	100	90	90	P2P
61	Jumlah kab/kota yang mencapai positivity rate (PR) malaria < 5%	kab/kota	Kewenangan		Dinas Kesehatan Provinsi Riau					405	500	P2P
62	Jumlah kab/kota yang melakukan skrining DM > 60%	kab/kota	Kewenangan		Dinas Kesehatan Provinsi Riau					52	175	P2P
63	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	75,80	100	100	100	100	100	100	5	38	P2P
64	Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/Paps sesuai protokol	%	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	30	90	P2P
65	Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokol	%	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	20	70	P2P
66	Cakupan imunisasi HPV	%	66	90	90	90	90	90	90	90	90	P2P
67	Cakupan Skrining Kesehatan Jiwa	%	90	10	15	20	25	30	30	10	30	P2P
68	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%		74,85	75	75,30	75,50	77	80	65	80	Kesehatan Masyarakat
69	Persentase penduduk dengan literasi kesehatan	%		74,85	75	75,30	75,50	77	80	38,3	46,3	Kesehatan Masyarakat
70	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat	%	74,82	74,85	75	75,30	75,50	77	80	15	25	Kesehatan Masyarakat
71	Jumlah kab/kota yang menerapkan KTR	kab/kota	Kewenangan		Dinas Kesehatan Provinsi Riau					397	514	Kesehatan Masyarakat
72	Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pelayanan UBM	kab/kota	Kewenangan		Dinas Kesehatan Provinsi Riau					276	472	P2P
73	Persentase puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi untuk UBM	%	100	100	100	100	100	100	100	3	15	Sumber Daya Kesehatan
74	Kab/Kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat	kab/kota	Kewenangan		Dinas Kesehatan Provinsi Riau					100	300	Kesehatan Masyarakat
75	Kab/kota dengan kualitas udara dalam ruang yang memenuhi syarat (Kab/kota)	kab/kota	Kewenangan		Dinas Kesehatan Provinsi Riau					50	250	Kesehatan Masyarakat
76	Kab/kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	kab/kota	Kewenangan		Dinas Kesehatan Provinsi Riau					30	200	Kesehatan Masyarakat
77	Kab/kota sehat	kab/kota	Kewenangan		Dinas Kesehatan Provinsi Riau					182	330	Kesehatan Masyarakat
78	Persentase kab/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa (KLB) /wabah	%	Kewenangan		Dinas Kesehatan Provinsi Riau					40	70	P2P
79	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan	%	Kewenangan		BKK Kota Dumai					94	100	P2P
80	Jumlah KLB keracunan pangan	kejadian	0	0	0	0	0	0	0	250	50	P2P
81	Jumlah kab/kota eliminasi rabies	kab/kota	Kewenangan		Dinas Kesehatan Provinsi Riau					430	514	P2P
82	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	%	100	100	100	100	100	100	100	65	90	IFK
83	Persentase RS Pemerintah yang patuh memberikan antibiotik sistemik empirik sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	10	60	Pelayanan Kesehatan
84	Kab/kota yang merespon SKDR <24 jam minimal 80%	kab/kota	Kewenangan		Dinas Kesehatan Provinsi Riau					462	514	P2P
85	Persentase laboratorium kesmas tingkat 2-5 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya	%	1	1	1	1	1	1	1	30	100	Kesehatan Masyarakat
86	Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	%	Kewenangan		BKK Kota Dumai					73	85	P2P

NO	URAIAN INDIKATOR KINERJA	Satuan	Baseline 2024	Target Indikator Kinerja Kota Dumai						Target Nasional		Bidang Pelaksana dan Penanggung Jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025		
										2025	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	Persentase pintu masuk yang memiliki kapasitas dalam penanggulangan penyakit dan / atau faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	%	Kewenangan BKK Kota Dumai							47	75	P2P
88	Jumlah kab/kota endemis yang melaksanakan upaya preventif promotif rabies	kab/kota	Kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Riau							110	321	P2P
89	Persentase kab/kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah	%	Kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Riau							65	90	IFK
90	Persentase penurunan kekosongan (stock out) obat dan vaksin di fasyankes	%	10	10	10	15	15	20	20	10	30	IFK
91	Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	90	91	93	95	97	98	99	91	98	Sumber Daya Kesehatan
92	Persentase RS yang mengimplementasikan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA)	%	28	30	45	55	65	80	85	30	80	Sumber Daya Kesehatan
93	Persentase FKTP yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional	%	28	30	50	60	70	80	90	30	80	Sumber Daya Kesehatan
94	Kab/kota dengan tempat pengelolaan pangan siap saji memenuhi syarat	%	Kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Riau							50	360	Kesehatan Masyarakat
95	Kab/kota dengan persentase pangan olahan siap saji memenuhi syarat (POSS)	%	Kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Riau							50	360	Kesehatan Masyarakat
96	Persentase alat kesehatan yang memenuhi syarat pengujian dan penandaan	%	92	94	95	96	97	98	99	94	98	Sumber Daya Kesehatan
97	Persentase kab/kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	%	Kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Riau							20	75	Sumber Daya Kesehatan
98	Persentase puskesmas terakreditasi paripurna	%	60	60	60	100	100	100	100	28	70	Pelayanan Kesehatan
99	Persentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	%	100	100	100	100	100	100	100	38	85	Pelayanan Kesehatan
100	Persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	%	60	60	70	80	90	100	100	17	50	Sumber Daya Kesehatan
101	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	67	86	Pelayanan Kesehatan
102	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	99,28	98,6	98,6	98,7	98,8	98,9	99	98,6	99	Pelayanan Kesehatan
103	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	35	37	40	42	45	47	49	50	70	Pelayanan Kesehatan
104	Persentase Unit Pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan dengan ketersediaan tenaga kesehatan dan kader kesehatan sesuai standar	%	25	25	30	35	40	45	45	30	80	Sumber Daya Kesehatan
105	Persentase kab/kota dengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang efektif	%	Kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Riau							25	80	Kesehatan Masyarakat
106	Persentase puskesmas yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)	%	10	10	10	10	10	10	10	10	50	Pelayanan Kesehatan
107	Persentase puskesmas memiliki SPA sesuai standar	%	57,82	96,01	96,01	96,01	96,01	96,01	96,01	40	90	Sumber Daya Kesehatan
108	Persentase puskesmas yang mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	90	90	90	90	90	90	90	50	90	Kesehatan Masyarakat
109	Persentase puskesmas yang ramah penyandang disabilitas	%	100	100	100	100	100	100	100	35	75	Kesehatan Masyarakat
110	Persentase kab/kota dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan Ibu-Anak, kanker, jantung, Stroke, Ginjal sesuai standar	%	Kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Riau							20	80	Pelayanan Kesehatan
111	Persentase RS yang mencapai target INM (indikator Nasional Mutu)	%	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	8	40	Pelayanan Kesehatan
112	Persentase RS Pemerintah daerah yang memenuhi ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	%	72,98	72,98	73	75	76	77	80	45	80	Pelayanan Kesehatan
113	Kab/kota dengan RSUD tipe D yang ditingkatkan menjadi tipe C	%	Kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Riau							22	66	Pelayanan Kesehatan
114	Jumlah RS pemerintah yang memenuhi tingkat maturitas kemandirian	RS	1	1	1	1	1	1	1	5	30	Pelayanan Kesehatan
115	Jumlah kab/kota dengan SDM kesehatan puskesmas sesuai standar	kab/kota	Kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Riau							19	175	Sumber Daya Kesehatan
116	Jumlah kab/kota dengan jenis dokter spesialis pada RS sesuai standar	kab/kota	Kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Riau							270	345	Sumber Daya Kesehatan
117	Rasio dokter spesialis	per 1000 penduduk	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,19	0,24	Sumber Daya Kesehatan
118	Persentase SDMK yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan	%	20	22	25	25	30	30	30	15	35	Sumber Daya Kesehatan
119	Persentase provinsi dan kab/kota yang sudah mengintegrasikan indikator prioritas nasional kesehatan dalam dokumen perencanaan daerah	%	Kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Riau							70	90	Sekretariat
120	Persentase sistem informasi data kesehatan yang telah terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	30	31	32	33	34	35	36	20	100	Pelayanan Kesehatan
121	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem rujukan online nasional	%	0	1	1	1	1	1	1	20	80	Pelayanan Kesehatan
122	Jumlah layanan berbasis kedokteran presisi	%	0	16,67	33,33	50	66,67	83,33	100,00	4	15	Pelayanan Kesehatan
123	Cakupan kepesertaan aktif JKN usia 0-17 tahun	%	72,5	72,5	72,5	73	74	75	76	72,50	76	Pelayanan Kesehatan
124	Proporsi perempuan kawin/pernah kawin 15-49 tahun yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan	%	10,82	12	11	10	9	8	5	0,103	0,067	Kesehatan Masyarakat
E	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah											
1	Rasio daya tampung rumah sakit	Per 1000 Penduduk	2,1	2,1	2,1	2,05	2,05	2	2			Pelayanan Kesehatan
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100,00	100	100	100	100	100	100			Pelayanan Kesehatan
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	89,55	100	100	100	100	100	100			Kesehatan Masyarakat
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	89,55	100	100	100	100	100	100			Kesehatan Masyarakat
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	92,99	100	100	100	100	100	100			Kesehatan Masyarakat
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	99,33	100	100	100	100	100	100			Kesehatan Masyarakat

NO	URAIAN INDIKATOR KINERJA	Satuan	Baseline 2024	Target Indikator Kinerja Kota Dumai						Target Nasional		Bidang Pelaksana dan Penanggung Jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025		
										2025	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	83,98	100	100	100	100	100	100			Kesehatan Masyarakat
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	90,26	100	100	100	100	100	100			P2P
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100			Kesehatan Masyarakat
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	75,80	100	100	100	100	100	100			P2P
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100			P2P
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100			P2P
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100			P2P
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	83,66	100	100	100	100	100	100			P2P

KETERANGAN:

= Indikator baru, belum ada data existing tahun 2024

= Target Indikator Kinerja belum diisi